

Laporan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/
Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)
Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2021



Tim Koordinasi
Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs
Provinsi DKI Jakarta

Laporan

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Provinsi DKI Jakarta

Tahun 2021



Tim Penyusun

Tim Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta

Penanggung Jawab	: Anies Rasyid Baswedan, Ph.D., Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Ketua	: Ir. Ahmad Riza Patria, M.B.A., Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Koordinator Pelaksana	: Dr. Nasruddin Djoko Surjono, S.IP, S.T., M.E., M.B.A., Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
Ketua Tim Pelaksana	: drg. R. Dewi Satiasari, M.K.M., Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi DKI Jakarta
Ketua Kelompok Kerja	: drg. R. Dewi Satiasari, M.K.M., Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Sosial; Ahmad Giffari, S.Sos, MSE., Kepala Bidang Perekonomian Bappeda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Ekonomi; Deftrianov, S.T., M.S.E., Kepala Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup Bappeda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Lingkungan; Budi Setiawan, A.P, M.Si, Kepala Bidang Pemerintahan Bappeda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Sekretariat TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta:

Andini Eka Hapsari, S.Psi., M.B.A., Manajer Pilar Pembangunan Sosial; Abra Talattov, S.E., M.Sc., Manajer Pilar Pembangunan Ekonomi; Annisa Utami Kusuma Negara, S.Hum., M.E., Manajer Pilar Pembangunan Lingkungan; Yahya Zakaria, S.IP, M.Si., Manajer Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola; Yuli Istanto, S.Sn., Tenaga Ahli Desain Grafis; Hary Purnomo, Programmer

Sekretariat TPB/SDGs

Gedung Balaikota Provinsi DKI Jakarta, Blok H lantai 21
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Jakarta Pusat
Telp. +62 21 382 2760 Fax. +62 21 386 0521



sdgs.jakarta.go.id



sdgs@bapedadki.net



[@SDGsJakarta](https://twitter.com/SDGsJakarta)







Kata Sambutan

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pandemi merupakan momentum bagi kita semua untuk menata ulang kembali pilar-pilar pembangunan dengan melekatkan ke aspek keberlanjutan. Turunan konkret dari pembangunan berkelanjutan termanifestasikan dalam 253 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yang tercantum dalam dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi OKI Jakarta Tahun 2017-2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2018. Dalam upaya untuk memantau dan terus mengevaluasi progres tersebut telah dibuat Laporan Pemantauan TPB/SDGs Provinsi OKI Jakarta Tahun 2021. Laporan ini telah kami sampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri sebagai tindak lanjut dari amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Jakarta sebagai Kota Kolaborasi mendorong tiap pemangku kepentingan untuk memiliki andil dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Laporan ini berusaha memotret kolaborasi yang sudah dilakukan baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta yang berkontribusi bagi pencapaian

tujuan dalam SDGs. Inisiatif-inisiatif yang sudah dilakukan dirangkum dalam narasi laporan ini begitu pula tantangan saat ini yang sedang kita hadapi di tengah pandemi Covid-19. Krisis kesehatan ini hanya salah satu dari sekian isu yang dirujuk dalam TPB, harapannya Jakarta dapat menjadi kota berketahanan (*resilient city*) yang tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan multidimensi yang tergambarkan dalam tujuan-tujuan TPB.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah berkontribusi dalam membantu pencapaian TPB juga secara khusus pihak yang berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Dengan kolaborasi yang kokoh dan upaya kontinu saya harap Kota Jakarta dapat segera mencapai Zero Goals sebelum 2030.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 22 September 2022

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
selaku

Penanggungjawab Tim Koordinasi Pelaksanaan
Pencapaian SDGs Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.



Ringkasan Eksekutif

Provinsi DKI Jakarta masih menghadapi tantangan pandemi COVID-19 sepanjang tahun 2021. Dengan merebaknya varian baru, angka kasus sempat melonjak sebanyak dua kali, yakni pada bulan Februari dan Juni. Pembatasan pergerakan secara lebih ketat kembali diberlakukan secara nasional, termasuk di Provinsi DKI Jakarta. Dampaknya, upaya pemulihan berbagai sektor yang sedang dilakukan kembali menemui beberapa tantangan.

Pada sektor kesehatan, lonjakan kasus COVID-19 diiringi dengan penanggulangan melalui pemberian vaksinasi. Masih terdapat tantangan terutama pada perluasan cakupan vaksinasi dosis kedua COVID-19. Provinsi DKI Jakarta hingga akhir tahun 2021 telah menjangkau 9.267.497 orang atau 91,9% dari target. Diperlukan akselerasi agar dapat mencapai penuh target.

Walau demikian, sektor perekonomian menunjukkan tren membaik sepanjang tahun 2021. Mulai triwulan II - 2021 pertumbuhan ekonomi Jakarta tercatat tumbuh positif menyentuh angka 10,91% dan berlanjut tumbuh positif tumbuh 2,43% pada triwulan III - 2021 dan 3,64% pada triwulan IV - 2021. Terjadinya pemulihan ekonomi di Jakarta berdampak positif terhadap penyerapan lapangan kerja yang tercermin dari pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka dari 10,95% pada Agustus 2020 menjadi 8,50% pada Agustus 2021.

Di tengah tantangan yang ditemui, Provinsi DKI Jakarta masih berkomitmen untuk mendorong pencapaian TPB/SDGs. Pada tahun 2021, sebagian besar target telah

dicapai dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan 84% dari 208 indikator TPB/SDGs yang tersedia datanya telah berstatus tercapai dan membaik. Adapun rinciannya, sebanyak 109 indikator (52%) telah mencapai target (berlabel hijau). Sebanyak 66 indikator (32%) tercatat akan mencapai target/membaik dibandingkan pencapaian pada periode sebelumnya (berlabel biru). Sementara, indikator yang memerlukan perhatian khusus (berlabel merah) karena pencapaiannya masih di bawah target tercatat sebanyak 33 indikator (16%). Dari total sejumlah 253 indikator masih terdapat 45 indikator dengan data tidak tersedia.

Pada Pilar Pembangunan Sosial (tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5) terdapat 98 indikator. Terdapat 27 indikator (27,55%) diantaranya yang telah mencapai target. Sejumlah 34 indikator (34,69%) tercatat akan mencapai target/membaik dibandingkan pencapaian pada periode sebelumnya. Sementara itu, Indikator yang masih memerlukan perhatian khusus tercatat sebanyak 15 indikator (15,30%). Sedangkan sisanya terdapat 22 indikator (22,44%) yang datanya tidak tersedia.

Pilar Pembangunan Ekonomi (tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17) mencakup sebanyak 57 indikator. Tercatat sebanyak 34 indikator (59,65%) telah mencapai target. Sejumlah 9 indikator (15,79%) tercatat akan mencapai target/membaik dibandingkan pencapaian pada periode sebelumnya. Sementara indikator yang masih memerlukan perhatian khusus sebanyak 10 indikator (17,54%). Sedangkan sisanya terdapat 4 indikator (7%) yang datanya tidak tersedia.

Pilar Pembangunan Lingkungan (tujuan 6, 11, 12, 13, 14, dan 15) mencakup 67 indikator. Sebanyak 37 indikator (55,22%) tercatat telah mencapai target. Kemudian, 16 indikator (23,88%) tercatat akan mencapai target/membaik dibandingkan pencapaian pada periode sebelumnya dan tidak ada indikator yang tergolong memburuk di tahun 2021. Sementara itu sebanyak 14 indikator (20,89%) dengan data tidak tersedia.

Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola (tujuan 16) mencakup sebanyak 31 indikator. Terdapat 11 indikator yang telah mencapai target (35,4%). Kemudian, sebanyak 7 indikator (22,5%) tercatat akan mencapai target/membaik dibandingkan pencapaian pada periode sebelumnya dan 8 indikator (25,8%) memerlukan perhatian khusus dan sebanyak 5 indikator (16,13%) dengan data tidak tersedia.

Hampir seluruh pilar pembangunan, terutama lingkungan memiliki kecenderungan pencapaian yang baik. Hal ini merupakan hasil dari upaya kolaboratif seluruh unsur di Provinsi DKI Jakarta. Lebih jauh, dalam rangka mengoptimalkan kolaborasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berinovasi dengan membentuk forum bernama *Jakarta Development Collaboration Network (JDCN)*. Forum tersebut menjadi ruang seluruh aktor untuk berbagi peran dan sumber daya dalam menjawab tantangan yang ada. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara daring memfasilitasi terbangunnya kolaborasi dengan berbagai pihak non pemerintah sepanjang tahun 2021.



Daftar Isi

ii	Tim Penyusun
iv	Kata Sambutan
vi	Ringkasan Eksekutif
xiv	Daftar Isi
xvi	Daftar Gambar
xviii	Daftar Tabel
xix	Daftar Singkatan

1 BAB I Pendahuluan

2	Latar Belakang
4	Metodologi Penyusunan Laporan
5	Sistematika Pelaporan

7 BAB II Ringkasan Status Pencapaian TPB/SDGs

10	Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan
11	Tujuan 2. Tanpa Kelaparan
12	Tujuan 3. Kehidupan yang Sehat dan Sejahtera
12	Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas
13	Tujuan 5. Kesenjangan Gender
14	Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak
15	Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau
15	Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
16	Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
17	Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan
17	Tujuan 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
18	Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
19	Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim
19	Tujuan 14. Ekosistem Lautan
21	Tujuan 15. Ekosistem Daratan
21	Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
22	Tujuan 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

26 BAB III Tinjauan Status Pencapaian TPB/SDGs

27	Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan
31	Tujuan 2. Tanpa Kelaparan
33	Tujuan 3. Kehidupan yang Sehat dan Sejahtera
35	Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas

38	Tujuan 5. Kesenjaraan Gender
39	Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak
42	Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau
45	Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
49	Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
51	Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan
53	Tujuan 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
55	Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
58	Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim
61	Tujuan 14. Ekosistem Lautan
63	Tujuan 15. Ekosistem Daratan
65	Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
69	Tujuan 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
74	BAB IV Praktik-Praktik Baik
75	Praktik Baik Pilar Pembangunan Sosial
75	Praktik Baik Pilar Pembangunan Ekonomi
76	Praktik Baik Pilar Pembangunan Lingkungan
78	Praktik Baik Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola
80	BAB V Penutup
81	Kesimpulan
84	Saran

Daftar Gambar

- 3 - Gambar 1.1
Perkembangan Kasus Covid-19 di DKI Jakarta (1 Juni 2021 - 31 Desember 2021)
- 10 - Gambar 2.1
Pencapaian Target per Pilar TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
- 10 - Gambar 2.2
Kinerja Pencapaian TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 (253 Indikator)
- 10 - Gambar 2.3
Kinerja Pencapaian TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
- 27 - Gambar 3.1
Perkembangan Kemiskinan DKI Jakarta Tahun 2015-2021
- 28 - Gambar 3.2
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta dan Indonesia Tahun 2015 – 2021
- 28 - Gambar 3.3
Tingkat Kemiskinan Kota dan Kabupaten Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 – 2021
- 29 - Gambar 3.4
Kenaikan Tingkat Kemiskinan
- 31 - Gambar 3.5
Prevalensi Stunting Balita Nasional dan Provinsi DKI Jakarta 2007-2021
- 33 - Gambar 3.6
Angka Kematian Ibu 2018-2021 Provinsi DKI Jakarta
- 38 - Gambar 3.7
APK SMA/SMK/MA/Sederajat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2021
- 42 - Gambar 3.8
Rasio Elektrifikasi dan Konsumsi Listrik per Kapita Provinsi DKI Jakarta
- 43 - Gambar 3.9
Dukungan Genset Listrik dalam Kegiatan Opening Ceremony Presidensi G20 2022
- 43 - Gambar 3.10
Jakarta Investment Forum 2021
- 45 - Gambar 3.11
Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum di Kantor Pusat Bank Mandiri
- 45 - Gambar 3.12
Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta, Triwulan I 2019 - Triwulan IV - 2021
- 46 - Gambar 3.13
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi DKI Jakarta
- 46 - Gambar 3.14
Proporsi Pekerja Formal dan Informal di Jakarta, Agustus 2021
- 48 - Gambar 3.15
Peluncuran Portal Jaknaker.id
- 49 - Gambar 3.16
Peluncuran Portal Jaknaker.id
- 49 - Gambar 3.17
Pertumbuhan Industri Manufaktur di DKI Jakarta, Triwulan I 2019 - Triwulan IV - 2021 (% , yoy)
- 50 - Gambar 3.18
Jakarta Investment Forum 2021
- 51 - Gambar 3.19
Program Kolaborasi Pelatihan AC
- 52 - Gambar 3.20
Realisasi Belanja Bansos dan Persentase Kemiskinan Se-Jawa Bali Tahun 2021

57 - Gambar 3.21

Regulasi Terkait Gerakan Jakarta Sadar Sampah dari Hulu hingga Hilir

58 - Gambar 3.22

ISPU (Indeks Standar Pencemaran Udara) Januari-Desember 2021

59 - Gambar 3.23

Data rekap kejadian bencana dari bulan Juli hingga November 2021

59 - Gambar 3.24

Data korban 2020-2021 berdasarkan bencana

60 - Gambar 3.25

linimasa perjalanan regulasi peraturan pendukung dan rencana pembangunan untuk aksi iklim di Jakarta

69 - Gambar 3.26

Bagan Alur SIERA BPAD Provinsi DKI Jakarta

76 - Gambar 4.1

TIJE Apps Meraih Penghargaan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia (ICAI) 2021

76 - Gambar 4.2

Website Jakarta Rendah Emisi

77 - Gambar 4.3

Lokasi Uji Emisi

77 - Gambar 4.4

Sistem Pengolahan Sampah B3 Rumah Tangga

78 - Gambar 4.5

Mitra Kolaborasi dalam menuju Jakarta Rendah Emisi

79 - Gambar 4.6

Peluncuran Layanan Kependudukan di Jakarta 15 Menit Selesai

Daftar Tabel

23 - Tabel 2.1

Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

31 - Tabel 3.1

Prevalensi Stunting Provinsi DKI Jakarta (Dinas Kesehatan)

35 - Tabel 3.2

Angka Partisipasi Kasar (APK) Seluruh Jenjang Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 - 2021

36 - Tabel 3.3

Persentase guru yang bersertifikat pendidik

57 - Tabel 3.4

Proses Pengolahan Sampah B3 yang Bersumber dari Rumah Tangga

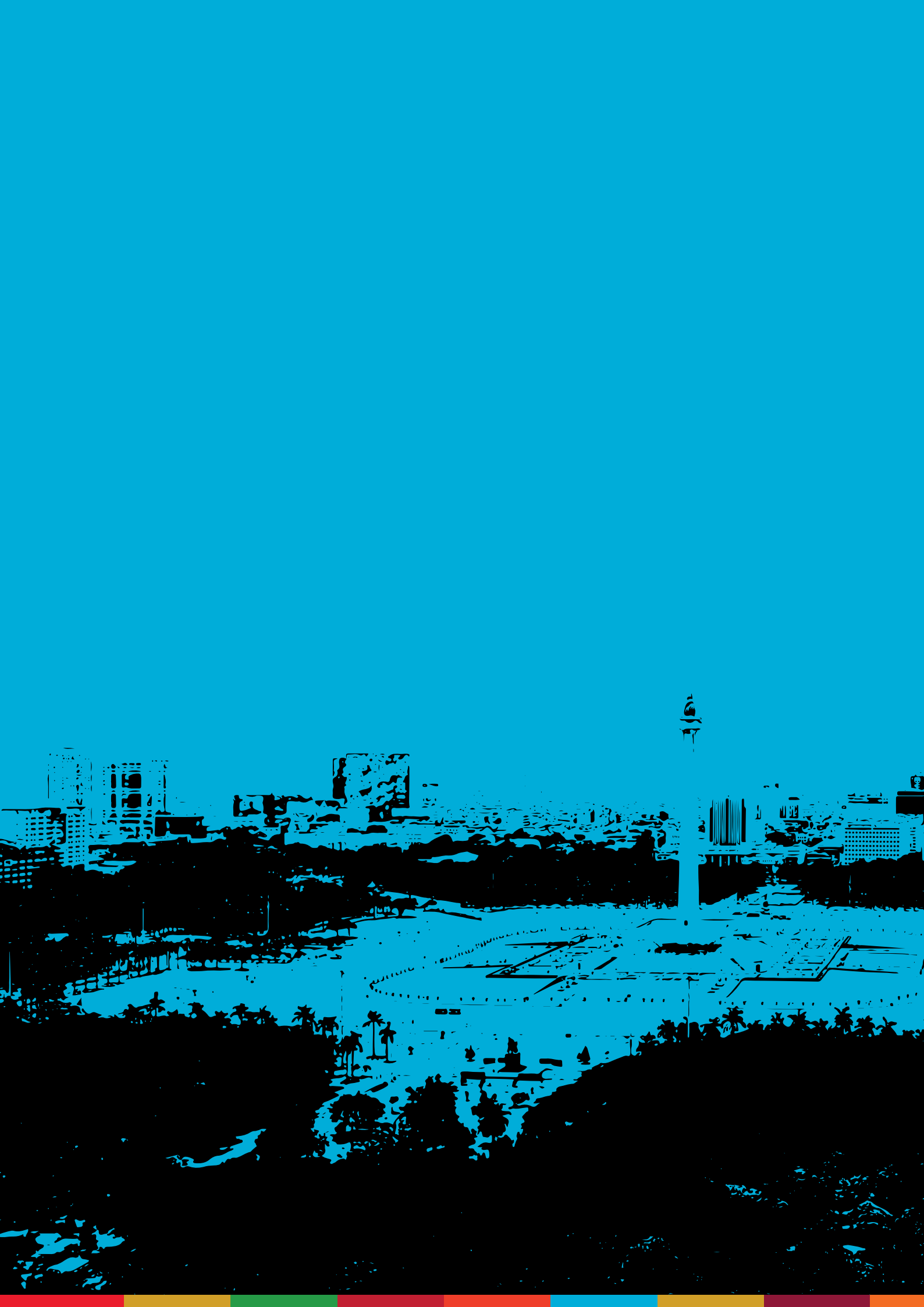
70 - Tabel 3.5

Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2021

Daftar Singkatan

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBD-P	: Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APD	: Alat Pelindung Diri
APK	: Angka Partisipasi Kasar
APM	: Angka Partisipasi Murni
Bakesbangpol	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Baduta	: Bayi Usia Bawah Dua Tahun
Balita	: Bayi Usia Bawah Lima Tahun
Bapenda	: Badan Pendapatan Daerah
Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPS	: Badan Pusat Statistik
Covid-19	: Corona Virus Disease 2019
Disdukcapil	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Diskominfo	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
DKPKP	: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
DLH	: Dinas Lingkungan Hidup
DPPAPP	: Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk
DPD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gernas	: Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
GRK	: Gas Rumah Kaca
HAM	: Hak Asasi Manusia
HIV-AIDS	: Human Immunodeficiency Virus-Acquired Immune Deficiency Syndrome
JDCN	: Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta (Jakarta Development Collaboration Network)
Kemdikbud	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KIE	: Komunikasi, Informasi dan Edukasi
KJP	: Kartu Jakarta Pintar
KJMU	: Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul
KPDBU	: Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Badan usaha
KSBB	: Kolaborasi Sosial Berskala Besar
KSD	: Kegiatan Strategis Daerah
MA	: Madrasah Aliyah
MDGs	: Millenium Development Goals
MI	: Madrasah Ibtidaiyah
MRT	: Moda Raya Terpadu/Mass Rapid Transit
MTs	: Madrasah Tsanawiyah
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah

PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PJJ	: Pembelajaran Jarak Jauh
PKK	: Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
PSBB	: Pembatasan Sosial Berskala Besar
PTM	: Penyakit Tidak Menular
RAD	: Rencana Aksi Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RTH	: Ruang Terbuka Hijau
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
Satpol PP	: Satuan Polisi Pamong Praja
SD	: Sekolah Dasar
SLB	: Sekolah Luar Biasa
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
Susenas	: Survei Sosial Ekonomi Nasional
SWRO	: Sea Water Reverse Osmosis
TGUPP	: Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan
TKPK	: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
TMP	: Taman Maju Bersama
TPB/SDGs	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
UHC	: Universal Health Coverage
UKPD	: Unit Kerja Perangkat Daerah
UMP	: Upah Minimum Provinsi
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
WASH	: Water, Sanitation and Hygiene
WHO	: World Health Organization
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian
3R	: Reuse, Reduce, dan Recycle



Bab I



Maju Kotanya, Bahagia Warganya

Pendahuluan



Latar Belakang

Di tengah berbagai upaya pemulihan dampak pandemi sepanjang tahun 2021, Provinsi DKI Jakarta masih menghadapi tantangan peningkatan kasus COVID-19. Pada bulan Januari-Februari dan Juni-Juli melonjaknya kasus secara nasional mendorong diberlakukannya berbagai kebijakan pembatasan pergerakan, seperti kerja dari rumah, belajar dari rumah, hingga pengetatan operasional tempat-tempat publik. Di Provinsi DKI Jakarta, pada pertengahan Juli penambahan kasus harian melampaui 14.000 kasus, sementara pada bulan Februari angkanya berada di atas 4000 kasus. Kondisi tersebut mendorong diberlakukan kembali berbagai pembatasan pergerakan masyarakat.

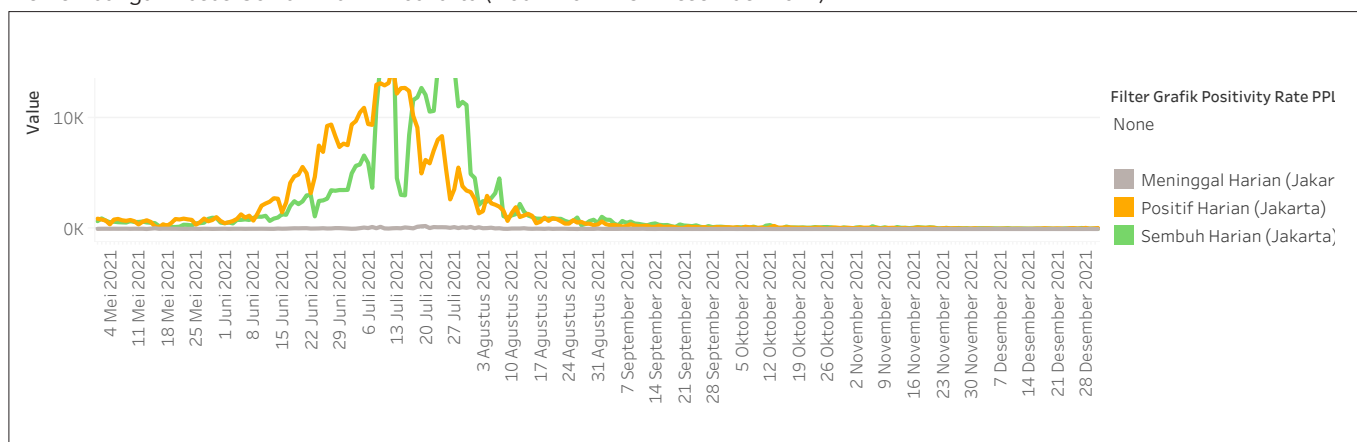
Walaupun terjadi lonjakan kasus COVID-19, perekonomian Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tren perbaikan sejak awal 2021. Pada triwulan kedua hingga

triwulan keempat, pertumbuhan ekonomi berhasil mencatatkan angka positif, yang pada tahun 2020 tumbuh negatif. Pertumbuhan tertinggi pada triwulan kedua menyentuh angka 10,9%. Angka kemiskinan juga cenderung bergerak membaik. Pada bulan Maret kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta berada di angka 4,72 kemudian menurun pada bulan September menjadi 4,67. Secara umum, kondisi ekonomi membaik dan kembali bergeliat.

Kebijakan perlindungan sosial, baik berupa bantuan sosial maupun jaminan sosial (KJP, Kartu Lansia, Kartu Disabilitas, dan sejenisnya) yang bergulir sepanjang tahun 2021 menjadi strategi peningkatan daya beli, terutama bagi masyarakat miskin-rentan. Selain itu, dapat meminimalkan potensi berbagai kelompok masyarakat semakin jatuh dalam kemiskinan. Kebijakan tersebut merupakan upaya untuk memulihkan dampak pandemi terhadap masyarakat miskin-rentan.

Gambar 1.1

Perkembangan Kasus Covid-19 di DKI Jakarta (1 Juni 2021 - 31 Desember 2021)



Sumber: Data diolah dari corona.jakarta.go.id

Upaya lain mempercepat pemulihan juga didukung tingginya angka vaksinasi di Provinsi DKI Jakarta. Per 29 Desember 2021, sebanyak 11.640.260 orang atau 115,4% telah mendapat dosis pertama. Proporsinya, 69% merupakan warga ber-KTP DKI dan 31% warga KTP non-DKI. Kemudian, vaksin dosis kedua telah menjangkau 9.267.497 orang atau 91,9%, dengan rincian sebanyak 71% merupakan warga ber-KTP DKI dan 29% warga KTP Non DKI. Melalui perluasan vaksinasi dapat menekan angka kasus baru COVID-19, sekaligus meminimalkan peluang diperketatnya pergerakan masyarakat.

Sejalan dengan itu, inisiatif Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) juga turut mempercepat pemulihan dampak-dampak pandemi. Berbagai aktor nonpemerintah difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk berkolaborasi melalui platform *Jakarta Development Collaboration Network* (JDCN). Secara daring berbagai aktor dapat mengakses portal resmi JDCN untuk mendapatkan informasi mengenai platform hingga mengetahui mekanisme kolaborasi. Terdapat beberapa tema kolaborasi yang dapat dipilih, mulai dari KSBB Pangan, KSBB UMKM, KSBB Penataan Permukiman, KSBB Pendidikan, KSBB Drainase Vertikal hingga KSBB Ketenagakerjaan. Setiap aktor dapat memilih tematik mana yang dinilai paling menarik atau memungkinkan bagi mereka. Selain itu, dapat juga dipilih lokasi di mana hendak berkolaborasi.

Inisiatif-inisiatif lain dari organisasi nonpemerintah juga banyak berkontribusi dalam percepatan pemulihan dampak pandemi. Tercatat beberapa inisiatif di sektor UMKM/IKM, pemberdayaan masyarakat, kesehatan masyarakat, hingga penanganan perubahan iklim telah dilakukan oleh organisasi nonpemerintah. Secara langsung dan tidak langsung, inisiatif tersebut mendukung percepatan pemulihan dampak.

Lebih lanjut, berbagai upaya tersebut sekaligus mendorong percepatan pencapaian pilar-pilar pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs). Sebagai contoh, pada pilar pembangunan sosial, terjadi penurunan prevalensi stunting, mulai normalnya layanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat dan aktivitas pendidikan dapat diselenggarakan secara tatap muka. Begitupun dengan pilar pembangunan ekonomi, di mana tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka menunjukkan perbaikan dari tahun sebelumnya. Untuk pilar pembangunan lingkungan terdapat kenaikan persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum (*public transportation modal share*) kendati persentasenya belum setinggi pada masa pra pandemi, dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola terdapat peningkatan capaian pada indikator terkait opini keuangan daerah, indeks reformasi birokrasi, SAKIP hingga cakupan dokumen kependudukan dan catatan sipil.

Metodologi Penyusunan Laporan

Penyusunan laporan ini dikoordinasikan oleh Tim Pelaksana dari Tim Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta, yang terdiri dari unsur Kelompok Kerja (Pokja) dan Sekretariat TPB/SDGs. Pokja diisi oleh unsur pemerintah dan unsur nonpemerintah yang terbagi ke dalam 4 Pokja: sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum & tata kelola. Kedua unsur tersebut berperan dalam penyusunan laporan ini.

Pada prosesnya, rancangan narasi laporan ini disusun oleh Tim Pelaksana berdasarkan pada data dan informasi terkini yang berasal dari OPD terkait maupun organisasi nonpemerintah. Kemudian, rancangan narasi disosialisasikan serta dibahas bersama pada tanggal 19 Mei 2022. Saat itu berbagai pihak memberikan masukan dan





saran pada rancangan narasi yang telah disusun. Setelah itu, Tim Pelaksana melakukan revisi terhadap rancangan narasi berdasarkan pada masukan dan saran yang ada.

Selanjutnya, narasi yang telah diperbarui kemudian disampaikan pada Pokja untuk diperiksa kembali. Setelah itu, rancangan akan disampaikan dan disahkan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Gubernur juga mengirimkan kepada Menteri PPN/ Kepala Bappenas melalui Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, serta kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

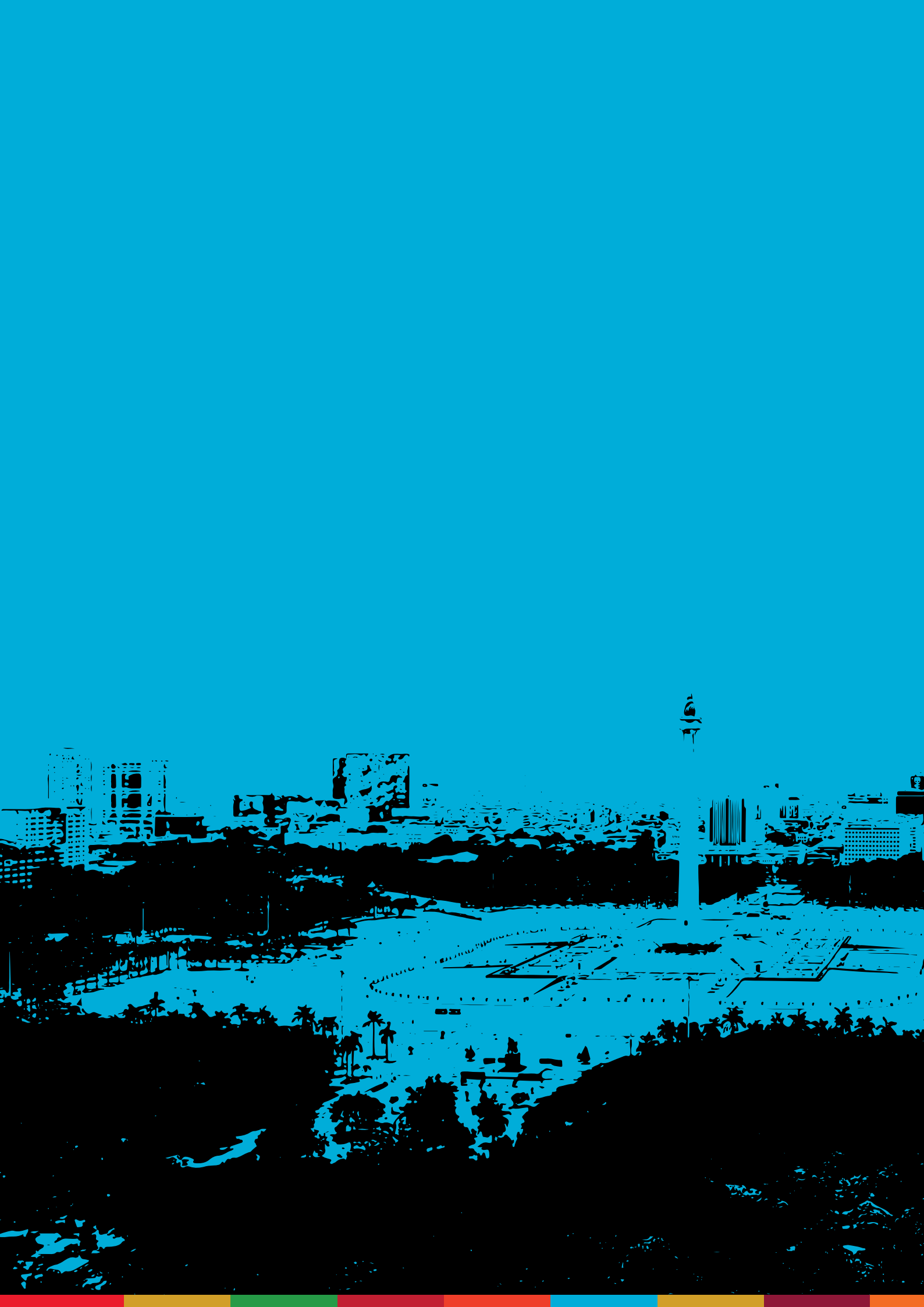
Sistematika Pelaporan

Laporan ini terdiri atas 5 (lima) bagian, sebagai berikut:

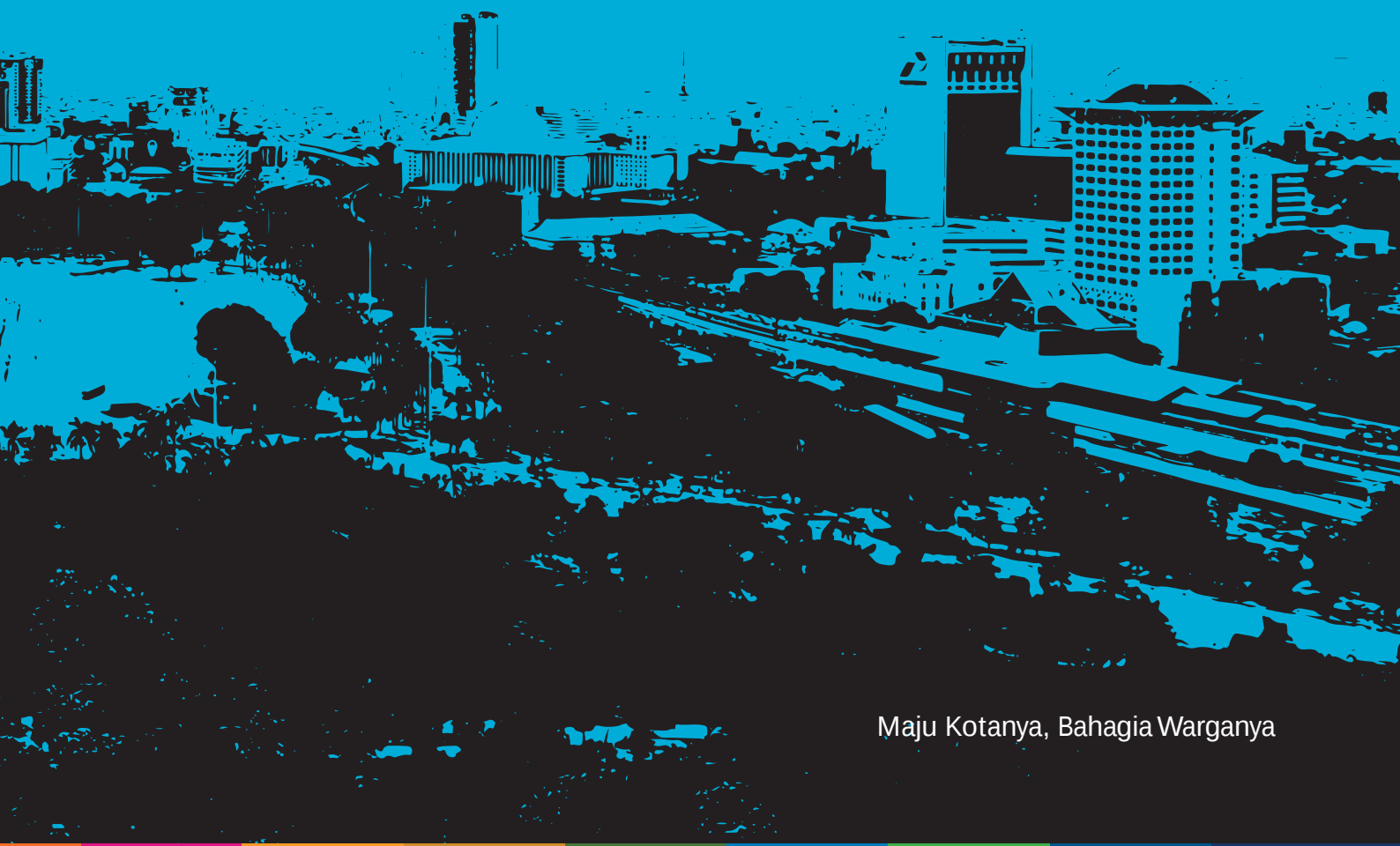
- i. Bab pertama tentang pendahuluan, menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan laporan serta gambaran awal terkait progres pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di Provinsi DKI Jakarta; metodologi penyusunan laporan; serta sistematika laporan.
- ii. Bab kedua tentang ringkasan status pencapaian TPB/SDGs, memberikan gambaran ringkas mengenai status pencapaian untuk indikator yang terdapat pada masing-masing tujuan di dalam TPB/SDGs.
- iii. Bab ketiga tentang tinjauan status dan upaya percepatan pencapaian TPB/SDGs, menjelaskan tentang kecenderungan dan tren atas pencapaian target pada setiap tujuan. Selain itu, bab ini juga menguraikan tantangan dan pembelajaran, kebijakan dan strategi, serta upaya yang telah, sedang dan akan dilakukan untuk mempercepat pencapaian target TPB/SDGs.
- iv. Bab keempat tentang praktik-praktik baik, memberikan ulasan singkat tentang pengalaman implementasi kebijakan yang telah dilakukan baik oleh pemerintah

maupun nonpemerintah dalam rangka pencapaian TPB/SDGs.

- v. Bab kelima tentang penutup, berisikan kesimpulan hasil evaluasi yang telah dilakukan serta rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan guna pencapaian TPB/SDGs.



Bab II



Maju Kotanya, Bahagia Warganya



II

Ringkasan Status Pencapaian TPB/SDGs



TPB/SDGs secara global mencakup 17 tujuan. Pemerintah Republik Indonesia mengklasifikasikan ketujuhbelas tujuan tersebut ke dalam 4 pilar pembangunan, meliputi: Pilar Pembangunan Sosial (mencakup Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5), Pilar Pembangunan Ekonomi (mencakup Tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17), Pilar Pembangunan Lingkungan (mencakup Tujuan 6, 11, 12, 13, 14 dan 15), serta Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola (mencakup Tujuan 16).

Kinerja pelaksanaan TPB/SDGs diindikasikan dengan pencapaian atas target pada masing-masing indikator di dalam setiap tujuan. Pencapaian tersebut dibagi kedalam 3 (tiga) kategori, yakni: mencapai target (berlabel HIJAU), akan mencapai target atau membaik bila dibandingkan dengan periode sebelumnya (berlabel BIRU), serta memerlukan perhatian khusus karena disamping belum mencapai target juga tercatat lebih rendah dibanding periode sebelumnya (berlabel MERAH). Pengkategorian ini sesuai dengan panduan teknis pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TPB/SDGs edisi I dari Kementerian PPN/Bappenas.

Pilar Pembangunan Sosial dengan 5 tujuan mencakup sebanyak 98 indikator yang di dalamnya tercatat sebanyak 27 indikator (27,55%) telah mencapai target (berlabel HIJAU). Sebanyak 34 indikator (34,69%) tercatat akan mencapai target/membaik dibandingkan pencapaian pada periode sebelumnya (berlabel BIRU). Indikator yang masih memerlukan perhatian khusus (berlabel MERAH) karena pencapaiannya baik saat ini maupun periode sebelumnya masih di bawah target dan tercatat sebanyak 15 indikator (15,30%). Terdapat 22 data (22,44%) tidak tersedia.

Pilar Pembangunan Ekonomi dengan 5 tujuan mencakup sebanyak 57 indikator. Pada pilar tersebut, tercatat sebanyak 34 indikator (59,6%) telah mencapai target (berlabel HIJAU). Sebanyak 9 indikator (15,8%) tercatat akan mencapai target/membaik dibandingkan pencapaian pada periode sebelumnya (berlabel BIRU). Indikator yang masih memerlukan perhatian khusus (berlabel MERAH) adalah sebanyak 10 indikator (17,5%). Sedangkan sisanya terdapat 4 indikator (7%) yang datanya tidak tersedia.

Pilar Pembangunan Lingkungan dengan 6 tujuan mencakup sebanyak 67 indikator. Pada pilar tersebut, tercatat sebanyak 37 indikator (55,22%) telah mencapai target (berlabel HIJAU). Sebanyak 16 indikator (23,88%) tercatat akan mencapai target/membaik dibandingkan pencapaian pada periode sebelumnya (berlabel BIRU) dan tidak ada indikator yang perlu perhatian khusus (berlabel MERAH), sisanya 14 indikator (20,89%) data tidak tersedia.

Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola dengan 1 tujuan mencakup sebanyak 31 indikator. Pada pilar tersebut, tercatat sebanyak 11 indikator telah mencapai target (35,4%) berlabel HIJAU), sebanyak 7 indikator (22,5%) tercatat akan mencapai target/membaik dibandingkan pencapaian pada periode sebelumnya (berlabel BIRU). Sementara, indikator yang masih memerlukan perhatian khusus (berlabel MERAH) sebanyak 8 indikator (25,8%). Untuk data yang tidak tersedia sebanyak 5 (16,13%).

Dari 253 indikator TPB/SDGs yang tercantum di dalam RAD TPB/SDGs tercatat sebanyak 208 indikator (82,21%)

Gambar 2.1

Pencapaian Target per Pilar TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

PILAR	Tercapai	Akan Tercapai/ Membaik	Perlu Perhatian Khusus	Data Tidak Tersedia		Total Indikator
				Jumlah	%	
Sosial	27	34	15	22	22,45	98
Ekonomi	34	9	10	4	7,02	57
Lingkungan	37	16	0	14	20,89	67
Hukum dan Tata Kelola	11	7	8	5	16,13	31
TOTAL	109	66	33	45	17,78	253

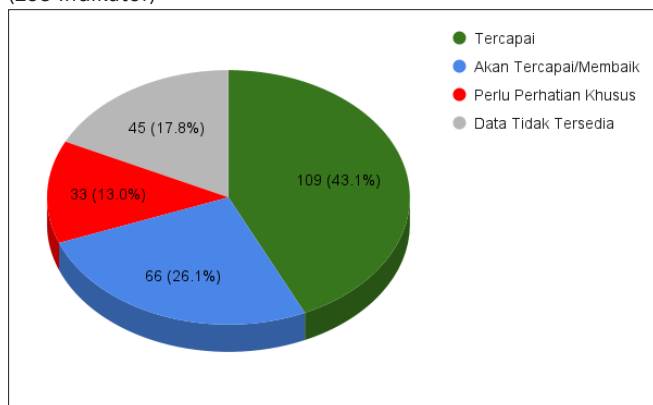
Sumber: diolah dari berbagai sumber

yang telah diidentifikasi data pencapaiannya. Sebanyak 45 indikator (17,78%) tidak terdapat data pencapaiannya tahun 2021.

Secara total, dari 208 indikator TPB/SDGs yang telah diidentifikasi tersebut, tercatat sebanyak 109 indikator (52%) telah mencapai target (berlabel HIJAU). Sebanyak 66 indikator (32%) tercatat akan mencapai target/membaik dibandingkan pencapaian pada periode sebelumnya (berlabel BIRU). Indikator yang masih memerlukan perhatian khusus (berlabel MERAH) karena pencapaiannya baik saat ini maupun periode sebelumnya masih di bawah target tercatat sebanyak 33 indikator (16%).

Gambar 2.2

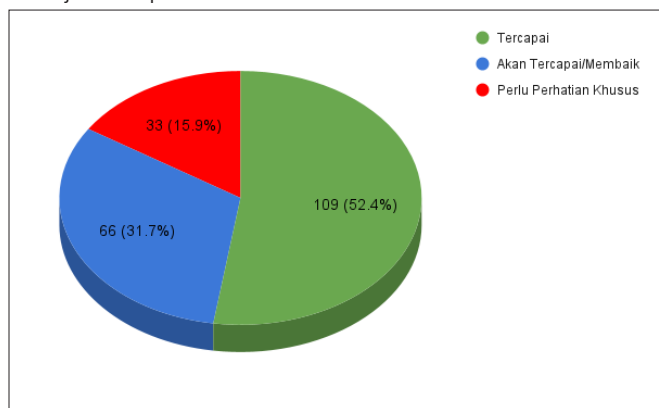
Kinerja Pencapaian TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 (253 Indikator)



Sumber: diolah dari berbagai sumber

Gambar 2.3

Kinerja Pencapaian TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021



Sumber: diolah dari berbagai sumber

Berikut ini diuraikan sejumlah data-data pencapaian indikator pada masing-masing tujuan yang ada di dalam TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta hingga tahun 2021.

Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Capaian Tujuan 1 pada tahun 2021 dari 21 indikator yang tersedia datanya menunjukkan 17 indikator (80,95%) berada pada status tercapai dan akan tercapai, dan 4 indikator (19,04%) pada status perlu perhatian khusus.

Pada isu pengentasan kemiskinan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tingkat Jakarta, terdapat

25 indikator yang dijadikan proksi. dari 25 indikator tersebut, terdapat 21 indikator dengan data tersedia. Dalam upaya menurunkan kemiskinan, angka kemiskinan di DKI Jakarta berhasil turun dari 4,69% dari September 2020 menjadi 4,67% di September 2021 (indikator 1.2.1*).

Terkait upaya untuk memberikan perlindungan sosial, proksi dari 4 indikator yang ada, seluruhnya telah tercapai. 1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) Bidang Kesehatan telah mencapai 98,39% melebihi target sebesar 95%, 1.3.1.(b) proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan mencapai 112,04% dari target 100%, 1.3.1.(c) # Persentase (%) PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang terpenuhi hak dasarnya 69,82% meningkat dari 63,21% pada tahun 2020, dan 1.3.1.(d) Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan 90.345, di atas target tercantum dalam RAD 2018-2022 sebesar 65.918 rumah tangga.

Mengenai pemenuhan akses masyarakat prasejahtera dan rentan pada sumber daya ekonomi, pelayanan dasar, dan kepemilikan, terdapat 10 proksi dengan 4 indikator tercapai, 5 indikator akan tercapai/membaik, dan 1 data tidak tersedia. Di tengah pandemi, Pemprov DKI tetap berkomitmen memberikan pelayanan dasar pada warga Jakarta di berbagai sektor. Hal tersebut tercermin pada pencapaian indikator 1.4.1.(b) # Persentase Cakupan Imunisasi Lanjutan pada anak usia 12-23 bulan mencapai 91,9% tahun 2021 di atas target 57% di RAD, 1.4.1.(c) # Persentase cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB (CPR) mencapai 60,32%, di atas target 58,66%, 1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan 95,17 menunjukkan kinerja meningkat dari 93,04 dari tahun 2021, dan 1.4.1.(k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN konsisten tetap 100% selama 4 tahun terakhir.

Berkaitan dengan meningkatkan ketahanan masyarakat miskin dari bencana, terdapat 7 indikator proksi dengan 3 akan tercapai/membaik, 2 masih membutuhkan perhatian khusus, dan 2 tidak terdapat data. Pada tahun 2021, jumlah kerugian akibat bencana (indikator 1.5.2.(a)) menunjukkan tren positif dengan angka yang terus menurun dari 2020, dari sebesar Rp252.057.901.000 menjadi Rp 147.354.395.000. Sementara, jumlah dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah (indikator 1.5.3*) masih membutuhkan perhatian karena baru terdapat 2 dokumen dibandingkan dengan target RAD sebanyak 3 dokumen.

Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Capaian pada Tujuan 2 untuk status tercapai dan akan tercapai/membaik dari data yang tersedia adalah sebesar 83,33% atau sebanyak 5 dari 6 indikator, yaitu indikator sebagai berikut:

Indikator 2.2.1* prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan angka 16,8%, membaik dari angka di tahun 2019 yaitu 19,9%. Pengukuran ini menggunakan SSGBI (Survei Status Gizi Balita Indonesia) untuk tahun 2019 dan SSGI (Studi Status Gizi Indonesia) untuk tahun 2021. Kemudian pengukuran untuk stunting baduta (bawah dua tahun) merujuk pada data elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (EPPGBM) menunjukkan pada indikator 2.2.1.(a) prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) semester I 2021 terus menunjukkan perbaikan dan telah berada di angka 4,49%, menurun tajam dari tahun 2020 sebesar 6,5%. Sedangkan indikator 2.2.2* prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia di bawah 5 tahun (balita) berdasarkan tipe, pada semester I 2021, berada di angka 4%, berhasil turun 0,1% dari 4,1%.

Selain prevalensi stunting dan malnutrisi, indikator yang menunjukkan status tercapai/membaik di Tujuan

2 adalah indikator 2.2.2(a) prevalensi anemia pada ibu hamil sebesar 6,27% yang menunjukkan tren penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, dan indikator 2.2.2.(b)# persentase bayi usia 0-6 bulan yang mendapatkan air susu ibu (ASI) eksklusif telah meningkat sampai 80,45% walau belum mencapai target RAD sebesar 85%.

Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Di antara tujuan lain pada pilar sosial, Tujuan 3 termasuk yang memiliki capaian status tercapai dan akan tercapai di atas 85%, mengalami perbaikan dari dampak yang dialami tahun 2020. Dari 27 indikator yang tersedia datanya, terdapat 23 indikator (85,18%) yang berada pada status tercapai dan akan tercapai di tahun 2021, sementara 4 indikator (14,81%) berada pada status perlu perhatian khusus. Beberapa indikator dari kategori status tercapai dan akan tercapai yaitu sebagai berikut:

Terkait indikator angka kematian, beberapa indikator telah mencapai target ataupun membaik, seperti indikator 3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup adalah 1,9, menurun dari 2,94 kematian per 1.000 kelahiran hidup pada 2021, indikator 3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup sebanyak 1,33, menurun dari 1,79 pada tahun 2020, dan indikator 3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup adalah 1,64, menurun cukup signifikan dari 2,54 pada 2020.

Berkenaan dengan indikator vaksinasi anak, penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, tergambarkan dalam progres membaik maupun tercapai pada indikator 3.2.2.(b)# Persentase Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) adalah 100% yang telah mencapai target RAD, indikator 3.3.1.(a)# Penatalaksanaan Penyakit HIV-AIDS adalah 105,16% telah mencapai target tercantum dalam RAD walau terjadi sedikit penurunan dari 118,74% pada tahun 2020, indikator 3.3.3*# *Annual Parasite Incidence* (API) Kasus Malaria Indigenous Sama

Dengan 0 (Nol) selama lima tahun kebelakang, indikator 3.3.4.(a)# Cakupan Deteksi Dini Hepatitis B bagi Ibu Hamil adalah 62,25% meningkat dari 60% di tahun 2020, dan indikator 3.4.2.(a) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa sebanyak 6 kotamadya/kabupaten, atau telah seluruhnya di Provinsi DKI Jakarta.

Sementara beberapa indikator yang memerlukan perhatian khusus adalah indikator 3.1.1* angka kematian ibu (AKI) yang berada pada angka 76,49 per 100.000 kelahiran hidup, meningkat 6,4 dari 70,09 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2022, indikator 3.1.2*# persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar sebesar 99,5%, menurun dari tahun sebelumnya yang telah mencapai 100%, serta indikator 3.b.1.(a). persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas yang menurun menjadi 98,36% ketika tahun 2020 telah berhasil mencapai 99,89%.

Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

Pada Tujuan 4 terdapat 60% atau 6 indikator yang berada pada kategori status tercapai dan akan tercapai dan 4 (40%) indikator berada pada kategori perlu perhatian khusus. Untuk indikator-indikator yang terkait dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) yang berada pada kategori status tercapai dan akan tercapai, 4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat, 102,22 telah melebihi target 95,18 yang tercantum pada RAD, 4.1.1.(f) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat sebesar 101,89 dari target 84,16 di RAD, 4.1.1.(f)# Persentase Angka Partisipasi Kasar Jenjang SMA/SMK/MA 101,89 telah melampaui target RAD sebesar 96,24.

Indikator lainnya yang berada pada status tercapai dan akan tercapai adalah 4.1.1.(g) rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun selama 11,20 tahun yang meningkat dari pencapaian tahun 2020 sebesar 11,17 tahun, kemudian indikator 4.4.1* proporsi remaja dan



dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mencapai 98,37% untuk usia 15-24 tahun, telah meningkat dari 88,08% pada pencapaian tahun 2020. Begitu juga pada indikator 4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni telah melampaui target RAD untuk jenjang pendidikan SD/MI/ sederajat sebesar 100,77%, melebihi target 55,56%, SMP/MTs/ sederajat 94,14%, dari target 52,5%, dan SMA/SMK/MA/ sederajat yang telah mencapai 97,66% dari target 31,38%.

Terdapat tiga indikator yang membutuhkan perhatian khusus untuk Tujuan 4, seperti 4.1.1.(c)# persentase sekolah terakreditasi A menurun sedikit menjadi 72,18% dari 72,19% pada tahun 2020 dan masih cukup jauh dari target 92,51%, 4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar 36,68% menurun dari 39,44% pada tahun 2020, dan 4.c.1* persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SMLB bersertifikat pendidik yang menjadi 40,24% ketika tren sebelumnya telah mencapai 47,14%.

Tujuan 5 Kesetaraan Gender

Ketersediaan data capaian indikator tahun 2021 pada Tujuan 5 adalah sebanyak 12 indikator dengan 83,33% atau 10 indikator berada pada kategori status tercapai dan akan tercapai sementara 2 indikator berada pada kategori perlu perhatian khusus.

Terkait upaya mengakhiri bentuk diskriminasi perempuan dimanapun, indikator 5.1.1*Jumlah kebijakan yang responsif gender terdapat jumlah kebijakan yang sama dengan tahun sebelumnya di Provinsi DKI Jakarta, yaitu 7 Peraturan Daerah; 13 Peraturan Gubernur; 1 Keputusan Gubernur; dan 2 Instruksi Gubernur.

Dalam pencapaian penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, 5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan

atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir dilaporkan menurun, dari 1,4 dari 10.000 perempuan dan anak pada tahun 2020 atau menjadi 0,75 dari 10.000 perempuan dan anak pada tahun 2021. Indikator persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2021 tetap konsisten mencapai 100% seperti tahun-tahun sebelumnya.

Namun demikian, terkait isu perkawinan anak, masih terdapat kompleksitas dalam penyelesaian isu selama pandemi COVID-19, tercermin dalam indikator 5.3.1* proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun adalah sebesar 4,68% masih jauh dari target RAD untuk 0 (*zero goal*) dan meningkat tajam dari 1,45% pada tahun 2020, indikator 5.3.1.(b) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate/ ASFR*) dilaporkan sebesar 23,2 per 1.000 perempuan, masih perlu upaya untuk menekan angka menjadi 21 seperti dalam target RAD.

Sementara itu, selama 2021 ditemukan tren positif untuk indikator terkait penjaminan partisipasi penuh dan efektif untuk perempuan di DKI Jakarta. Indikator 5.5.1* proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah, dan pemerintah daerah adalah 21,7% sama dengan tahun sebelumnya mengikuti masa jabatan parlemen daerah, dan indikator 5.5.2*proporsi perempuan yang berada di posisi managerial 46,10% meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 34,19%.

Upaya Pemerintah Provinsi Daerah DKI Jakarta terkait upaya penjaminan kesehatan seksual dan reproduksi menunjukkan perbaikan, terefleksikan dalam indikator 5.6.1.(a) *Unmet need* KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/ KB yang tidak terpenuhi) telah mengalami penurunan menjadi 9,85%, menurun dari 2019 yang masih sebesar 14,11%. Kemudian indikator 5.6.1.(b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern telah mencapai 59,4%, meningkat

tajam dari hanya 19,8% pada tahun 2019.

Tujuan 6 Akses Air Bersih dan Sanitasi

Pada isu akses air bersih dan sanitasi dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tingkat daerah khususnya Jakarta, terdapat 19 indikator yang dijadikan proksi. Dari 19 indikator tersebut, data yang tersedia hanya ada 17 indikator. Dalam upaya untuk mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua, proksi dari 3 indikator yang ada 1 indikator menunjukkan perbaikan dan 2 indikator diantaranya sudah tercapai. Pada indikator 6.1.1.(b)# Persentase Waduk Yang Memenuhi Baku Mutu Untuk Air Baku sudah tercapai yakni sebesar 7,41% begitu juga indikator 6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan sudah mencapai 99,86%. Kemudian pada indikator 6.1.1.(a)# cakupan pelayanan air bersih mengalami perbaikan dari 64,24 persen menjadi 65,3 pada tahun 2021.

Kemudian terkait akses terhadap sanitasi dan kebersihan dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka Terdapat 6 proksi indikator yang mewakilinya, 3 indikator tercapai yakni 6.2.1.(a)# Jumlah kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan indikator 6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sudah mencapai 267 kelurahan begitu juga pada indikator 6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan sudah mencapai 95,17 persen. Kemudian 3 indikator lagi menunjukkan perbaikan yakni indikator 6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang *Open Defecation Free* (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) sebanyak 34 kelurahan dari sebelumnya 27 kelurahan di tahun 2020. Sedangkan pada indikator 6.2.1.(e)# Cakupan pelayanan air limbah dan 6.2.1.(f)# Persentase Cakupan Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah terjadi kenaikan dari 17,75 persen menjadi 18,19 persen.

Kendati 3 indikator ini membaik namun capaian ini masih membutuhkan perhatian khusus karena masih jauh dari target yang ingin dicapai.

Lalu terkait upaya peningkatan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global, 2 indikator tercapai, 1 indikator membaik dan 1 indikator tidak dimiliki datanya. Pada indikator 6.3.1.(a) Jumlah kota/kabupaten yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) sudah mencapai 6 kota dan indikator 6.3.2.(a)# Persentase Waduk Yang Memenuhi Baku Mutu Untuk Air Baku sebesar 7,41 persen. Kemudian pada indikator 6.3.1.(b)# Cakupan Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah sudah menunjukkan perbaikan dari 17,25 persen menjadi 18,19 persen dan pada indikator 6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku belum ada data yang tersedia.

Kemudian terkait upaya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air terefleksi dalam 2 indikator, yakni indikator 6.4.1.(a)# Jumlah bangunan gedung yang mematuhi peraturan pencatatan dan pengambilan air tanah sebesar 99,31 persen dan indikator 6.4.1.(b) Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri sudah terpenuhi dalam peraturan Pasal 38 Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pemungutan Pajak Air Tanah, ayat (1) Terhadap kelebihan volume pemakaian per bulan dari luas/debit.

Lalu untuk menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui



kerjasama lintas batas yang tepat terepresentasikan dari terpenuhinya indikator 6.5.1.(a) Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan indikator 6.5.1.(c) Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk. Sedangkan dalam upaya melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau, hal ini diproksikan dalam indikator 6.6.1.(a) Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya dalam peningkatan kualitas waduk di beberapa wilayah yang sudah dilakukan dan 1 indikator lagi belum tersedia datanya, yakni indikator 6.6.1.(b) Jumlah danau yang pendangkalanannya kurang dari 1%.

Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

Di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19, Provinsi Jakarta masih mempertahankan komitmennya dalam menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua lapisan masyarakat pada tahun 2030. Pencapaian indikator keterjangkauan energi di Jakarta tercermin dari rasio elektrifikasi (indikator 7.1.1*) yang telah mencapai 100% sejak tahun 2018 dan terus terjaga pada tahun 2021. Sementara itu sejalan dengan tren pemulihan ekonomi Jakarta, terjadi peningkatan konsumsi listrik per kapita di Jakarta (indikator 7.1.1.(a)) dari 3.021 kWh pada tahun 2020 menjadi 3.307 kWh pada tahun 2021. Namun demikian, pencapaian tersebut masih di bawah target RAD tahun 2021 sebesar 3.767 kWh. Sedangkan, proporsi bauran energi baru terbarukan (indikator 7.2.1*) di Jakarta mengalami penurunan dari 0,12% pada tahun 2020 menjadi 0,04% pada akhir 2021.

Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2021, perekonomian Jakarta mulai menunjukkan tren pemulihan ditandai dengan

pertumbuhan PDRB (indikator 8.1.1*#) sebesar 3,56% setelah tahun sebelumnya sempat berkontraksi hingga 2,39%. Bangkitnya perekonomian Jakarta juga menjadi parameter pulihnya ekonomi Indonesia mengingat kontribusi ekonomi Jakarta terhadap PDB nasional merupakan yang terbesar mencapai 17,6% dalam lima tahun terakhir. Di samping itu, kinerja perekonomian Jakarta juga tercermin dari rata-rata pertumbuhan PDRB sebesar 5,98% dalam lima tahun terakhir, di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional 5,03%. Potret tersebut memperlihatkan bahwa Jakarta masih menjadi tumpuan perekonomian nasional.

Sementara itu, laju pertumbuhan PDRB per kapita (indikator 8.1.1*) pada tahun 2021 tercatat masih negatif yaitu -2,38%. Sedangkan, PDRB per kapita (indikator 8.1.1(a)) di Jakarta mulai meningkat dari Rp262,7 juta pada tahun 2020 menjadi Rp274,7 juta pada tahun 2021. Selain itu, tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang bekerja per tahun (indikator 8.2.1*) juga mengalami peningkatan dari 1,7% pada tahun 2020 menjadi 1,86% pada tahun 2021.

Seiring pemulihan ekonomi Jakarta sepanjang tahun 2021 maka beberapa indikator pada tujuan 7 juga turut mengalami perbaikan. Perbaikan aktivitas ekonomi berdampak positif terhadap penyerapan lapangan kerja di Jakarta dimana terdapat pengurangan 133 ribu orang pengangguran dalam setahun terakhir sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (indikator 8.5.2*) mengalami penurunan dari 10,95% per Agustus 2020 menjadi 8,50% per Agustus 2021. Meskipun TPT di Jakarta sudah mulai menurun, tetapi realisasi tahun 2021 masih lebih tinggi dibandingkan target RAD tahun 2021 yaitu 4,90%.

Sementara itu, persentase setengah pengangguran (indikator 8.5.2(a)) di Jakarta masih mengalami kenaikan dari 21,82% pada tahun 2020 menjadi 23,11% pada tahun 2021. jauh lebih tinggi dibandingkan target RAD tahun 2021 sebesar 16,14%. Begitupun dengan persentase

tenaga kerja formal (indikator 8.3.1.(a)) sedikit mengalami penurunan dari 61,78% pada tahun 2020 menjadi 61,74% pada tahun 2021, di bawah target RAD tahun 2021 sebesar 70%. Indikator berikutnya yaitu upah rata-rata per jam pekerja (indikator 8.5.1*) mengalami peningkatan dari Rp23.620 pada tahun 2020 menjadi Rp30.662 pada tahun 2021. Selanjutnya indikator yang perlu perhatian khusus yaitu persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) (indikator 8.6.1*) meningkat dari 19,97% pada tahun 2020 menjadi 20,47% pada tahun 2021.

Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi pekerja dapat dikatakan berhasil tercermin dari pencapaian indikator 8.8.1(a)#, yakni jumlah perusahaan yang menjalankan norma K-3 pada tahun 2021 sebanyak 2.233 perusahaan, di atas target RAD tahun 2021 sebanyak 1.380 perusahaan. Meskipun pencapaian tersebut berada di atas target RAD, namun terjadi tren penurunan jumlah perusahaan yang menjalankan norma K-3 dalam tiga tahun terakhir yaitu dari 3.155 perusahaan (2019), 2.843 perusahaan (2020) dan 2.233 perusahaan (2021).

Perbaikan ekonomi Jakarta juga terefleksi dari pemulihan di sektor pariwisata dimana proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB (indikator 8.9.1*) DKI Jakarta mengalami peningkatan dari 4,13% pada tahun 2020 menjadi 4,37% pada tahun 2021. Kemudian jumlah wisatawan mancanegara (indikator 8.9.1(a)) yang mengunjungi DKI Jakarta juga sudah berangsur naik dari 39.324 orang pada tahun 2020 menjadi 122.299 orang sepanjang tahun 2021. Dampak pandemi Covid-19 memang masih menjadi hambatan utama rendahnya kunjungan wisatawan mancanegara dibandingkan target dalam RAD tahun 2021 sebesar 3,24 juta orang. Sementara itu jumlah kunjungan wisatawan nusantara (indikator 8.9.1(b)) mengalami penurunan dari 6,14 juta orang pada tahun 2020 menjadi 5,49 juta orang pada tahun 2021. Jumlah devisa sektor

pariwisata (indikator 8.9.1.(c)) mencatatkan kenaikan dari Rp 2,6 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp3,11 triliun pada tahun 2021. Membaiknya sektor pariwisata tersebut berdampak positif terhadap kenaikan jumlah pekerja pada industri pariwisata di Jakarta (indikator 8.9.2*) dari 188.938 orang pada tahun 2020 menjadi 406.174 orang pada tahun 2021. Begitupun dengan persentase SDM Industri Pariwisata bersertifikat (indikator 8.9.2*#) mengalami kenaikan dari 78,10% pada tahun 2020 menjadi 88% pada tahun 2021.

Berikutnya indikator 8.10.1*, yaitu jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 jumlah orang dewasa di Jakarta tercatat menurun dari 6,29% pada tahun 2020 menjadi 5,56% pada tahun 2021. Sementara rata-rata jarak lembaga keuangan (indikator 8.10.1(a)) di Jakarta tercatat naik dari 0,77 Km pada tahun 2020 menjadi 1,45 Km pada tahun 2021. Sementara itu proporsi kredit UMKM terhadap total kredit (indikator 8.10.1.(b)) di Jakarta mengalami penurunan dari 5,13% pada tahun 2020 menjadi 4,74% pada tahun 2021.

Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur

Momentum pemulihan ekonomi Jakarta turut membawa dampak positif terhadap kinerja industri manufaktur sepanjang tahun 2021. Pertumbuhan PDRB industri manufaktur (indikator 9.2.1(a)) di Jakarta mengalami perbaikan dari -10,34% pada tahun 2020 menjadi 11,01% pada tahun 2021. Membaiknya kinerja industri manufaktur di Jakarta sangat penting karena kontribusinya yang signifikan terhadap PDRB Jakarta (indikator 9.2.1*) mencapai 12,28% pada tahun 2021, meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 11,39%. Pemulihan pada industri manufaktur berdampak terhadap kenaikan proporsi tenaga kerja di industri manufaktur (indikator 9.2.2*) dari 11,01% pada tahun 2020 menjadi 11,47% pada tahun 2021. Kemudian proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit (indikator 9.3.2*) juga mengalami peningkatan dari 1,56% pada tahun 2020 menjadi 3,15% pada tahun 2021.



Sementara itu komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menciptakan iklim investasi terus dilakukan dengan berbagai kebijakan yang inovatif dan dukungan infrastruktur yang berkualitas. Tersedianya infrastruktur yang memadai di Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat dari persentase kondisi jalan mantap (indikator 9.1.1.(a)#) sebesar 96,77% pada tahun 2021. Lalu jumlah dermaga penyeberangan (indikator 9.1.2.(b)) sebanyak 11 unit sampai akhir tahun 2021. Begitupun dengan jumlah terminal angkutan perairan (pelabuhan) yang memenuhi standar pelayanan prima (indikator 9.1.2.(b)#) sebanyak 1 unit. Selain itu, proporsi individu yang menggunakan Internet di Jakarta (indikator 9.c.1.(b)) meningkat dari 77,61% pada tahun 2020 menjadi 85,55% pada tahun 2021.

Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

Upaya menurunkan tingkat ketimpangan di Provinsi DKI Jakarta masih menghadapi tantangan dampak pandemi Covid-19. Tingkat ketimpangan yang diukur dengan koefisien gini (indikator 10.1.1) tercatat naik dari 0,399 pada tahun 2020 menjadi 0,411 pada tahun 2021. Sementara itu, tingkat kemiskinan (indikator 10.1.1.(a)#) mulai turun dari 4,69% per September 2020 menjadi 4,67% pada September 2021. Sementara itu, indikator 10.3.1 (a)# indeks demokrasi mencapai nilai 89,21 pada tahun 2020 dan indikator 10.3.1 (a) indeks kebebasan sipil sebesar 93,27. Untuk indikator 10.4.1 (b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan cakupannya mencapai 112,04% untuk pekerja formal.

Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Pada isu kota dan pemukiman yang berkelanjutan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tingkat daerah khususnya Jakarta, terdapat 16 indikator yang dijadikan proksi. Dari 16 indikator tersebut, data yang tersedia hanya ada 14 indikator. Dalam upaya menjamin akses

terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh hal ini terepresentasikan dalam indikator 11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau yakni sebesar 40 persen yang mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, namun capaian hal ini masih jauh dari target.

Kemudian terkait penyediaan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang disabilitas dan orang tua. Pada indikator 11.2.1.(a) Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan terindikasi mengalami perbaikan dari 8,2 persen pada tahun 2020 menjadi 14,76 persen di tahun 2021. Adapun dari sisi indikator 11.2.1.(b) Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar sudah tercapai di Jakarta dengan adanya moda transportasi KRL, MRT dan LRT.

Kemudian terkait dengan urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi terefleksikan dalam indikator 11.3.2.(a) Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan namun data khusus terkait hal ini belum ada. Sedangkan dalam upaya mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia terefleksikan pada indikator 11.4.1.(a) Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil sudah tercapai, Kawasan Cagar Budaya di 4 lokasi (Kawasan Menteng, Kota Tua, Kebayoran Baru, Pulau Onrust).

Turunan dalam Tujuan 11 juga termasuk upaya mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap

PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan. Hal ini terepresentasi dari indikator 11.5.1*# Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah yang membaik dari 5,9 menjadi 6,72 begitu juga indikator 11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) membaik dari 67,04 menjadi 60,43 pada tahun 2021. Pada indikator 11.5.1.(b) Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk sudah terpenuhi yakni sebanyak 6 kota begitu juga dengan indikator 11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan yang sudah mencapai target yakni sebanyak 24 sistem. Sedangkan indikator 11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana, hasil estimasi menunjukkan bahwa jumlahnya berkurang dibandingkan tahun 2020.

Kemudian dalam upaya mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, yang mencakup kualitas udara, dan penanganan sampah kota, terdapat proksi indikator yang menunjukkan pencapaian, yakni indikator 11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani yang sudah mencapai 75,15%, kemudian indikator 11.6.1.(a)# Persentase penurunan volume sampah di kota yang sudah mencapai 24 persen dan indikator 11.6.1.(b) Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan *green waste* di kawasan perkotaan metropolitan yang sudah mencapai 6 kota.

Pada Tujuan 11 juga mencakup menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang disabilitas. Hal ini terepresentasikan dalam indikator 11.7.1.(a) Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang yakni sebesar 5,1 persen. Namun proksi indikator 11.7.2.(a) Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi belum ada data yang tersedia.

Lalu terkait dengan peningkatan jumlah kota dan

permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana termasuk juga pengembangan dan pengimplementasian penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan *The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015- 2030*, sudah memenuhi target berdasarkan dari indikator 11.b.1* Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana yang sudah mencapai 100 persen dan indikator 11.b.2* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah yang terdiri dari Peraturan Gubernur No. 143 Tahun 2015 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2014 - 2019 dan Peraturan Gubernur No. 131 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Pada isu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tingkat daerah khususnya Jakarta, terdapat 7 indikator yang dijadikan proksi. Dari 7 indikator tersebut, data yang tersedia hanya ada 4 indikator. Dalam upaya melaksanakan the *10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns*, upaya ini terefleksikan dalam indikator 12.1.1* Jumlah kolaborasi tematik *quick wins* program yang terdapat 3 kolaborasi yakni Bangunan Ramah Lingkungan (*Green Building*) dan Pengelolaan Limbah dan Sampah (*Waste Management*) di Jakarta. Selain itu dari sisi upaya pengelolaan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya dan pengurangan pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan terdapat beberapa indikator yang digunakan yakni dari sisi indikator 12.4.1.(a) Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU

sudah mencapai 60 perusahaan hal ini lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Begitu juga indikator 12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) terpantai membaik yakni sebanyak 2,6 juta ton.

Kemudian dari segi pengurangan produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali juga sudah mencapai target yang terefleksi dari indikator 12.5.1.(a) # Persentase penurunan volume sampah di kota yakni sebesar 24 persen. Sedangkan beberapa data untuk proksi dari keterlibatan perusahaan besar untuk mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan yang ada dalam indikator 12.6.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 dan indikator 12.7.1.(a) Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister saat ini data resminya belum tersedia. Begitu juga untuk akses informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam untuk masyarakat yang terepresentasi dalam indikator 12.8.1.(a) Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister juga belum tersedia datanya.

Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

Pada isu penanganan perubahan iklim dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tingkat daerah khususnya Jakarta, terdapat 4 indikator yang dijadikan proksi. Terkait upaya memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam terepresentasikan dalam indikator 13.1.1* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah yang sudah dipenuhi di Jakarta dalam Peraturan Gubernur No. 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim juga Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Kontijensi Penanggulangan Bencana Banjir di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021. Begitu juga dalam indikator 13.1.2*#

Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah mengalami perbaikan dari 5,9 menjadi 6,72 pada 2021. Pada salah satu target dalam tujuan 13 berupaya mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional, di Jakarta sendiri dokumen ini sudah dimiliki, sehingga indikator 13.2.1* Dokumen *Biennial Update Report* (BUR) Indonesia dan indikator 13.2.1.(a) Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sudah terpenuhi. Hal ini sudah termanifestasikan dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim.

Tujuan 14 Ekosistem Lautan

Pada isu ekosistem laut dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tingkat daerah khususnya Jakarta, terdapat 9 indikator yang dijadikan proksi. Namun terdapat 1 indikator yang tidak memiliki data. Dalam isu upaya mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif terepresentasikan dalam indikator 14.2.1.(a) Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional, regulasi di Jakarta terkait hal ini terdiri dari: Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah; Keputusan Gubernur Nomor 601 Tahun 2019 tentang Lokasi Daerah Perlindungan Laut sebagai Kawasan Konservasi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 13 Tahun 2014 Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Reklamasi dan Pemanfaatan Ruang di Perairan Laut Pantai Utara Jakarta), Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 28 Tahun 2021, RZWP3K menjadi Materi

Teknis Perairan Pesisir dimana muatan teknisnya sudah mendapat Persetujuan Teknis dari Menteri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 25 Februari 2022 dan sekarang dalam Proses Integrasi dengan Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta. Begitu juga pada indikator 14.2.1.(b) Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan, Provinsi DKI Jakarta termasuk di dalam WPP 712 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Kemudian untuk terkait isu untuk secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktik penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya yang sebetulnya dapat terepresentasikan dari indikator 14.4.1* proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman, saat ini data tersebut belum tersedia di Jakarta. Terkait upaya melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia saat ini sudah tercapai. Hal ini terefleksikan dalam indikator 14.5.1* Jumlah luas kawasan konservasi perairan 656,02 Ha dan indikator 14.5.1*# Luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitasi sebesar 196,02 Ha. Dalam upaya melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan

ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada *the World Trade Organization*, hal ini terepresentasikan dalam indikator 14.6.1.(a) Persentase kepatuhan pelaku usaha sebesar 70,93%.

Kemudian terkait penyediaan akses untuk nelayan skala kecil (*small-scale artisanal fishers*) terhadap sumber daya laut dan pasar terepresentasikan dalam beberapa indikator diantaranya indikator 14.b.1* Ketersediaan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil yang sudah tertuang dalam Peraturan Daerah No. 13 Tahun 1997 tentang Usaha Perikanan dan Peraturan Gubernur No. 159 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Begitu juga indikator 14.b.1.(a) Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan sudah tercapai yakni meliputi Kabupaten Kepulauan Seribu dan Kota Jakarta Utara. Sedangkan untuk indikator 14.b.1.(b) Jumlah nelayan yang terlindung terdapat beberapa data terkait. Untuk nelayan Kepulauan Seribu ada sebanyak 2.024, nelayan Jakarta Utara sebanyak 25.903 dan nelayan dengan kartu penduduk DKI Jakarta sebanyak 3.271 dan nelayan pendatang sebanyak 22.632 orang.

Dalam upaya meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional, yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, yang terefleksikan dalam indikator 14.c.1* Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (*the United Nations Convention on the Law of the Sea*). Kerangka kebijakan tersebut termanifestasikan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang dan Wilayah; Keputusan Gubernur Nomor 601 Tahun 2019 tentang Lokasi Daerah Perlindungan Laut sebagai Kawasan Konservasi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 13 Tahun 2014 Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Reklamasi dan Pemanfaatan Ruang di Perairan Laut Pantai Utara Jakarta).

Tujuan 15 Ekosistem Daratan

Pada isu ekosistem daratan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tingkat daerah khususnya Jakarta, terdapat 12 indikator yang dijadikan proksi. Dari 12 indikator tersebut, data yang tersedia hanya ada 6 indikator pada tahun 2021. Dalam upaya menjamin pelestarian, restorasi, dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat hal ini terefleksikan dari indikator 15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan sebesar 4,19 persen.

Kemudian untuk terkait peningkatan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global terdapat beberapa proksi yang dirumuskan dalam Rencana Aksi Daerah. Namun untuk proksi-proksi tersebut belum ada data tersedia untuk indikator 15.2.1.(a) Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya, indikator 15.2.1.(b) Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem, indikator 15.2.1.(c) Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70% dan indikator 15.2.1.(d) Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan. Begitu juga terkait upaya untuk menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis agar bebas dari lahan terdegradasi sebetulnya dapat terefleksikan dalam indikator 15.3.1.(a) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan datanya belum kita miliki namun data tersebut belum tersedia.

Kemudian dalam upaya melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan melindungi juga mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah terefleksikan dalam indikator 15.5.1*# Penambahan jumlah fauna yang dikonservasi terdapat 2.298 fauna. Kemudian juga dalam melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal terefleksikan dalam indikator 15.7.1.(a) Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi, di tahun 2021 tidak ada kasus terkait yang dilaporkan dan juga indikator terkait lainnya yakni indikator 15.7.1.(b)#1 Penambahan jumlah flora yang dikonservasi sebanyak 64.893 yang sudah mencapai target. Indikator 15.7.1.(a) ini juga merefleksikan capaian dalam upaya meningkatkan dukungan dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan.

Kemudian dalam upaya mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan. Pada tingkat daerah, hal bentuk upaya ini sudah terakomodir dari indikator 15.9.1.(a) terkait dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati yang termanifestasikan dalam Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi DKI Jakarta telah dibuat pada tahun 2018.

Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Di tahun 2021, pencapaian indikator-indikator terkait tata kelola pemerintah terus membaik. Untuk indikator 16.6.1 (a) Persentase peningkatan Opini Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), Provinsi DKI Jakarta berhasil meraih predikat WTP pada tahun 2021, sesuai dengan target RAD. Kemudian, indikator 16.6.1 (b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil mendapat predikat A. Sementara itu, indikator 16.6.2 (a) Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik, Provinsi DKI Jakarta masih tergolong dalam zona hijau dengan nilai 88,73% (Ombudsman RI, 2021). Lebih lanjut, indikator 16.6.1 (d) Indeks Reformasi Birokrasi tercatat mendapat nilai 78,8. Meski demikian, pencapaian ketiga indikator tersebut tercatat masih berada di bawah target RAD.

Indikator-indikator mengenai layanan kependudukan juga mengalami perbaikan di tahun 2021. Pada indikator 16.9.1 Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil, Provinsi DKI Jakarta berhasil meluaskan hingga mencapai angka 98,87%. Pencapaian tersebut telah melampaui angka target RAD sebesar 82,9%. Kemudian, indikator 16.9.1 (b) persentase anak yang memiliki akte kelahiran, tercatat mencapai 98,72%. Bahkan pada indikator 16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur, Provinsi DKI Jakarta telah mencapai 99,59%. Artinya hampir seluruh anak di bawah 5 tahun telah tercatat.

Sementara itu, beberapa Indikator menunjukkan pencapaian pada tahun 2020, di antaranya indikator 16.1.1 (a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir yang tercatat mencapai target dengan 32 kasus di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kemudian, indikator 16.1.3 (a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir juga mencapai target dengan angka 0,07. Hal sama terjadi pada Indikator 16.3.1 (a) Proporsi korban kekerasan

dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi yang mencatat kenaikan signifikan melampaui target, yakni sebesar 73,26% dari target 55,65%.

Pencapaian lain dicatatkan indikator 16.7.2 Indeks Demokrasi. Pada tahun 2020, Provinsi DKI Jakarta kembali menyandang predikat provinsi paling demokratis di Indonesia dengan nilai 89,21. Dari ketiga aspek yang diukur, lembaga demokrasi mendapat nilai 90,86, hak-hak politik sebesar 84,95 dan kebebasan sipil 93,27. Aspek kebebasan sipil mendapat angka tertinggi.

Di balik berbagai pencapaian tersebut, beberapa aspek seperti keamanan dan kesetaraan gender masih memerlukan perhatian khusus. Indikator 16.1.2 (a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk mendapatkan nilai 0,08 pada tahun 2021. Selanjutnya, indikator 16.7.1 (b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) berada di angka 20%. Untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, indikator 16.2.1 (b) prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak berada di angka 1297 kasus sepanjang tahun 2020. Kemudian indikator 16.1.4 Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya pada tahun 2020 sebesar 41,17%, meleset dari target RAD di angka 51,50%.

Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Pemulihan ekonomi sepanjang Semester II - 2021 berdampak positif terhadap kinerja fiskal Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta tercatat bahwa realisasi penerimaan pajak daerah (indikator 17.1.1*(1)) per 31 Desember 2021 mencapai Rp 34,51 triliun, tumbuh 175,69% dibandingkan realisasi per 30 Juni 2021 yang sebesar Rp12,52 triliun. Selain itu, realisasi penerimaan retribusi daerah (indikator 17.1.1*(2)) per 31 Desember 2021 menyentuh angka Rp383,43

miliar, bertambah 92,2% dibandingkan realisasi per 30 Juni 2021 yang mencapai Rp199,49 miliar.

Sementara itu dari sisi belanja, realisasi belanja daerah (indikator 17.1.1.*(2.2)) hingga 31 Desember 2021 telah mencapai Rp61,35 triliun atau tumbuh 169,6% dibandingkan realisasi per 30 Juni 2021 sebesar Rp25,08 triliun. Dengan capaian penerimaan pajak dan belanja daerah tersebut maka total pendapatan daerah sebagai proporsi terhadap belanja daerah (indikator 17.1.1*#(3)) per 31 Desember 2021 mencapai 106,93% . Adapun rasio penerimaan pajak daerah terhadap PDRB DKI Jakarta (indikator 17.1.1.(a)#) per 31 Desember 2021 mencapai 1,19%. Sedangkan proporsi APBD yang didanai oleh pajak daerah (indikator 17.1.2*#) per 31 Desember 2021 mencapai 56,25%.

Tabel 2.1

Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2021

Keterangan	Realisasi 30 Juni 2021	Realisasi 31 Desember 2021	Pertumbuhan (%)
Jumlah Penerimaan Pajak Daerah (Rp triliun)	12,52	34,51	175,69
Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah (Rp miliar)	199,49	383,43	92,20
Jumlah Pendapatan Daerah (Rp triliun)	25,08	65,60	161,58
Jumlah Belanja Daerah (Rp triliun)	22,76	61,35	169,60
Total Pendapatan Daerah sebagai Proporsi terhadap Belanja Daerah (%)	110,21	106,93	
Rasio penerimaan pajak daerah terhadap PDRB (%)	0,43	1,19	
Proporsi APBD yang didanai oleh Pajak Daerah (%)	40,31	44,52	

Sumber: BPKD DKI Jakarta, 2021



Bab III



Maju Kotanya, Bahagia Warganya



III TINJAUAN STATUS PENCAPAIAN TPB/SDGs

Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Keadaan dan Kecenderungan

Pengukuran BPS pada bulan Maret 2021 menunjukkan kenaikan tingkat kemiskinan di DKI Jakarta dengan kenaikan yang mulai melandai dibandingkan pada kenaikan tahun sebelumnya. Pada September 2021 pengukuran tingkat kemiskinan mengalami penurunan. Indikator 1.2.1* persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur, menunjukkan kecenderungan sebagai berikut:

Profil penurunan tingkat kemiskinan tidak hanya dialami oleh Provinsi DKI Jakarta melainkan juga di Indonesia. Tren Jika dibandingkan posisi DKI Jakarta dengan kondisi tingkat kemiskinan Indonesia secara nasional, dapat dilihat dari gambar 3.2 di halaman sebaliknya.

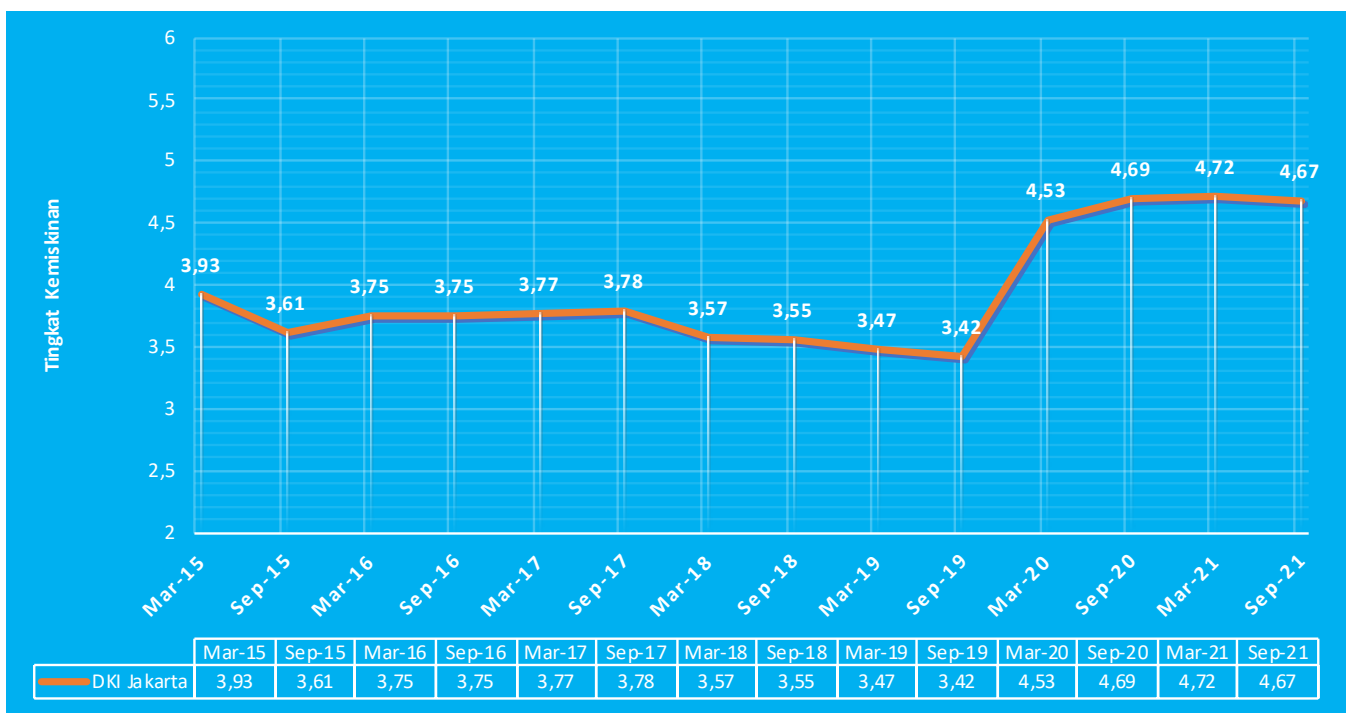
Tampak dalam gambar 3.2 bahwa profil tingkat kemiskinan DKI Jakarta dan Indonesia pada September 2021 sama-sama mengalami penurunan walaupun grafik kemiskinan secara DKI Jakarta lebih landai dibandingkan dengan grafik kenaikan secara nasional.

Adapun jika melihat sebaran profil tingkat kemiskinan pada level kota/ kabupaten yang ada di DKI Jakarta, tampak bahwa tingkat kemiskinan belum tersebar secara merata. Tabel 3.3 menunjukkan kondisi tingkat kemiskinan kota dan kabupaten yang ada di Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2011 hingga 2021.

Sebagaimana tampak pada grafik tersebut, relatif kenaikan kemiskinan pada Maret 2021 memiliki potret yang sama untuk kota dan kabupaten yang ada di Provinsi DKI Jakarta, di mana tahun 2021 ini kenaikannya lebih melandai daripada kenaikan di tahun 2020.

Gambar 3.1

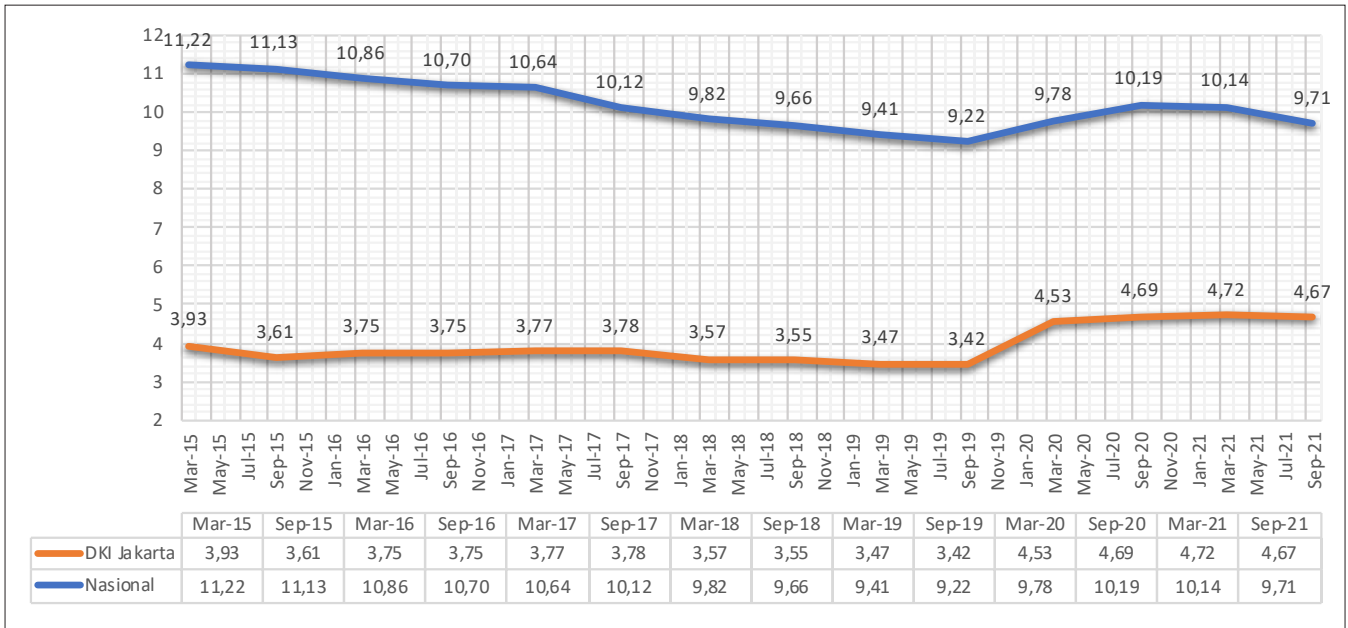
Perkembangan Kemiskinan DKI Jakarta Tahun 2015-2021 (sumber: BPS)



Sumber: Diolah dari BPS, 2021

Gambar 3.2

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta dan Indonesia Tahun 2016 – 2021



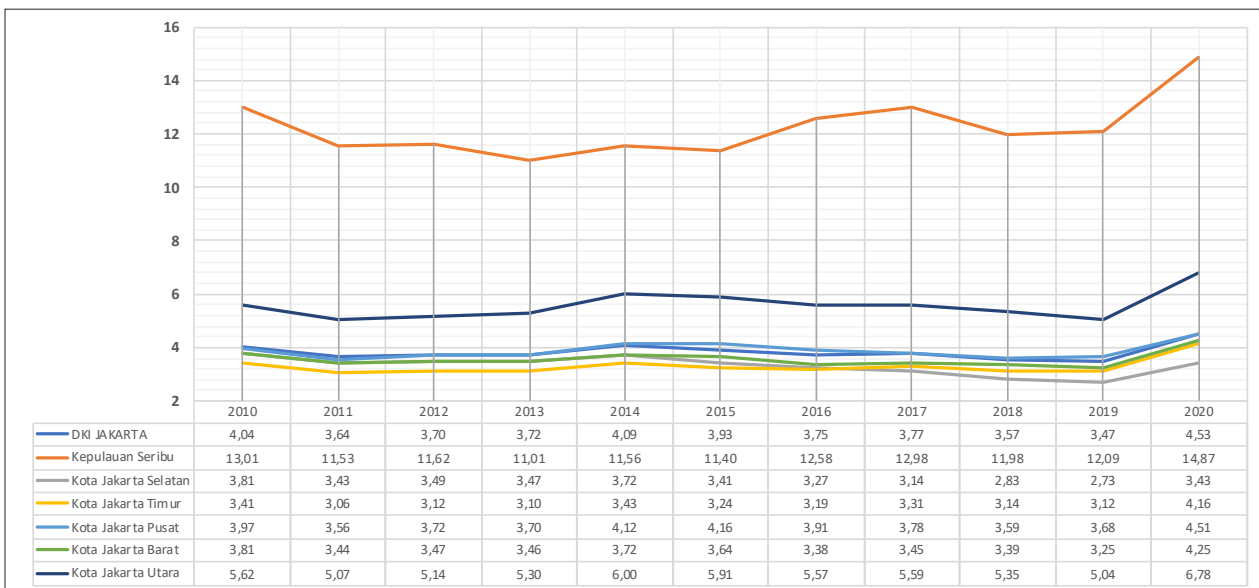
Sumber: BPS, 2021

Jika dibandingkan antara kota dan kabupaten dengan periode yang sama (Maret 2020 dan Maret 2021), pada tahun 2021 Kota Jakarta Barat memiliki kenaikan paling kecil yaitu 0,06 persen poin, sementara Kota Jakarta Utara memiliki kenaikan kemiskinan paling besar yaitu 0,46 persen poin. Sementara pada tahun sebelumnya (Maret 2020) kenaikan tingkat kemiskinan paling kecil ada pada

Kota Jakarta Selatan dengan kenaikan 0,7 persen poin dan kenaikan paling tinggi ada pada Kepulauan Seribu dengan 2,78 persen poin. Artinya, pemulihan atas tingkat kemiskinan secara signifikan terjadi di Kota Jakarta Timur yang pada saat Maret 2020 mengalami peningkatan tingkat kemiskinan 33% kemudian di Maret memiliki kenaikan sebesar 3% dari periode sebelumnya.

Gambar 3.3

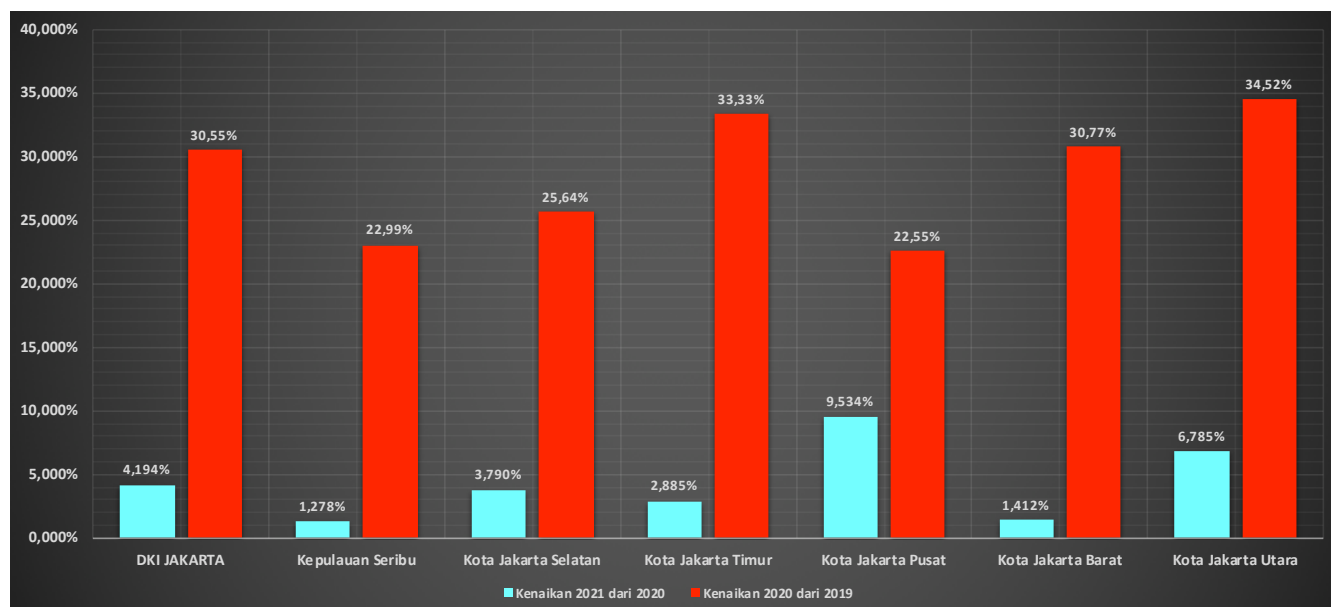
Tingkat Kemiskinan Kota dan Kabupaten Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 – 2021



Sumber: BPS, 2021

Gambar 3.4

Kenaikan Tingkat Kemiskinan



Sumber: BPS, 2021

Tantangan dan Pembelajaran

Pada tahun 2021 tantangan yang dihadapi oleh tujuan 1, Tanpa Kemiskinan, adalah mengenai kemajuan (*progress*) yang dihadapi dalam penanggulangan pandemi Covid-19 yang telah berlangsung tahun kedua. Kemajuan ini diperlukan dalam rangka pemulihan berbagai aspek kehidupan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta termasuk dalam penanggulangan kemiskinan. Pada tahun 2021 upaya pemulihan ini sempat terganggu dengan terjadinya gelombang kedua yang dipicu munculnya varian baru: varian Delta. Pembatasan kegiatan masyarakat diberlakukan untuk mencegah semakin tidak terbandungnya penyebaran Covid-19. Hal ini membuat masyarakat kembali tidak leluasa dalam mencari nafkah, khususnya bagi pekerja informal. Selain itu semakin banyaknya masyarakat lapisan bawah yang mendapatkan penyakit Covid-19 juga menambah beban bagi diri dan keluarganya. Terjadi potensi penambahan kelompok miskin dan rentan baru yaitu kelompok anak-anak yang kedua orang tuanya meninggal atau keluarga yang pencari nafkah utamanya meninggal karena Covid-19.

Dari sisi anggaran, penyelenggaraan program atau kegiatan TPB/SDGs baik oleh pemerintah dan nonpemerintah masih mengalami mengalami *refocusing*. Perkiraan di tahun 2020 bahwa pandemi akan mereda dan pada semester I-2021 akan dimulai perbaikan pada berbagai sektor yang dapat menggerakkan kembali pertumbuhan ekonomi menjadi kurang optimal karena menganasnya penyebaran varian Delta di DKI Jakarta. Angka kemiskinan yang meningkat pada tahun 2020 dan paruh pertama tahun 2021 menjadi salah satu tantangan bagi berbagai pihak. Upaya kolaborasi menjadi semakin intens dan baik dilakukan oleh pemerintah dan nonpemerintah. Ketika pada paruh kedua tahun 2021 terjadi perbaikan angka kemiskinan yang mulai meningkat, maka upaya yang dilakukan secara kolaboratif telah membuahkan hasil dan memberikan sebuah pembelajaran bagi upaya pencapaian indikator TPB/SDGs.

Kebijakan dan Strategi

Program dan kegiatan Pemprov DKI Jakarta untuk menanggulangi kemiskinan di tengah tantangan anggaran yang berkurang tetap diselenggarakan sepanjang tahun

2021. Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan pemerintah pusat menyalurkan berbagai bantuan sosial guna mengurangi dampak pandemi Covid-19. Bantuan tersebut adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako / Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Pemprov DKI Jakarta juga memiliki bantuan lain yang bersumber dari APBD dalam bentuk bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) bagi anak sekolah dan mahasiswa, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) bagi disabilitas, Kartu Lansia Jakarta (KLJ) bagi lansia, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan APBD. Khusus bagi warga Jabodetabek yang semula menerima bantuan sembako, mulai tahun 2021 tidak akan lagi menerima bantuan yang sama dan diganti dengan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Dalam melakukan penyaluran BST, Pemprov DKI mengatur mekanisme sebagai berikut:

- Terdaftar sebagai penerima bantuan sosial sembako hasil pembaruan dan pemedanan data Disdukcapil Prov. DKI Jakarta
- Tidak termasuk penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan/atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
- Dana BST akan langsung dikirimkan ke rekening penerima BST
- BST dengan nilai Rp300.000,00/bulan atau Rp600.000,00/keluarga secara total
- Dana BST dapat ditarik secara tunai melalui ATM dan dapat dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan dasar

Kolaborasi antar sektoral pada pemerintahan juga dilakukan pada bagaimana saling melakukan kampanye atas program dan kegiatan OPD lainnya melalui media sosial. Tentunya hal ini akan mendorong bagaimana program dan kegiatan pemerintah dapat lebih tersosialisasi untuk mendapatkan dampak yang lebih optimal. Selain itu kolaborasi juga dilakukan pada perolehan dan pemanfaatan data terpadu kesejahteraan

sosial serta data-data Carik Jakarta sebagai dasar pengambilan keputusan dalam kegiatan serta memberikan profil kelompok miskin-rentan secara lebih lengkap.

Penyempurnaan data penerima bantuan sosial juga secara terus-menerus dilakukan bekerja sama dengan beberapa unsur seperti Kementerian Sosial, Bareskrim Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, Kemenko PMK, Bappenas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta perwakilan dari Bantuan Sembako Pangan (BSP) dan Program Keluarga Harapan. Walaupun demikian, akan tetap terjadi perubahan dalam data karena sifat data kependudukan yang sangat dinamis. Unsur subjektivitas berpotensi muncul dalam keterlibatan masyarakat saat melakukan pemutakhiran data sehingga peningkatan partisipasi dan pemahaman masyarakat atas akurasi data harus dioptimalkan ke depannya.

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Dari poin yang telah dijelaskan, memperkuat data penerima bantuan sosial, meningkatkan kualitas yang diberikan dalam bantuan sosial, dan menggalakan beberapa inisiatif dari pihak pemerintah dan nonpemerintah merupakan upaya prioritas. Terkait data, dengan upaya Carik Jakarta, pendataan yang reliabel akan berguna dalam menyasar pihak serta kelompok yang selama ini masih *left behind* atau tertinggal, terutama keluarga yang kehilangan pekerjaan karena terdampak COVID-19. Kemudian kualitas bantuan sosial yang diberikan perlu dipastikan benar sudah berdasarkan kebutuhan dari penerima manfaat sehingga efektif memenuhi kebutuhan dasar, misal kebutuhan perempuan dan anak, serta mekanisme penyaluran yang perlu ditingkatkan. Selain itu, inisiatif dari berbagai pihak seperti *crowdfunding* dan kolaborasi dengan nonpemerintah turut membantu mengembalikan situasi seperti sebelum terjadinya pandemi dan kembali mendorong percepatan pencapaian TPB/SDGs Tujuan 1.

Tabel 3.1

Tingkat Kemiskinan Kota dan Kabupaten Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 – 2021

Kode	Indikator	Satuan	Pencapaian pada tahun dasar	Realisasi			
				2018	2019	2020	2021 (semester 1)
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	%	27,5 (tahun 2013)	17,7	11	5,9	9,2
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	%	NA	18	6,9	6,5	4,49

Sumber data: Dinas Kesehatan

Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Keadaan dan Kecenderungan

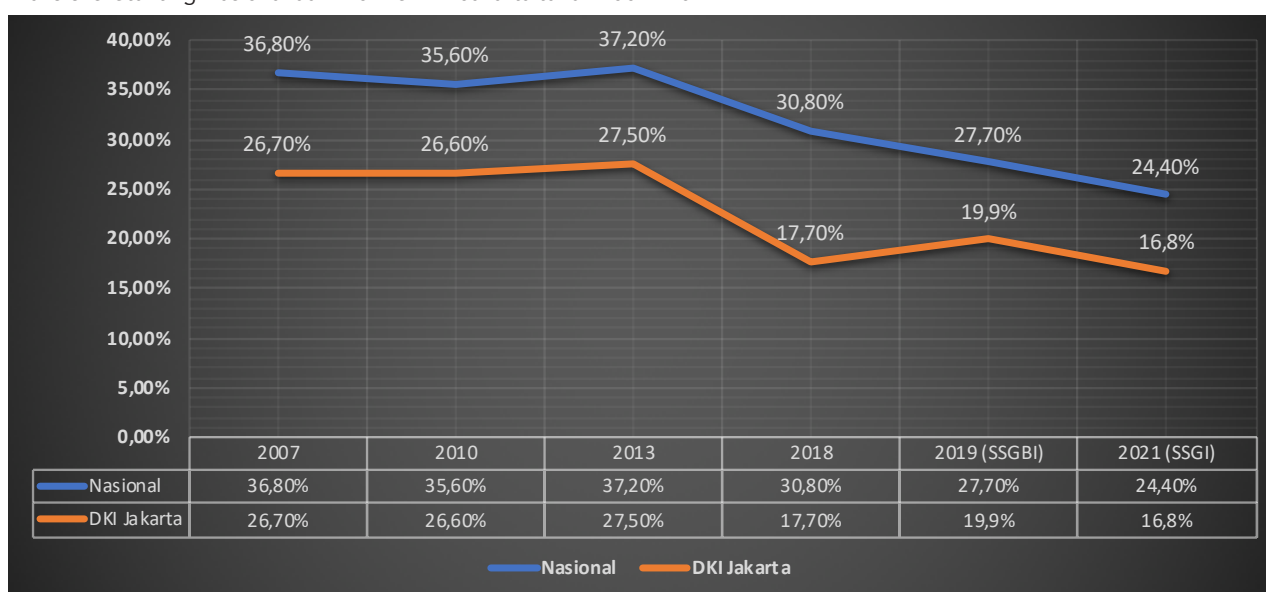
Kecenderungan pada tujuan 2 pada tahun 2021 menunjukkan perbaikan pada berbagai capaian indikator TPB/SDGs, termasuk pada indikator 2.1.1* prevalensi stunting. Terdapat 2 pengukuran yang dilakukan dan disajikan dalam laporan ini. Pertama adalah hasil dari pengukuran yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, dan kedua adalah laporan dari Studi Status Gizi Indonesia.

Sementara dengan menggunakan data dari Kemenkes melalui SSGI, juga tampak kecenderungan yang menurun sejak tahun 2007.

Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dirilis pada Desember 2021, prevalensi *stunting* di Provinsi DKI Jakarta pada anak balita menunjukkan angka 16,8%, membaik dari angka di tahun 2019 yaitu 19,9%. Dalam kajian tersebut, selain *stunting*, tantangan pada status gizi balita di Provinsi DKI Jakarta adalah balita kurus (*wasted*) dan *overweight*. Di mana

Gambar 3.5

Prevalensi Stunting Nasional dan Provinsi DKI Jakarta tahun 2007 - 2021



Sumber data: Dinas Kesehatan

pada prevalensi balita *wasted* adalah 6,9% sementara *overweight* berada di angka 5,5%. Kondisi ini membuat Provinsi DKI Jakarta dikategorikan dalam kategori akut, karena memiliki angka *stunting* < 20% dan *wasted* lebih sama dengan 5%.

Secara nasional, prestasi DKI Jakarta dalam menanggulangi stunting bagi anak bawah lima tahun juga tampak dalam gambar 3.5 berikut. Terlihat kurva provinsi DKI Jakarta turun secara signifikan selama 13 tahun terakhir. Diharapkan dengan kondisi angka stunting yang terus menurun, DKI Jakarta akan dapat memiliki generasi yang unggul di masa depan, terutama saat menjelang 100 tahun Indonesia merdeka.

Jika dibandingkan dengan nasional, grafik capaian DKI Jakarta lebih baik dalam menunjukkan penurunan.

Pada laporan ini juga dilakukan koreksi capaian indikator 2.2.2.(c) pada bagian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) berdasarkan dokumen yang lebih mutakhir. PPH adalah salah satu indikator yang digunakan dalam menilai kualitas konsumsi pangan, bagaimana proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok untuk memenuhi kebutuhan gizi dengan mempertimbangkan aspek daya terima. Untuk tahun 2019, di mana sebelumnya PPH dilaporkan berada pada angka 88,3 diubah menjadi 88,2. Sementara untuk tahun 2020 yang sebelumnya dilaporkan 88,6 menjadi 86,3. Turunnya angka PPH yang didapat menyatakan bahwa keragaman pangan yang dikonsumsi serta tingkat gizi semakin rendah dibanding tahun sebelumnya.

Untuk indikator 2.2.2.(c) pada bagian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) terdapat perubahan angka dari apa yang telah dilaporkan pada laporan sebelumnya. Untuk tahun 2019, di mana sebelumnya dilaporkan telah mencapai angka 88,3 menjadi adalah 88,2. Sementara untuk tahun 2020 yang sebelumnya dilaporkan 88,6 menjadi 86,3.

Tantangan dan Pembelajaran

Adanya pandemi Covid-19 membuat meningkatnya pengangguran dan menurun drastisnya pendapatan

sebagian warga DKI Jakarta termasuk para pekerja harian. Pergerakan manusia juga sangat dibatasi sebagai upaya memutus penyebaran penyakit ini. Situasi tersebut berpotensi mempengaruhi bagaimana pemenuhan kualitas pangan dan asupan gizi serta layanan kesehatan bagi remaja putri, ibu hamil, serta anak-anak bawah dua tahun capaian. Kondisi ini merupakan tantangan bagi pencapaian indikator di tujuan 2. Walaupun pada beberapa indikator untuk melihat bagaimana pengaruh pandemi terhadap tingkat stunting di Jakarta baru akan diketahui pada tahun-tahun berikutnya. Sebagai contoh indikator stunting, untuk mengetahui bagaimana pengaruh pandemic Covid-19, baru akan tampak di tahun-tahun berikutnya mengingat stunting sangat dipengaruhi oleh kondisi 1000 Hari Pertama Kehidupan.

Di sisi yang lain pandemi Covid-19 membawa pembelajaran agar warga DKI Jakarta mulai melakukan penguatan atas ketahanan pangan bagi masing-masing keluarganya. Meningkatnya pengangguran dan menurun drastisnya pendapatan sebagian warga DKI Jakarta termasuk para pekerja harian mendorong banyak warga DKI Jakarta melakukan *aquaponic* dan *urban farming* baik dilakukan untuk menyediakan pangan maupun sebagai kegemaran.

Kebijakan dan Strategi

Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai strategi baik terkait dengan pengelolaan data, melakukan inovasi dan menginisiasi kolaborasi, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun nonpemerintah, dalam menjaga capaian indikator-indikator tujuan 2 termasuk yang terdampak atas pandemi Covid-19 yang telah memasuki tahun kedua. Inisiasi KSBB adalah salah satu contoh yang mengintegrasikan strategi baik terkait dengan pengelolaan data, melakukan inovasi dan menginisiasi kolaborasi.

Kolaborasi yang diinisiasi Pemprov DKI Jakarta telah mendorong berbagai pihak untuk menjaga warga DKI Jakarta tetap memiliki ketahanan pangan dalam kondisi

pandemi Covid-19 ini. Seluruh kontribusi warga ataupun kolaborator yang diberikan sebagai bantuan pangan akan diterima. Bahkan donatur atau kolaborator dapat memilih sasaran untuk memastikan tersalurkannya bantuan tersebut.

Selain itu, untuk menjaga kemampuan dalam memenuhi pangan warga DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan Bantuan Sosial Percepatan Penanganan Covid-19. Pada masyarakat sendiri intensitas melakukan aktivitas *urban farming* sebagai upaya untuk menjaga kemampuan pangan juga semakin baik pada tahun 2021 ini. Permintaan benih untuk melakukan *urban farming* melonjak selama tiga bulan penerapan PSBB. Titik-titik lokasi *urban farming* juga bertambah.

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangi dampak akibat pandemi Covid-19 pada Tujuan 2 adalah memperluas inisiatif kolaborasi yang

diinisiasi oleh berbagai nonpemerintah terutama ketika *second wave* melalui bantuan sosial, yang diharapkan dapat tetap memenuhi kebutuhan pangan anak, seperti dalam program Kartu Anak Jakarta.

Selain itu, isu stunting bersamaan dengan prioritas nasional semakin digaungkan oleh berbagai OPD dan bekerjasama dengan berbagai nonpemerintah untuk mengurangi prevalensi, seperti pemberian penambah darah untuk ibu hamil dan langkah preventif melalui inisiasi informasi mengenai gizi kedalam kurikulum sekolah.

Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Keadaan dan Kecenderungan

Salah satu indikator yang perlu mendapatkan perhatian khusus pada tahun 2021 ini adalah Angka Kematian Ibu (AKI) atau indikator 3.1.1*. Pada tahun 2021 terdapat kecenderungan kenaikan AKI setelah pada tahun sebelumnya menunjukkan kecenderungan penurunan.

Gambar 3.6

Angka Kematian Ibu 2018-2021 Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Dinas Kesehatan

Tampak dalam grafik tersebut bahwa dalam 100.000 kelahiran hidup terdapat 76,49 kematian ibu yang melahirkan, meningkat sekitar 21 kematian dari tahun sebelumnya.

Tantangan dan Pembelajaran

Saat terjadi pandemi Covid-19, tujuan 3 termasuk tujuan dalam TPB/SDGs yang terdampak paling berat karena DKI Jakarta menjadi episentrum penyebaran Covid-19. Selain berkurangnya anggaran pemerintah, alokasi anggaran pun diprioritaskan bagi penanganan pandemic Covid-19 baik dari sisi kesehatan maupun aspek lainnya. Maka dari itu, bagaimana memberikan layanan kesehatan optimal kepada masyarakat dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan upaya mencapai target indikator tujuan 3 di masa pandemi ini adalah tantangan bagi para pemangku kepentingan di DKI Jakarta. Kondisi-kondisi seperti efisiensi anggaran, pembatasan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan, pengurangan kegiatan pengumpulan orang, mendorong pada pelaksanaan strategi inovasi dan kolaborasi yang berbasis data terintegrasi dan *real-time*.

Pembelajaran yang dapat diambil dari terjadinya pandemi Covid-19 ini adalah menggunakan pendekatan dalam pendekatan perilaku dalam penanganan pandemi, bagaimana menciptakan manusia-manusia DKI Jakarta yang lebih berdaya dan optimal dalam memfungsikan dirinya baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Dengan demikian, perilaku untuk menjaga dirinya dan orang lain menjadi sebuah *insight* yang muncul dari diri sendiri.

Pembelajaran lainnya adalah dengan memasukkan sebuah indikator yang mengakomodir penyakit baru atau penyakit yang penularannya berpotensi menimbulkan pandemi dan mendisrupsi tatanan masyarakat yang telah terbangun. Penyakit pernapasan menular yang disebabkan oleh virus Corona seperti MERS, SARS, dan saat ini Covid-19 tidak secara spesifik menjadi indikator di dalam TPB/SDGs.

Kebijakan dan Strategi

Munculnya Covid-19 mempercepat upaya-upaya dari berbagai pihak untuk memperkuat kapasitas sistem kesehatan, ketersediaan sumber daya bidang kesehatan yang memadai dan semakin kuatnya partisipasi warga. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memutus mata rantai Covid-19. Pihak nonpemerintah pun turut serta memfokuskan upayanya untuk memutus penyebaran Covid-19, seperti yang ditunjukkan oleh para kolaborator pada *platform* Kolaborasi Sosial Berskala Besar yang dikelola oleh *Jakarta Development Collaboration Network*.

Inovasi diperlukan pertama dari pembiayaan kesehatan. Bagaimana sumber-sumber pembiayaan alternatif termasuk dari dunia usaha dan filantropi dapat berperan serta dalam menjaga capaian tujuan 3 yang pada sebagiannya telah tercapai di tahun-tahun sebelumnya, namun akibat adanya pandemi Covid-19 ini berpotensi dapat terganggu pencapaiannya. Salah satu strategi terhadap hal ini telah diinisiasi oleh program KSBB Pemprov DKI Jakarta.

Kedua, adalah bagaimana upaya inovatif untuk membentuk perilaku masyarakat agar dapat selaras dengan upaya mencapai target indikator tujuan 3. Contohnya seperti dalam meningkatkan kesadaran agar masyarakat meningkatkan kualitas perilakunya agar lebih waspada atas penularan Covid-19. Kolaborasi dari berbagai pihak sebagai strategi menjaga capaian indikator pada tujuan 3 juga telah berlangsung di mana-mana, mulai dari skala kecil hingga skala besar.

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Selama 2021, Indonesia dan tentunya DKI Jakarta kembali mengalami pukulan akibat gelombang Delta yang menyebabkan kembali melambatnya aktivitas dan penerapan kembali kebijakan PPKM. Walau demikian, penanggulangan pandemi terus dilakukan melalui upaya vaksinasi dosis 1 dan 2 Covid-19 untuk menjangkau lebih



banyak masyarakat. Penguatan sistem *testing, tracing, dan treatment* melalui Puskesmas dan kerjasama dengan berbagai nonpemerintah seperti swasta dan filantropi untuk penyelenggaraan vaksin, serta pendaftaran melalui platform JAKI turut mempermudah masyarakat mengakses vaksin.

Selain itu, kolaborasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta selama 2021 juga turut berhasil mempublikasi *booklet* panduan gaya hidup sehat (#NasihatSehat) serta buku putih (*white paper*) yang diharapkan menjadi rujukan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk melakukan upaya promotif dan preventif dalam penyelenggaraan kesehatan dan mempercepat pencapaian Tujuan 3 TPB/SDGs.

Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

Keadaan dan Kecenderungan

Berikut keadaan dan kecenderungan APK seluruh jenjang pendidikan di Provinsi DKI Jakarta. Terdapat penurunan APK untuk seluruh jenjang pendidikan pada tahun 2021.

Tantangan dan Pembelajaran

Dalam rangka mencegah penularan COVID-19 di lingkungan sekolah, sejak 16 Maret 2020 Pemprov DKI Jakarta menutup sekolah dan melakukan kegiatan

pembelajaran di rumah sesuai dengan Surat Edaran Disdik Pemprov DKI Jakarta No. 26 Tahun 2021.

Penyelenggaraan sekolah dilakukan secara pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk sementara waktu.

Selain faktor murid, para guru dan sekolah juga belum sepenuhnya siap menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh, sehingga pembelajaran belum efektif sebagaimana pembelajaran tatap muka. Aspek kesiapan ini baik dari penguasaan teknis PJJ maupun dalam pemberian materi ajar yang masih merujuk pada kurikulum yang belum disesuaikan dengan kondisi PJJ. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas pendidikan di masa pandemi.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa PJJ yang berlangsung terlalu lama berpotensi memberi dampak negatif pada siswa. Salah satunya anak putus sekolah karena bekerja membantu perekonomian keluarga. Selain itu terkendalanya tumbuh kembang anak, baik dari kognitif maupun dari perkembangan karakter serta perkembangan psikososial dan juga kekerasan-kekerasan dalam rumah tangga.

Sebuah studi mengenai tingkat stress pada siswa-siswa sekolah dasar dalam menjalankan proses belajar di rumah selama pandemi COVID-19 bahwa siswa sekolah dasar mengalami stress dengan kelas lebih tinggi mengalami stress yang lebih tinggi.

Tabel 3.2

Angka Partisipasi Kasar (APK) Seluruh Jenjang Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 - 2021

	2017	2018	2019	2020	2021
APK PAUD	66,32	24,9	20,35	20,53	19,02
APK SD/MI/ sederajat	104,97	103,63	105,5	102,94	101,02
APK SMP/MTs/ sederajat	105,4	104,33	104,52	104,98	102,22
APK SMA/MA/ sederajat	103,69	104,03	104,55	104,82	101,89

Sumber: Kemdikbud (Dalam persentase)

Sementara untuk profil persentase guru yang bersertifikat pendidik capaian di tahun 2021 adalah sebesar 40,24 Persentase guru yang bersertifikat pendidik, *Cut Off Data* : 30 Juni 2021, Sumber Data : Dapodik

Tabel 3.3

Persentase guru yang bersertifikat pendidik

Jenjang	Jumlah Guru	Jumlah Guru Bersertifikat Pendidik	%
TK	13.592	2.342	17,23%
SD	38.138	15.653	41,04%
SMP	18.663	9.501	50,91%
SMA	11.072	5.466	49,37%
SMK	11.457	4.350	37,97%
SMLB	1.298	599	46,15%
Total	94.220	37.911	40,24%

Sumber: Dapodik

Kebijakan dan Strategi

PJJ yang terselenggara bagi seluruh murid di DKI Jakarta sebagai solusi pembelajaran pada pandemi COVID-19 dimulai tanpa ada kesiapan penuh dari berbagai pihak: murid, orang tua, guru, dan manajemen sekolah. Kondisi ini menjadi potensi bagi menurunnya kualitas pendidikan di DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta telah melakukan beberapa strategi diantaranya adalah dengan mengatur supaya PJJ bermakna dan menyenangkan. Sesuai dengan Surat Edaran Disdik Nomor 33/SE/2020, PJJ bermakna dan menyenangkan dilakukan di antaranya dengan mengatur agar PJJ tidak memberatkan, pemberian umpan balik lebih secara kualitatif daripada kuantitatif, menghindari tugas di mana anak harus keluar rumah, serta memberikan pembelajaran kontekstual. Selain itu juga memberi dukungan pembelajaran dengan komunitas penggerak pendidikan dan menyediakan 15 program untuk mendukung pembelajaran dari rumah di berbagai daerah bagi seluruh jenjang pendidikan sesuai dengan Siaran Pers Diskominfo Nomor 1123/SP-HMS/03/2020. Untuk meningkatkan akses terhadap internet bagi peserta didik dari keluarga miskin dan rentan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan untuk menambahkan komponen pembelian kuota internet bagi peserta didik

penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini juga tengah mematangkan konsep untuk penerapan Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) untuk sektor pendidikan, menyusul KSBB pada sektor-sektor lainnya. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat ikut mendorong pencapaian target TPB/SDGs, khususnya pada Tujuan 4.

Selain strategi dari pemerintah, pihak nonpemerintah juga menyelenggarakan upaya-upaya bagi kelancaran PJJ dan cakupan agar tidak ada yang terlewat dalam berpartisipasi secara penuh pada proses pendidikan. Penyelenggaraan kelompok belajar kecil dan terbatas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan diselenggarakan oleh sebagian kecil kelompok masyarakat atau dengan gerakan peminjaman fasilitas gawai dan berbagi jaringan internet yang dilakukan oleh warga yang mampu kepada warga yang tidak mampu. Di samping itu juga institusi-institusi pendidikan juga memiliki program edukasi dan konseling kepada murid dan orang tua murid agar tetap dapat melaksanakan PJJ secara optimal.

PJJ yang diselenggarakan selama pandemi masih menjadi tantangan, di mana baik pemerintah maupun nonpemerintah berupaya untuk mengurangi dampak

negatif dari berlangsungnya PJJ secara terus menerus. Beberapa strategi yang dilakukan adalah dengan mengatur supaya PJJ bermakna dan menyenangkan di antaranya dengan mengatur agar PJJ tidak memberatkan, pemberian umpan balik lebih secara kualitatif daripada kuantitatif, menghindari tugas di mana anak harus keluar rumah, serta memberikan pembelajaran kontekstual. Selain itu juga memberi dukungan pembelajaran dengan komunitas penggerak pendidikan dan menyediakan 15 program untuk mendukung pembelajaran dari rumah di berbagai daerah bagi seluruh jenjang pendidikan.

Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTM) Terbatas berlangsung pada semester II tahun 2021 karena kondisi pandemi yang sudah lebih terkendali dan Pemprov DKI Jakarta menerapkan PPKM level 3. Pemprov DKI Jakarta memberlakukan PTM Terbatas tahap 1 yang dimulai pada 30 Agustus 2021 kepada 610 sekolah (jenjang pendidikan PAUD, SD, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA dan sederajat, SLB dan LKP). PTM Terbatas ini diberlakukan sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)^[1] serta Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1026 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 2019.

Diharapkan dengan diselenggarakan PTM Terbatas dapat menjaga mutu pendidikan pada masa pandemi bagi warga Provinsi DKI Jakarta. Penambahan pembukaan sekolah untuk penyelenggaraan PTM Terbatas akan terus dilakukan dengan target pada bulan November 2021 seluruh satuan pendidikan sudah menyelenggarakan PTM Terbatas.

Tantangan lainnya pada tujuan 4 adalah mengenai Pendidikan Anak Usia Dini. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang

dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar dan dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Untuk meningkatkan akses terhadap internet bagi peserta didik dari keluarga miskin dan rentan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan untuk menambahkan komponen pembelian kuota internet bagi peserta didik penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini juga tengah mematangkan konsep untuk penerapan Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) untuk sektor pendidikan yaitu program penyediaan gawai bagi pendidik dan peserta didik. Hal ini turut membantu upaya meningkatkan keterampilan TIK dalam indikator 4.4.1*.

Partisipasi dari pihak nonpemerintah dalam menyelenggarakan upaya-upaya bagi kelancaran PJJ juga giat dilaksanakan. Adanya penyelenggaraan kelompok belajar kecil dan terbatas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan diselenggarakan oleh sebagian kecil kelompok masyarakat. Selain itu muncul juga gerakan peminjaman fasilitas gawai dan berbagi jaringan internet yang dilakukan oleh warga yang mampu kepada warga yang tidak mampu. Para institusi-institusi pendidikan juga memiliki program edukasi dan konseling kepada murid dan orang tua murid agar tetap dapat melaksanakan PJJ secara optimal.

Selain itu, Dinas Pendidikan turut meluncurkan program Sekolah Kolaborasi pada 2021 yang membuka kesempatan kegiatan kolaborasi antar sekolah serta antar Suku Dinas dengan Perguruan Tinggi.

Tujuan 5 Kesetaraan Gender

Keadaan dan Kecenderungan

Berdasarkan profil sebaran kekerasan Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 dari Simfoni Kementerian PPPA (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>) terdapat 1.208 perempuan dan 881 anak yang menjadi korban kekerasan. Untuk tahun 2021 rasio perempuan korban kekerasan terhadap 100.000 perempuan adalah sebesar 23,18% sedangkan rasio anak korban kekerasan terhadap 10.000 anak adalah sebesar 3,04%.

Sementara untuk hasil Catatan Akhir Tahun (CATAHU) yang dirilis pada tanggal 7 Maret 2022 oleh Komnas Perempuan berjudul: Bayang-bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan, tercatat kekerasan yang dilaporkan meningkat pada tahun 2021 dibanding tahun 2020. Pada 2021, jumlah kasus mencapai 338.496, sedangkan pada 2020 tercatat 226.062 kasus. Jumlah ini juga menjadi yang paling tinggi dalam 10 tahun terakhir. Hasil ini mencakup pencatatan nasional dari 34 provinsi dan belum tersedia data agregasi secara provinsi.

Setiap tahun, CATAHU mencatat kekerasan terhadap perempuan dalam tiga ranah yakni:

- Ranah personal/privat: artinya pelaku adalah orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban.
- Ranah publik/ komunitas jika pelaku dan korban tidak memiliki hubungan kekerabatan, darahataupun perkawinan. Bisa jadi pelakunya adalah majikan, tetangga, guru, teman sekerja, tokoh masyarakat, ataupun orang yang tidak dikenal.
- Ranah negara artinya pelaku kekerasan adalah aparaturnya negara dalam kapasitas tugas. Termasuk di dalam kasus di ranah negara adalah ketika pada

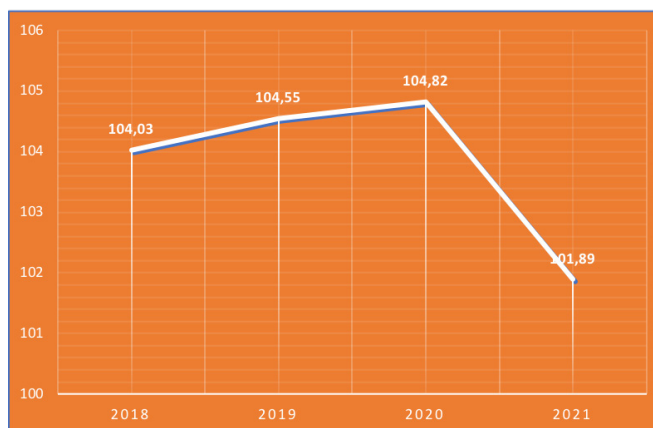
peristiwa kekerasan, aparat negara berada di lokasi kejadian namun tidak berupaya untuk menghentikan atau justru membiarkan tindak kekerasan tersebut berlanjut.

Kebijakan untuk tetap berada di rumah (*stay at home*) sebagai upaya untuk penanggulangan pandemi COVID-19 membuat ruang dan waktu pribadi seseorang yang semula digunakan untuk bekerja, belajar dan bersosialisasi di luar rumah menjadi berkurang atau bahkan hilang. Ditambah dengan kondisi pendapatan yang berkurang atau kehilangan pekerjaan maka jika tidak dikelola dengan baik kondisi ini sangat berpotensi memicu kekerasan kepada anak atau perempuan (pada posisi laporan ini dibuat data capaian indikator 5.2.1.(a)# dan belum tersedia).

Sementara untuk indikator 5.3.1.(c) dan indikator 5.3.1.(c)# mengenai Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat terjadi penurunan angka menjadi 101,89 dari semula 104,82 (2020), melampaui target 84,16.

Gambar 3.7

APK SMA/SMK/MA/Sederajat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2021



Sumber: Dinas Pendidikan

Tantangan dan Pembelajaran

Survei yang dilakukan oleh Komnas Perempuan menemukan bahwa terjadi peningkatan beban pekerjaan

rumah tangga bagi perempuan, sehingga menyebabkan peningkatan tingkat stress. Kejahatan psikologis dan ekonomi mendominasi bentuk kekerasan di dalam rumah tangga, dan hampir 60% menyatakan bahwa terjadi peningkatan kekerasan pada perempuan selama pandemi COVID-19 ini. Hasil survei secara nasional tersebut dapat memberikan indikasi tantangan yang dihadapi oleh Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai target penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta layanan bagi korban.

Selain itu, kebijakan pembatasan sosial berpotensi mempersulit pengungkapan kekerasan yang terjadi di dalam keluarga, dan membatasi jangkauan layanan terhadap korban kekerasan. Kondisi-kondisi ini menambah potensi tidak tercapainya target pada tujuan 5 jika tidak ada upaya atau strategi untuk mengatasinya.

Kebijakan dan Strategi

Salah satu upaya pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk menanggulangi kekerasan kepada perempuan adalah salah satunya dengan Surat Edaran Gubernur Nomor 7/SE/2021 tanggal tentang Pencegahan dan Penanganan Tindakan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja Pemprov DKI Jakarta. Surat Edaran tersebut menyerukan kepada para kepala perangkat daerah/ unit kerja agar melakukan upaya pencegahan terhadap bentuk tindak pelecehan seksual di lingkungan dengan 3 (tiga) ketentuan. Pertama untuk membangun komitmen dalam upaya pencegahan tindakan pelecehan seksual, kedua adalah mewajibkan seluruh pegawai untuk membangun dan memelihara suasana kerja yang aman dari tindakan pelecehan seksual, dan ketiga untuk melakukan internalisasi dan sosialisasi tentang tindakan pelecehan seksual dan upaya pencegahan terjadinya pelecehan seksual di lingkungan kerja.

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Pemprov DKI Jakarta bersama nonpemerintah terus meningkatkan pencegahan kekerasan seksual di transportasi publik, sekolah, dan lingkungan kerja melalui upaya kebijakan, kampanye, dan sosialisasi, serta *platform* pencari layanan inisiasi nonpemerintah seperti carilayanan.com. Peningkatan kualitas penanganan kasus kekerasan terus diupayakan melalui pendampingan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang bekerjasama dengan Unit PPA Polri maupun Polda Metro Jaya.

Selain mengatasi masalah kekerasan seksual, edukasi mengenai kesetaraan gender, kesehatan reproduksi, dan pencegahan perwakinan anak terus diupayakan secara berkala oleh Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan pihak nonpemerintah seperti save The Children, agar hak-hak perempuan, khususnya anak perempuan terpenuhi seperti tercantum dalam Tujuan 5 TPB/SDGs.

Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

Keadaan dan Kecenderungan

Terdapat beberapa *highlight* yang ada dalam tujuan 6 dalam isu air bersih dan sanitasi layak. Salah satunya terkait dengan pencapaian akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. Pada indikator Cakupan pelayanan air bersih terjadi peningkatan dari Semester I ke Semester II dari 64.24% menjadi 65,3% juga indikator 6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan sudah mencapai 99,86%. Kemudian pada indikator 6.1.1.(a)# cakupan pelayanan air bersih mengalami perbaikan dari 64,24 persen menjadi 65,3 pada tahun 2021.

Kemudian terkait akses terhadap sanitasi dan kebersihan dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka 3 indikator tercapai yakni 6.2.1.(a)# Jumlah kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan indikator 6.2.1.(c) Jumlah desa/

kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sudah mencapai 267 kelurahan begitu juga pada indikator 6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan sudah mencapai 95,17 persen. Kemudian 3 indikator lagi menunjukkan perbaikan yakni indikator 6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang *Open Defecation Free* (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) sebanyak 34 kelurahan dari sebelumnya 27 kelurahan di tahun 2020. Sedangkan pada indikator 6.2.1.(e)# Cakupan pelayanan air limbah dan 6.2.1.(f)# Persentase Cakupan Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah terjadi kenaikan dari 17,75 persen menjadi 18,19 persen. Kendati 3 indikator ini membaik namun capaian ini masih membutuhkan perhatian khusus karena masih jauh dari target yang ingin dicapai.

Lalu terkait upaya peningkatan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global. Pada indikator 6.3.1.(a) Jumlah kota/kabupaten yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) sudah mencapai 6 kota dan indikator 6.3.2.(a)# Persentase Waduk Yang Memenuhi Baku Mutu Untuk Air Baku sebesar 7,41 persen. Kemudian pada indikator 6.3.1.(b)# Cakupan Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah sudah menunjukkan perbaikan dari 17,25 persen menjadi 18,19 persen.

Kemudian dari sisi Baku Mutu Untuk Air Baku juga mengalami peningkatan menjadi 7,41% pada tahun 2021 yang terdiri dari 8 waduk yang memenuhi baku mutu untuk air baku yakni Waduk Jagakarsa, Kaja, Kp. Rambutan, Situ Babakan, Wijaya Kusuma, Daan Mogot, Grogol, Kp. Rambutan. Perbaikan lain juga terlihat dalam indikator Jumlah bangunan gedung yang mematuhi peraturan pencatatan dan pengambilan air tanah naik dari

90,54% di tahun 2020 menjadi 99,31% di tahun 2021.

Kemudian terkait upaya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air terefleksi dalam 2 indikator, yakni indikator 6.4.1.(a)# Jumlah bangunan gedung yang mematuhi peraturan pencatatan dan pengambilan air tanah sebesar 99,31 persen dan indikator 6.4.1.(b) Insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri sudah terpenuhi dalam peraturan Pasal 38 Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pemungutan Pajak Air Tanah, ayat (1) Terhadap kelebihan volume pemakaian per bulan dari luas/debit.

Lalu untuk menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat terepresentasikan dari terpenuhinya indikator 6.5.1.(a) Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan indikator 6.5.1.(c) Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk. Sedangkan dalam upaya melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau, hal ini diprosikan dalam indikator 6.6.1.(a) Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya dalam peningkatan kualitas waduk di beberapa wilayah yang sudah dilakukan.

Tantangan dan Pembelajaran

Isu air bersih dan sanitasi menjadi tantangan tersendiri bagi DKI Jakarta dengan kota padat penduduk dan tingkat penggunaan air yang masih relatif tinggi. Untuk itu penggunaan air yang masif perlu ditekan lagi. Juga perlu dilakukan pemerataan akses air bersih ke seluruh wilayah di DKI Jakarta. Begitu juga dari sisi tata kelola air yang kurang baik juga dapat memicu laju penurunan tanah yang lebih cepat dan signifikan, hal ini berkonsekuensi juga terhadap kemungkinan terjadinya

bencana banjir. Kemudian dari sisi cakupan layanan air limbah juga di Jakarta masih di bawah 20 persen untuk itu Pembangunan Jakarta Sewerage System (JSS) Pengolahan Limbah Jakarta sangat penting untuk meningkatkan *coverage ratio* layanan air limbah.

Kebijakan dan Strategi

Beberapa upaya pemenuhan hak akses air bagi warga sudah diupayakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, misalnya dengan melakukan subsidi di area pelayanan yang ditargetkan untuk memenuhi hak rakyat atas tersedianya air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau di DKI Jakarta yang dilakukan oleh PAM JAYA. Misalnya saja subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Masyarakat di Kepulauan Seribu yang diharapkan dapat meningkatkan jangkauan penyediaan dan pelayanan air minum. DSDA juga membangun IPA (Instalasi Pengelolaan Air) berteknologi SWRO (*Sea Water Reverse Osmosis*) di 8 pulau berpenduduk dari 11 Pulau di Kepulauan Seribu.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah mensinergikan program pelayanan air, dengan membangun instalasi pengolahan air, pembangunan waduk sebagai sumber air baku, Pengadaan IPA Mobile, juga menyediakan mobil tangki dan kios air. Upaya ini dilakukan dengan melibatkan BUMD bidang air, yakni PAM Jaya dan PAL Jaya, dan juga Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Pengelolaan air bersih difokuskan pada 1 bidang yang mengintegrasikan pengelolaan air bersih permukaan dan air tanah.

Pemerintah juga menargetkan untuk segera merampungkan proyek 942-DV (9 Polder, 4 Waduk, 2 peningkatan kapasitas Kali–Drainase Vertikal) untuk mengendalikan banjir, juga dapat menjadi tambahan sumber air baku di DKI Jakarta. Pemerintah juga telah meresmikan Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) Mookervart yang mampu mengubah polutan organik dan amonia dengan bantuan organisme sehingga air baku akan diolah melalui proses ultrafiltration air lalu untuk

sisia polutan lainnya dilakukan dengan menggunakan teknologi *Reverse Osmosis* (RO). SPAM ini diestimasikan mampu melayani 9.700 pelanggan. Selain itu juga dilakukan pembangunan SPALD (Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik) skala pemukiman untuk meningkatkan kualitas air pada waduk juga untuk optimalisasi pelayanan pengolahan air limbah domestik salah satunya melalui program Hibah Air Limbah.

Dalam upaya penyediaan air bersih bagi masyarakat perkotaan, terdapat beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, diantaranya dengan melakukan penambahan pasokan air bersih melalui pembangunan SPAM Jatiluhur dan SPAM Karian, telah dilakukan pula revitalisasi 4 waduk/situ sebagai sumber air baku untuk air bersih dan melaksanakan pembangunan instalasi pengolahan air bersih dengan total kapasitas minimal 14,5 liter/detik. Pemerintah DKI Jakarta juga melakukan beberapa upaya dalam hal penyediaan akses sanitasi /pengelolaan air limbah bagi masyarakat perkotaan diantaranya melalui Sistem Pengolahan Air Limbah Terpadu Skala Perkotaan, Jakarta Sewerage System (JSS) pada 15 Zona dengan berfokus pada pembangunan di Zona 1, Zona 6, Zona 2, Zona 5, dan Zona 8. Juga diupayakan dibangun sistem pengolahan air limbah setempat pada 30 lokasi.

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Pada dasarnya Tujuan 6 meliputi isu pemenuhan akses air ke seluruh warga, penjaminan kualitas air, melakukan efisiensi dalam penggunaan air serta menjaga keseluruhan ekosistem terkait untuk memastikan keberlanjutannya. Pencapaian tujuan ini salah satunya dapat dikatalisasi dengan melakukan konservasi air, efisiensi penggunaan energi, dan juga penyempurnaan infrastruktur yang memadai. Mengingat pemakaian air tanah yang masih tinggi untuk itu saat ini kampanye penghematan air terus digalakkan begitu juga transisi agar warga bisa beralih memakai layanan perpipaan yang tersedia. Dalam upaya tersebut sudah diupayakan untuk membangun infrastruktur perpipaan dan perbaikan pipa yang bocor.

Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

Keadaan dan Kecenderungan

Seiring tren penurunan kasus Covid-19 sepanjang tahun 2021, aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat berangsur menggeliat kembali. Sebelumnya pada tahun 2020 konsumsi listrik di Jakarta sempat mengalami penurunan hingga 7,22% dari 3.256 kWh pada tahun 2019 menjadi 3.021 pada tahun 2020. Namun, seiring pertumbuhan positif ekonomi Jakarta kini konsumsi listrik di Jakarta pada tahun 2021 sudah mulai menunjukkan peningkatan baik yang berasal dari golongan rumah tangga maupun pelanggan di sektor bisnis dan industri. Dengan berangsur pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat tersebut, konsumsi listrik per kapita (indikator 7.1.1.(a)) tahun 2021 tumbuh 9,5% menjadi 3.307 kWh. Meskipun demikian, realisasi tahun 2021 ini masih di bawah target RAD tahun 2021 sebesar 3.767 kWh.

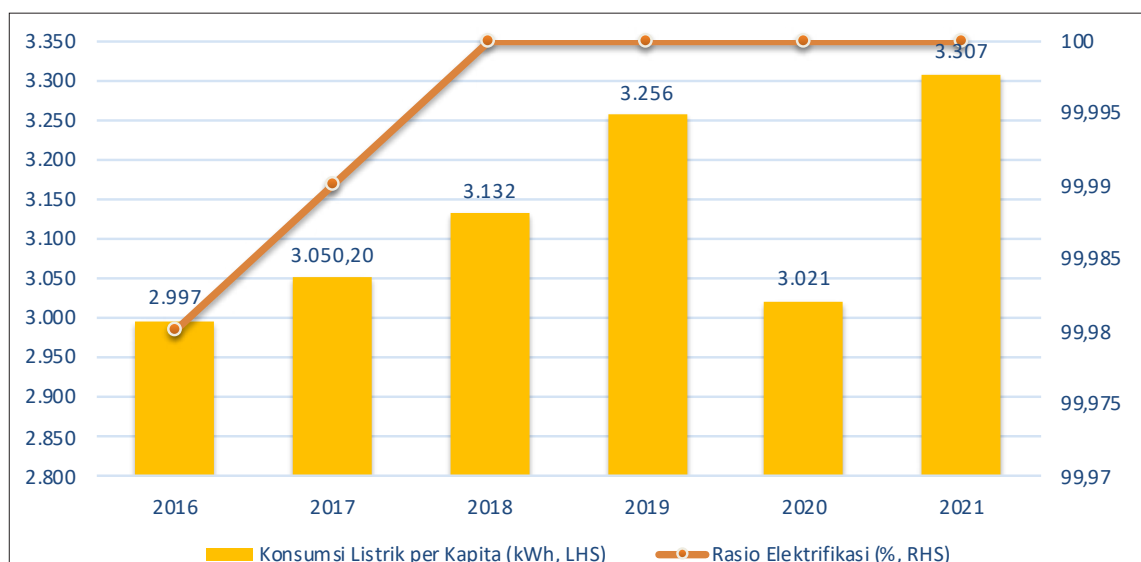
penurunan proporsi bauran energi baru terbarukan dari 0,12% pada tahun 2020 menjadi 0,04% pada tahun 2021.

Tantangan dan Pembelajaran

Penurunan kasus Covid-19 di DKI Jakarta pada semester II - 2021 dan pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat, konsumsi listrik di Jakarta pun mulai berangsur meningkat dibandingkan kondisi pada semester I - 2021 ketika diterapkan kebijakan PPKM Level 4. Penerapan PPKM Level 4 pada semester I - 2021 telah berpengaruh besar pada penurunan penjualan listrik karena konsumsi listrik yang minim pada sektor bisnis dan perkantoran yang memberlakukan sistem kerja dari rumah (*work from home/WFH*). Selain itu, toko ritel, pusat perbelanjaan, dan restoran yang dibatasi jam operasionalnya saat pemberlakuan PPKM Level 4 juga berdampak terhadap penurunan konsumsi listrik harian di Jakarta.

Gambar 3.8

Rasio Elektrifikasi dan Konsumsi Listrik per Kapita Provinsi DKI Jakarta



Sumber: PLN dan DPE (diolah)

Sementara itu komitmen Provinsi Jakarta dalam menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern tercermin dari rasio elektrifikasi yang sudah mencapai 100% sejak tahun 2018. Sedangkan upaya mendorong bauran energi baru terbarukan di Jakarta masih menghadapi tantangan karena terjadi sedikit

Menurut data dari PLN Unit Induk Distribusi (UID) Disjaya, konsumsi listrik di Jakarta pada periode PPKM Level 4 turun 13%. Namun sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Jakarta yang positif pada semester II - 2021, volume kWh listrik yang terjual di Jakarta pada triwulan IV - 2021 tumbuh positif hingga 4,93% (*quarter to quarter/qtt*).

Begitupun dengan realisasi penjualan listrik di Jakarta sepanjang tahun 2021 tercatat tumbuh positif hingga 1,5%, jauh lebih baik dibandingkan konsumsi listrik tahun 2020 yang turun sampai 5,6%. Dengan pulihnya penjualan listrik selama semester II - 2021 tersebut, maka pencapaian konsumsi listrik per kapita (indikator 7.1.1.(a)) di Jakarta juga berpotensi meningkat dari realisasi pada semester I - 2021 yang mencapai 3.307 kWh.

Kebijakan dan Strategi

Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat terhadap konsumsi listrik sepanjang semester II - 2021, Pemerintah melanjutkan kebijakan pemberian stimulus berupa subsidi listrik. Anggaran untuk program stimulus listrik disediakan Pemerintah Pusat dengan alokasi mencapai Rp 11,6 triliun sepanjang tahun 2021. Anggaran stimulus listrik tersebut terbagi untuk diskon listrik sebesar Rp9,5 triliun dan bantuan rekening minimum dan biaya beban atau abonemen Rp 2,11 triliun. Saat ini, tarif keekonomian listrik adalah sekitar Rp 1.400 - 1.500/kWh. Namun dengan adanya subsidi dari Pemerintah yang disalurkan melalui PT PLN, maka masyarakat yang menerima subsidi hanya perlu membayar sekitar Rp 400 - Rp600/kWh, tergantung jenis daya yang digunakan.

Stimulus berupa diskon tarif listrik diberikan secara langsung kepada pelanggan PLN baik kepada pelanggan pascabayar maupun pelanggan prabayar. Pelanggan pascabayar mendapatkan diskon dengan potongan langsung pada tagihan rekening listriknya. Sementara untuk pelanggan prabayar, diskon tarif listrik diberikan saat pembelian token listrik. Pelanggan rumah tangga berdaya 450 Volt Ampere (VA) mendapatkan diskon tarif listrik sebesar 50% selama Juli - Desember 2021. Sementara pelanggan rumah tangga berdaya 990 VA mendapatkan diskon tarif listrik sebesar 25% sepanjang Juli - Desember 2021. Stimulus juga diberikan berupa pembebasan biaya beban atau abonemen, serta pembebasan ketentuan rekening minimum sebesar 50% bagi pelanggan industri, bisnis, dan sosial selama semester II - 2021.

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Pemerintah DKI Jakarta juga terus memberikan dukungan penyediaan daya listrik untuk berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha melalui genset portabel. Selama semester II - 2021 pemberian supply daya listrik pada berbagai kegiatan telah difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi antara lain dalam kegiatan Pelatihan Sablon Digital pada 12 Oktober 2021, kegiatan Bazar Kecamatan Kebon Jeruk pada 27 Oktober 2021, kegiatan Festival Kolaborasi Stand-up Comedy Jakarta Zona Meriah pada 6 November 2021, kegiatan Opening Ceremony Presidensi G20 2022 di Taman Lapangan Banteng pada 1 Desember 2021, kegiatan Reaktivasi Plus Jakarta di Taman Lapangan Banteng pada 3-5 Desember 2021, kegiatan Gelar Produk Dekranasdanda Puncak Peringatan Hari Ibu Kota Jakarta Pusat di Taman Sumenep pada 21-22 Desember 2022.

Gambar 3.9

Dukungan Genset Listrik dalam Kegiatan Opening Ceremony Presidensi G20 2022



Sumber: Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, 2021

Sebagai bentuk kolaborasi dalam mendorong pemanfaatan energi yang lebih bersih di DKI Jakarta, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan PT Optima Integra Tehnika dan PT Handhika Garda Parama menggelar sosialisasi Ekosistem Kendaraan Listrik dan Workshop Konversi Kendaraan Listrik untuk Mendorong Ekosistem Kendaraan Listrik di DKI Jakarta pada tanggal 17-18 Desember 2022.

Kegiatan tersebut diikuti oleh 175 peserta terdiri dari perwakilan Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Pertamina, PLN, pengusaha, dunia pendidikan (SMK), Kadin, SKPD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, dan Dinas ESDM di Jawa dan Bali. Adapun maksud pelaksanaan kegiatan tersebut adalah mempercepat implementasi penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai, membangun komunitas ekosistem kendaraan listrik sekaligus membuka wawasan Pembangunan Rendah Karbon Daerah di DKI Jakarta.

Sedangkan tujuan dari kegiatan tersebut adalah memberikan arah Kebijakan & Strategi Ekosistem Kendaraan Listrik Berbasis Health Safety Environment (HSE) di DKI Jakarta dan meningkatkan aktivitas transportasi rendah emisi GRK di DKI Jakarta serta mempersiapkan konversi kendaraan bermotor khususnya sepeda motor yang berbahan bakar minyak (BBM) menjadi sepeda motor listrik di DKI Jakarta. Program kendaraan listrik diharapkan dapat meningkatkan ketahanan energi, mengurangi ketergantungan bahan bakar minyak dan menjadi momentum percepatan kerja sama untuk membangun era kendaraan listrik yang ramah lingkungan sekaligus membuka potensi ketersediaan lapangan kerja baru bagi para pencari kerja.

Untuk mempercepat dan memperluas penggunaan energi yang bersih dan terbarukan di Jakarta, PT PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya terus melanjutkan pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang ditargetkan mencapai 25 SPKLU di 18 lokasi hingga akhir tahun 2021. Pembangunan SPKLU ini juga

Gambar 3.10

Workshop Konversi Kendaraan Listrik di DKI Jakarta



Sumber: Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, 2021

diperluas melalui kerjasama antara PLN dengan beberapa perusahaan lain seperti Indomobil, PT Pos Indonesia, dan PT Bank Mandiri. Dari kerja sama dengan Indomobil, SPKLU akan dipasang di dealer Nissan MT Haryono. Salah satu SPKLU yang telah dioperasikan misalnya di Kantor Pusat Bank Mandiri. Kehadiran SPKLU diharapkan semakin memudahkan pengguna kendaraan listrik di Jakarta untuk pengisian daya pada kendaraan listriknya dan sekaligus mendorong minat masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik.

Di tengah perkembangan kendaraan listrik Indonesia muncul berbagai komunitas pengguna kendaraan listrik, salah satunya adalah Komunitas Sepeda dan Motor Listrik (Kosmik). Anggota Kosmik memberikan dukungan terhadap *pilot project* program Konversi Sepeda Motor Mesin Penggerak Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Motor Listrik yang telah diluncurkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada periode Agustus sampai November 2021. Sebelum adanya *pilot project* tersebut, sebagian anggota Kosmik juga telah melakukan konversi motor bensin ke motor listrik.

Gambar 3.11

Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum di Kantor Pusat Bank Mandiri



Sumber: IDXChannel.com, 11 Januari 2022

Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Kedaaan dan Kecenderungan

Sepanjang tahun 2021, sinyal pemulihan ekonomi DKI Jakarta mulai terlihat jelas. Perbaikan ekonomi Jakarta ditandai dengan pertumbuhan positif ekonomi Jakarta (indikator 8.1.1*#) selama Semester II 2021 yaitu tumbuh 2,43% pada triwulan III - 2021 (*year on year*), dan berlanjut tumbuh positif 3,64% per triwulan IV - 2021. Bangkitnya perekonomian Jakarta juga menjadi parameter pulihnya ekonomi Indonesia mengingat kontribusi ekonomi Jakarta terhadap PDB nasional merupakan yang terbesar mencapai 17,6% dalam lima tahun terakhir. Di samping itu, kinerja perekonomian Jakarta juga tercermin dari rata-rata pertumbuhan PDRB sebesar 5,98% dalam lima tahun terakhir, di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional 5,03%. Potret tersebut memperlihatkan bahwa Jakarta masih menjadi tumpuan perekonomian nasional.

Gambar 3.12

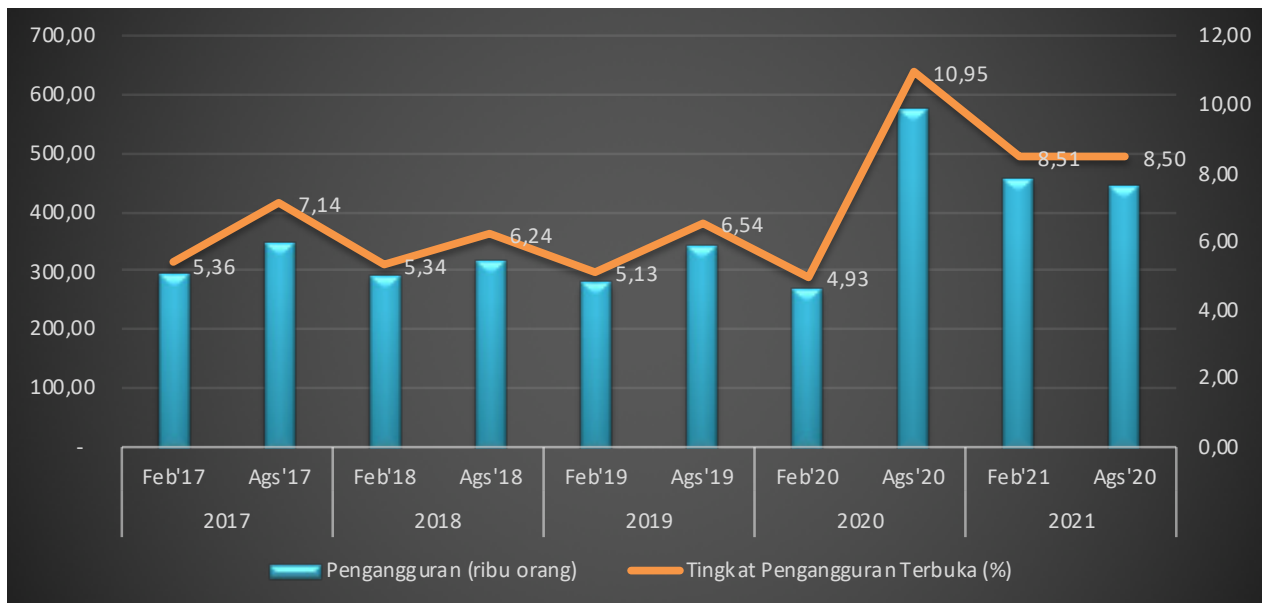
Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Trw I 2019 - Trw IV 2021



Sumber: BPS, 2021

Gambar 3.13

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi DKI Jakarta



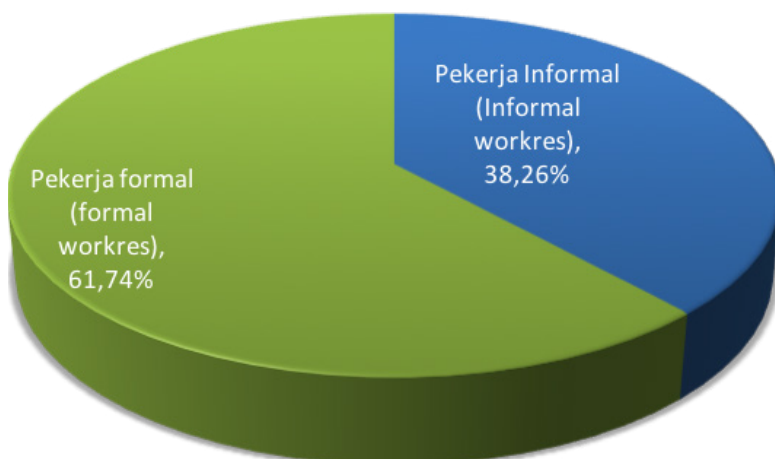
Sumber: BPS, 2021

Seiring asa pemulihan ekonomi Jakarta pada semester II - 2021 maka berbagai tujuan dan indikator SDGs juga diharapkan bisa mengalami perbaikan. Perbaikan aktivitas ekonomi misalnya dapat mempercepat penyerapan lapangan kerja di Jakarta yang sebetulnya juga sudah menunjukkan tren perbaikan dimana terdapat pengurangan 133 ribu orang pengangguran dalam setahun terakhir sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka (indikator 8.5.2*) mengalami penurunan dari 10,95% per Agustus 2020 menjadi 8,50% per Agustus 2021.

Berkurangnya tingkat pengangguran tersebut didorong oleh penyerapan tenaga kerja di sektor formal yang berkontribusi 61,74% terhadap total pekerja di Jakarta. Sektor formal menjadi motor penyerap tenaga kerja di Jakarta dengan tambahan 46 ribu tenaga kerja baru selama periode Agustus 2020 hingga Agustus 2021. Sementara itu, penyerapan tenaga kerja di sektor informal mencapai 32 ribu tenaga kerja baru dalam periode yang sama. Dengan berangsur membaiknya tingkat pendapatan masyarakat di Jakarta baik yang berasal dari sektor formal maupun informal maka pada gilirannya tingkat kemiskinan dan kesenjangan pun bisa terus berkurang.

Gambar 3.14

Proporsi Pekerja Formal dan Informal di Jakarta, Agustus 2021



Sumber: BPS DKI Jakarta

Tantangan dan Pembelajaran

Perekonomian DKI Jakarta pada Semester II - 2021 terus melanjutkan pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan IV - 2021 tercatat sebesar 3,6%, lebih tinggi dibandingkan triwulan III - 2021 sebesar 2,43%. Terjaganya momentum pertumbuhan positif tersebut dipengaruhi oleh kebijakan pelonggaran pembatasan sosial dari semula Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 pada masa puncak kasus di bulan Juli 2021 hingga menjadi PPKM Level 1 pada awal November 2021. Penurunan kasus Covid-19 dan kecepatan program vaksinasi Covid-19 selama semester II - 2021 akhirnya berdampak terhadap keyakinan konsumen dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Di samping membaiknya kondisi tersebut, kebijakan lain yang ditempuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya pemulihan ekonomi dari sisi perbaikan konsumsi masyarakat antara lain melalui program-program yang terkait mendorong konsumsi, relaksasi kewajiban, dan mendorong produktivitas. Selain itu, peran Pemerintah Pusat dalam berbagai program insentif ekonomi di Jakarta juga turut membantu pemulihan ekonomi Ibu Kota negara. Dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap upaya menjaga daya beli masyarakat menyasar kepada seluruh lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat miskin, rentan miskin, masyarakat mampu hingga kelompok tertentu seperti guru, veteran, lansia, pelajar, dan lainnya.

Kebijakan dan Strategi

Salah satu kebijakan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta mengurangi pengangguran adalah Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) dan Industri Kecil dan Menengah (IKM). UMKM/IKM memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya dalam mengurangi pengangguran

atau penciptaan lapangan pekerjaan serta mengurangi tingkat kemiskinan. Sehingga diperlukan pemberdayaan terhadap UMKM/IKM agar dapat terus tumbuh dan mampu menghadapi berbagai tantangan terutama pada masa pandemi, dimana adanya pembatasan-pembatasan yang mengakibatkan menurunnya omset UMKM/IKM dan menurunnya pertumbuhan ekonomi serta meningkatnya tingkat kemiskinan.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas PPKUKM (Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah) telah melakukan beberapa strategi dalam menjaga daya tahan UMKM/IKM di tengah masa pandemi. Beberapa strategi yang dilakukan antara lain:

- Pendampingan kepada calon wirausaha / pelaku usaha (UMKM/IKM) untuk dapat membuat usaha / mengembangkan usahanya melalui program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu yang memiliki 7 Tahapan yaitu Pendaftaran, Pelatihan, Pendampingan, Perijinan, Pemasaran, Pelaporan Keuangan dan Permodalan.
- Mengembangkan kapasitas pelaku UMKM/IKM dengan memberikan pelatihan *hard skill* dan *soft skill*.
- Meningkatkan kualitas IKM dengan memfasilitasi perizinan yang dibutuhkan (fasilitasi sertifikasi Halal, HKI, desain kemasan).
- Pelaksanaan Bazar UKM baik offline maupun online.
- Penyelenggaraan pembinaan kewirausahaan melalui upaya kolaborasi dengan stakeholder, seperti perguruan tinggi, marketplace, dan lain-lain.
- Pemberian bantuan melalui platform KSBB UMKM (Kolaborasi Sosial Berskala Besar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan 3 (tiga) bentuk bantuan yaitu paket sarana dan prasarana, paket pelatihan dan paket modal.
- Mempermudah dalam prosedur perizinan berusaha melalui sistem yang terintegrasi secara nasional, seperti *Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA)* dan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

- Meningkatkan sarana prasarana pengembangan UMKM.
- Pelaksanaan Program Gebetan UMKM (Gerakan Bersama Tanggap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) (pembelian produk UKM oleh ASN)

Melalui program dan strategi tersebut maka hasil dan dampak yang telah dicapai antara lain:

1. Terdapat sebanyak 70.490 wirausaha baru/calon wirausaha baru yang mendaftar di jakpreneur pada Tahun 2021 (data per 14 Desember 2021)
2. Terdapat sebanyak 51.295 pelaku usaha yang terdata memiliki perizinan di Jakpreneur pada Tahun 2021 (data per 14 Desember 2021)
3. Terdapat sebanyak 1.629 pelaku usaha yang di jakpreneur yang difasilitasi permodalan pada Tahun 2021 (data per 14 Desember 2021)
4. Terlaksananya pemasaran secara online melalui web Borju, Belanjajaksel, Jamur Betawi, POSJP, Jakpreneur Barat Festival sebanyak 5.768 UMKM
5. Terlaksananya program Gebetan UMKM dengan total sebanyak 267 UMKM ikut berpartisipasi pada program ini
6. Terlaksananya pemasaran secara offline berkolaborasi dengan para Asosiasi APPBI di Pusat Perbelanjaan, Aprindo di Toko Swalayan/Minimarket, Supermarket, Hypermarket, kolaborasi dengan KADIN dan HIPMI.
7. Terlaksananya IKM berkualitas sebanyak 1193 IKM (IKM yang ikut serta pendampingan sertifikasi halal, merek, dan desain kemasan)
8. Terlaksananya kurasi produk IKM sebanyak 600 IKM
9. Tercapainya Industri kreatif sebanyak 730 IKM

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Upaya yang dilakukan untuk mempercepat penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka di DKI Jakarta yaitu dengan membuka ruang Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) di bidang ketenagakerjaan. Salah satu wujudnya adalah kolaborasi antara Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta

berkolaborasi dengan PT Top Karir Indonesia yang meluncurkan layanan Jaknaker.id pada 18 November 2021 di Balaikota DKI Jakarta. Jaknaker.id merupakan layanan *online* untuk memberikan informasi terkait lowongan kerja, pelatihan kerja (online maupun offline), tes minat bakat bagi pencari kerja, layanan pelatihan online bagi UMKM, dan layanan ketenagakerjaan lain.

Portal ketenagakerjaan hadir untuk menyikapi tantangan perubahan dunia yang mengarah pada otomatisasi dan digitalisasi. Jaknaker.id memberikan kemudahan bagi para pemberi kerja (*demand*) dan pencari kerja (*supply*) termasuk berbagai informasi kunci yang dibutuhkan dalam rangka mendukung proses best matching, seperti gaji, keterampilan khusus, dan keahlian teknis. Layanan Jaknaker.id sendiri sudah terintegrasi langsung dalam aplikasi JAKI milik Pemprov DKI Jakarta.

Gambar 3.15

Peluncuran Portal Jaknaker.id



Sumber: Jaknaker.id

Selain itu, contoh kolaborasi lainnya adalah antara Baznas Bazis DKI Jakarta yang bekerja sama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta dalam mendirikan kios Difabis yang merupakan singkatan dari Difabel Baznas Bazis. Keberadaan kios atau gerai UMKM yang berlokasi di pinggiran Terowongan Kendal, Jakarta Pusat tersebut bertujuan untuk memberdayakan kelompok difabel dengan memberikan ruang yang inklusif. Selain mendapatkan ruang untuk berdagang secara offline, para peserta Difabis tersebut juga mendapatkan pelatihan melalui *platform* Jakpreneur terkait digitalisasi, seperti *marketing online* dan pembayaran berbasis *cashless*. Setelah dilatih dan memantapkan manajemen bisnis, barulah Difabis memulai penjualan secara daring dan menerapkan kasir online atau *cashless*.

Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur

Keadaan dan Kecenderungan

Momentum pemulihan ekonomi Jakarta yang terjadi sejak triwulan II - 2021 turut membawa dampak positif terhadap kinerja industri manufaktur. Pertumbuhan industri manufaktur (indikator 9.2.1(a)) terus melanjutkan tren positif selama semester II - 2021 yaitu sebesar 11,84% per triwulan III - 2021 dan 11,21% per triwulan IV - 2021.

Gambar 3.16

Kios Difabis binaan Dinas UMKM DKI dan Baznas Bazis DKI Jakarta

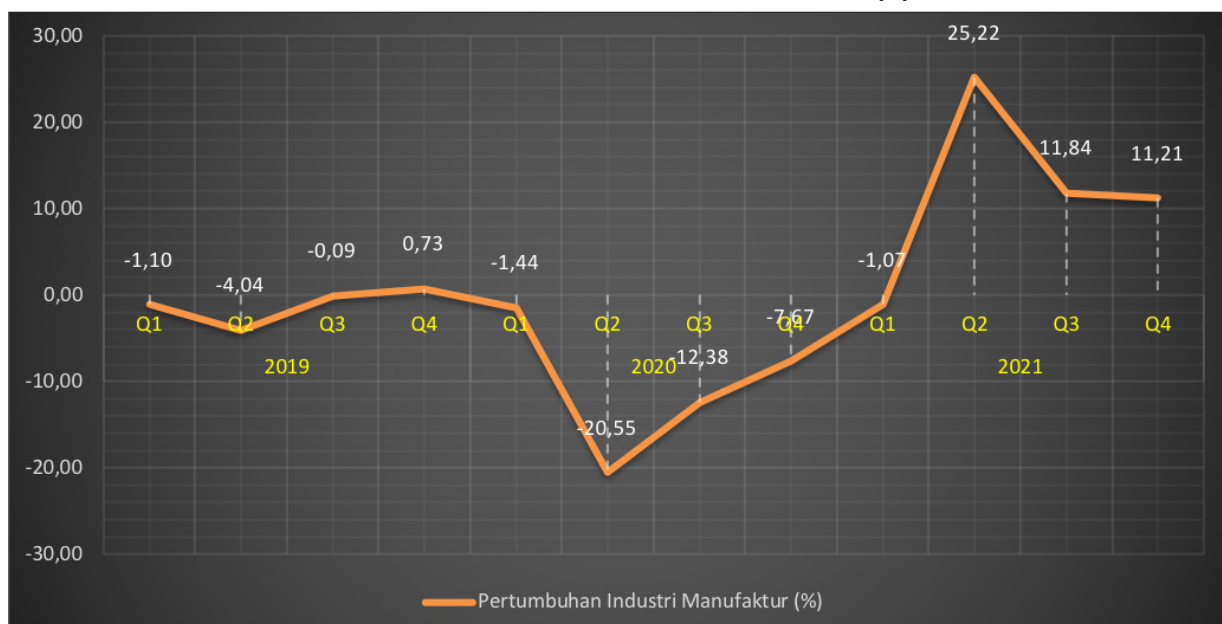


Sumber: Instagram Difabis

Secara kumulatif sepanjang tahun 2021, pertumbuhan industri manufaktur tumbuh 11,01%. Membaiknya kinerja industri manufaktur di Jakarta sangat penting karena kontribusinya yang signifikan terhadap PDRB Jakarta mencapai 12,28% atau menjadi sektor terbesar kedua setelah sektor perdagangan yang menyumbang 16,85% terhadap PDRB Jakarta.

Gambar 3.17

Pertumbuhan Industri Manufaktur di DKI Jakarta, Triwulan I 2019 - Triwulan IV - 2021 (% , yoy)



Sumber: BPS Jakarta, diolah

Tantangan dan Pembelajaran

Realisasi investasi di Jakarta sudah mulai membaik sepanjang tahun 2021, hasilnya terlihat dari pertumbuhan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) sebesar 7,92% dari Rp 481,7 triliun pada semester I - 2021 menjadi Rp 519,8 triliun pada semester II - 2021. Pemulihan investasi pada semester II - 2021 sejalan dengan pelonggaran mobilitas masyarakat akibat penurunan kasus Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta.

Membaiknya kinerja investasi di Provinsi DKI Jakarta juga terlihat dari realisasi investasi langsung yang berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dimana mengalami kenaikan hingga 74,62% dari Rp 19,9 triliun pada semester I - 2021 menjadi Rp 34,78 triliun pada semester II - 2021. Sementara itu, realisasi investasi asing (Penanaman Modal Asing/PMA) pada semester II - 2021 mencapai USD 1,36 miliar.

Komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjaga iklim investasi masih menjadi agenda utama dalam mendukung pemulihan ekonomi sekaligus pencapaian tujuan 9 SDGs terkait pengembangan industri, inovasi, dan infrastruktur di Provinsi DKI Jakarta. Salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mendorong investasi di DKI Jakarta yaitu melalui ajang promosi investasi *Jakarta Investment Forum* (JIF) 2021 yang diselenggarakan pada 11-12 November 2021. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta melalui Unit Pengelola *Jakarta Investment Centre* (JIC) menggelar Jakarta Investment Forum (JIF) 2021 bertema “*Strengthening the Post Pandemic Economy through Collaboration*” secara virtual.

Kebijakan dan Strategi

Kegiatan *Jakarta Investment Forum* (JIF) 2021 bertujuan untuk mempromosikan Provinsi DKI Jakarta sebagai kota ramah investasi sekaligus kota kolaborasi sebagai strategi pemerintah dalam pemulihan ekonomi Pasca-pandemi Covid-19. JIF 2021 juga menghadirkan

Networking Session dan *Plenary Discussion* yang menghadirkan diskusi mengenai *urban health*, *urban mobility* dan *urban tourism*. *Networking Session* menarik antusiasme para calon investor yang cukup tinggi, sekitar 3.000 partisipan hadir dalam *Networking Session* yang memberikan informasi detail tentang proyek apa saja yang siap ditawarkan kepada para investor. Melalui *Plenary*

Gambar 3.18

Jakarta Investment Forum 2021



Sumber: jakartainvestmentforum.com

Discussion, masyarakat terutama calon investor dapat melihat situasi terkini Jakarta di berbagai sektor, yaitu kesehatan, transportasi dan mobilisasi serta pariwisata.

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Upaya memulihkan iklim investasi di Jakarta juga dilakukan melalui pembangunan infrastruktur pada beberapa proyek PSN (Proyek Strategis Nasional) yang masih tetap berjalan antara lain proyek pembangunan MRT Fase II, LRT Jabodetabek, pembangunan 6 ruas jalan tol dalam kota, Kereta Cepat Jakarta Bandung, serta proyek strategis Provinsi DKI Jakarta yaitu pembangunan Jakarta International Stadium dan renovasi Taman Ismail Marzuki.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan keterampilan tenaga kerja dilakukan juga kolaborasi antara Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta dengan PT Pertamina Lubricants pada 22 September 2021. Kegiatan kolaborasi tersebut berbentuk pelatihan teknik alat pendingin yang diikuti oleh 70 peserta.

Gambar 3.19

Program Kolaborasi Pelatihan AC



Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta

Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

Keadaan dan Kecenderungan

Per Maret 2021, indikator 10.1.1 Koefisien Gini di Provinsi DKI Jakarta berada pada angka 0,409 naik dari tahun 2019 sebesar 0,399. Hal ini dipicu oleh beberapa sebab, terutama masih tingginya angka kemiskinan, terutama selama pandemi. Pada September 2021, tingkat kemiskinan tercatat di angka 4,67%, tak berbeda jauh dari angka tahun sebelumnya, yakni September tahun 2020 sebesar 4,69%. Kondisi demikian belum membaik sejak awal pandemi melanda Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, dalam pengukuran BPS, garis kemiskinan juga meningkat dari Rp 680.400/kapita/bulan pada Maret 2020 menjadi Rp 697.638/kapita/bulan per Maret 2021.

Peningkatan kemiskinan mengindikasikan penurunan daya beli masyarakat, terutama kelompok masyarakat miskin-rentan. Pembatasan aktivitas dan mobilitas untuk menanggulangi pandemi Covid-19 menjadi salah satu sebab utamanya. Selain itu, pelemahan ekonomi pada beberapa semester sebelumnya semakin berdampak pada menurunnya pendapatan kelompok miskin-rentan, termasuk yang bekerja di sektor-sektor informal.

Meskipun demikian, indeks demokrasi di Provinsi DKI Jakarta yang terus meningkat selama 4 tahun terakhir menjadi peluang untuk mengoptimalkan tata kelola. Melalui penguatan tata kelola (transparansi, keterbukaan informasi, dll), cenderung dapat mendukung kebijakan-kebijakan penanggulangan pandemi sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin rentan.

Tantangan dan Pembelajaran

Jakarta Investment Forum (JIF) tahun 2021 diselenggarakan secara kolaboratif antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BUMD dan aktor nonpemerintah lain. Beberapa pihak yang terlibat di antaranya, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Unit Pengelola Jakarta Investment Centre,

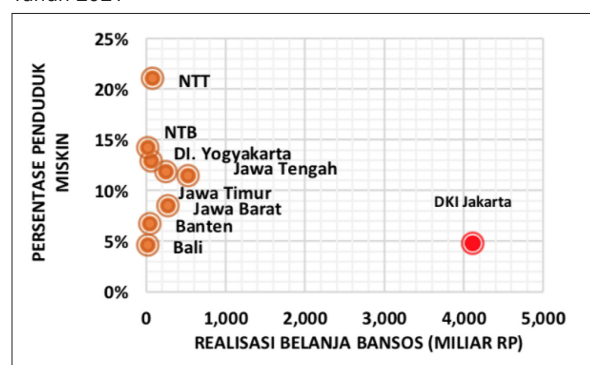
Jakarta Experience Board (PT Jakarta Tourisindo), Bank Indonesia, Agung Sedayu Group, BCA, Pakuwon Group, Putragaya Wahana, Roche Indonesia dan MRT Jakarta. Acara yang diikuti ribuan peserta tersebut hendak menarik investasi ke Provinsi DKI Jakarta. Melalui investasi, perekonomian diharapkan terus membaik dan dapat memberikan efek lanjutan seperti lapangan kerja.

Selain itu, inisiatif Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) di berbagai sektor, seperti pangan, pendidikan hingga permukiman dapat mendorong peningkatan daya beli, terutama kelompok miskin-rentan. KSBB yang difokuskan pada wilayah-wilayah rentan menjadi salah satu pendekatan yang dapat mengoptimalkan dampak pada penerima manfaat, sekaligus meminimalkan salah sasaran.

Kebijakan dan Strategi

Strategi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mengurangi tingkat kesenjangan di tengah pandemi Covid-19 adalah dengan menerapkan intervensi fiskal dan nonfiskal pada aspek sosial dan ekonomi. Langkah pertama yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta ialah melindungi masyarakat rentan melalui *social safety net*. Kebijakan perlindungan sosial di Provinsi DKI Jakarta, mulai dari bantuan sosial, berbagai kartu jaminan sosial (KJP, Disabilitas, Lansia, dan sebagainya) serta kebijakan afirmasi untuk kelompok miskin rentan

Gambar 3.20
Realisasi Belanja Bansos dan Persentase Kemiskinan Se-Jawa Bali Tahun 2021



Sumber: DJPK, 2021

Realisasi belanja bantuan sosial Provinsi DKI Jakarta per triwulan III - 2021 sebesar Rp 4,1 triliun menduduki peringkat pertama dari seluruh pemerintah daerah di Indonesia atau mencapai 58,47% dari total realisasi belanja bantuan sosial daerah secara Nasional Rp 7 triliun. Jika dibandingkan dengan regional se-Jawa Bali, persentase penduduk miskin DKI Jakarta pada Maret 2021 sebesar 4,72% jauh di bawah provinsi yang lain kecuali Provinsi Bali (4,53%). Akan tetapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap memprioritaskan belanja bantuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya yaitu sebesar Rp 4,1 triliun, sementara provinsi lainnya rata-rata mencapai Rp 164 miliar. Hal inilah yang menjadikan Provinsi DKI Jakarta lebih cepat bangkit akibat pandemi Covid-19.

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Terdapat beberapa upaya yang diinisiasi langsung oleh organisasi nonpemerintah dan cenderung berdampak pada kelompok masyarakat miskin-rentan, salah satunya CSR dari sektor swasta. Selain itu, inisiatif warga bantu warga juga kita jumpai di Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan sukarela ini menasar kelompok masyarakat miskin-rentan yang selama ini paling terdampak oleh pandemi Covid-19.

Forum CSR DKI Jakarta telah menjalin 28 kerjasama baik dengan pihak swasta maupun pemerintah dalam program bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19. Beberapa mitra Forum CSR DKI Jakarta dalam program tersebut antara lain Wijaya Karya (Persero), Tbk, Pertamina (Persero), Danone Indonesia, Palang Merah Indonesia, Rekso National Food, Unilever Indonesia, Rumah Yatim, hingga Kitabisa Indonesia¹.

BUMN seperti PT Pertamina Retail (PTPR) juga melaksanakan program CSR di Provinsi DKI Jakarta. Melalui program Pertamina Retail Peduli, PTPR telah membagikan bingkisan berupa sembako kepada masyarakat di Jakarta, khususnya yang berada di sekitar area operasi perusahaan².

¹ <https://regional.kontan.co.id/news/selama-pandemi-forum-csr-dki-menjalin-28-kerjasama-bansos>

² <https://pertaminaretail.com/2021/08/25/pertamina-retail-gulirkan-bantuan-sembako-bagi-masyarakat-terdampak-covid-19/>

Sementara itu, untuk inisiatif komunitas atau warga sendiri telah banyak diinisiasi, seperti Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) yang menginisiasi patungan untuk membantu warga miskin terdampak pandemi Covid-19³. Kemudian, Baznas Bazis DKI Jakarta berkolaborasi dengan PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) meluncurkan program Semua Bisa Makan di Jakarta Utara. Bekerjasama dengan 17 warung makan di Jakarta Utara, disediakan makanan gratis untuk masyarakat miskin⁴.

Berbagai upaya dari aktor nonpemerintah tersebut tentu membawa dampak bagi warga. Di samping program perlindungan sosial dari pemerintah, inisiatif warga dapat memastikan kelompok masyarakat miskin-rentan dapat bertahan di tengah dampak pandemi Covid-19, bahkan diharapkan dapat meningkatkan daya belinya.

Tujuan 11 Kota dan Pemukiman Berkelanjutan Keadaan dan Kecenderungan

Salah satu indikator kunci dalam Tujuan 11 yakni Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum (*public transportation modal share*), di tahun 2021 sudah mengalami kenaikan kembali menjadi 14,76%, setelah sebelumnya di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 8,2%. Kendati kenaikan ini tidak setinggi saat pra pandemi Covid-19 terjadi. Untuk itu terdapat prioritas pengguna jalan dimulai dari pejalan kaki, pengguna kendaraan ramah lingkungan dan angkutan umum, hal ini juga diharapkan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Per 2021 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membangun trotoar dan fasilitas pendukung seluas 671.522,81 m². Pemerintah telah memprioritaskan lokasi pembangunan fasilitas pejalan kaki melalui *complete street* (dengan melakukan integrasi dengan jalur sepeda) pada jalur-jalur antar moda transportasi publik.

Indikator lainnya yakni proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau mengalami peningkatan menjadi 40 persen pada 2021, namun capaian ini masih tergolong rendah. Pada tujuan 11 juga menaruh perhatian pada upaya mengurangi dampak negatif dari bencana agar menjadi kota yang berketahanan. Dalam pemenuhan target ini, salah satu indikator yang digunakan yakni indikator Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah yang menunjukkan peningkatan dari 5,89 pada 2020 menjadi 6,72 pada tahun 2021.

Tantangan dan Pembelajaran

Salah satu indikator yang paling menjadi tantangan yakni indikator proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau, hal ini sangat berlekatan dengan konsepsi hunian yang layak. Berdasarkan BPS, kriteria hunian layak terdiri dari 4 (empat) kriteria, yaitu: (1) kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m² per kapita (*sufficient living space*), (2) memiliki akses terhadap air minum layak, (3) memiliki akses terhadap sanitasi layak, serta (4) ketahanan bangunan (*durable housing*), yang terdiri dari komponen atap, lantai, dan dinding. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau di DKI Jakarta mengalami kenaikan dari 33,18 persen pada tahun 2020 menjadi 40 persen pada 2021. Namun capaian ini masih tergolong rendah, rendahnya capaian ini disebabkan terdapat satu kriteria terkait ketahanan bangunan, yaitu komponen atap asbes yang dianggap tidak memenuhi standar kesehatan yang masih mencapai 54,78%. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Jakarta, mengingat sulitnya mengintervensi pencapaian hunian layak di lahan-lahan privat. Aspek kecukupan luas tempat tinggal juga menjadi komponen yang menantang untuk Kota Jakarta yang tergolong padat penduduk.

³. <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/26/17082231/kaleidoskop-2021-solidaritas-di-tengah-pandemi-covid-19-saat-warga?page=all>

⁴. <https://www.beritajakarta.id/read/93980/program-semua-bisa-makan-bantu-warga-jakarta-utara#.YcquCGHBy3A>

Kebijakan dan Strategi

Dalam rangka penyediaan hunian layak sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup. Strategi yang dilakukan dalam peningkatan hunian layak yaitu melalui; (1) tata kelola rusunawa dan rusunami; (2) fasilitasi kepemilikan rumah susun melalui talangan uang muka dan upaya lain yang dimungkinkan peraturan perundangan; (3) peningkatan kualitas kawasan permukiman dengan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang terpelihara pada kawasan kumuh, pelaksanaan reforma agraria perkotaan, dan penerapan konsolidasi tanah vertikal.

Untuk memenuhi kebutuhan hunian yang layak bagi warganya, pemerintah berupaya melakukan penataan kampung di Jakarta. Terdapat 21 kampung yang menjadi prioritas yang sudah dimulai sejak tahun 2018, diantaranya Kampung Susun Kunir di Pinangsia, Tamansari, Jakarta Barat, Kampung Susun Produktif Tumbuh di Cakung, Jakarta Timur, juga Kampung Tanah Merah di Jakarta Utara. Untuk Kampung Susun Aquarium, Tahap I telah selesai pembangunannya. Pada Agustus 2021, warga sudah menempati Kampung Susun Aquarium yang sudah menyelesaikan pembangunannya pada Tahap I. Selain itu dalam upaya mengatasi kekumuhan, Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Sudin PRKP) Jakarta Pusat melakukan pengerjaan fisik bangunan melalui program CIP (*Collaborative Implementation Program*) di 12 wilayah RW kumuh di Semester II 2021 akan merevitalisasi rukun warga (RW) kumuh di Jakarta Pusat.

Selain isu pemenuhan akses permukiman yang layak, pada tujuan 11 juga berupaya mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara (FPSA) di dalam kota atau *Intermediate Treatment Facility* (ITF). Fasilitas ini diharapkan dapat mengurangi volume sampah dengan pengolahan berbasis teknologi. Terdapat beberapa pengerjaan FPSA diantaranya FPSA Sunter, FPSA Wilayah Layanan Barat, FPSA Wilayah Layanan Timur dan Selatan. FPSA ini dapat mengurangi ketergantungan DKI Jakarta terhadap (TPST) Bantar Gebang. Selain itu, FPSA juga menjadi salah satu upaya untuk memanfaatkan sampah menjadi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat.

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Bentuk percepatan yang dilakukan pemerintah dalam upaya meningkatkan akses terhadap hunian layak dan terjangkau, antara lain: melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa, penataan kawasan permukiman/kampung melalui program CAP CIP maupun penataan kampung prioritas, serta fasilitas pembiayaan pemilikan rumah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan daya beli melalui program DP Nol. Untuk mendorong percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, pemerintah juga melibatkan pihak swasta melalui skema pendanaan alternatif non APBD melalui Instrumen Perizinan Pemanfaatan Ruang, meliputi kewajiban pemegang Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan pengenaan kompensasi pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB), maupun bentuk skema pendanaan inovatif lainnya yang dimungkinkan dengan mengacu peraturan perundang-undangan.

Saat ini Pemerintah Daerah sedang menyusun Grand Design Pengendalian Pencemaran Udara. Dalam langkah yang lebih riil akan di disusun pula aksi kolaborasi di dalam upaya pengendalian pencemaran udara. Kemudian di level yang lebih praktikal juga dilakukan pelaksanaan uji emisi gas buang kendaraan bermotor sesuai Peraturan Gubernur No. 66 Tahun 2020. Untuk



menyempurnakannya sudah direncanakan pula integrasi dan implementasi sistem uji emisi dengan aplikasi yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Juga secara simultan dilakukan pengawasan operasional instalasi dan publikasi hasil *Continuous Emission Monitoring System* (CEMS) terhadap pengukuran kualitas udara. Lebih lanjut akan dilakukan penyediaan tanaman penyerap polutan di sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dinas pertamanan dan hutan kota sesuai dengan poin 6 Ingub No 66 Tahun 2019.

Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab

Kedaaan dan Kecenderungan

Sampah menjadi salah satu masalah yang harus dapat ditangani di Provinsi DKI Jakarta. Indikator 11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani hingga tahun 2020 telah mencapai 75%, melebihi target tahun 2020 sebesar 74%. Meskipun telah mencapai target, tetap perlu dilakukan upaya-upaya terkait masalah persampahan di DKI Jakarta. Jakarta sangat bergantung pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang sebagai tempat pengolahan akhir sampah yang berasal dari Jakarta. TPST Bantar Gebang dengan luas area 110,3 Ha dan luas efektif TPST 81,91 % (sekitar 90,35 Ha) yang dapat digunakan untuk pengolahan sampah saat ini menghadapi tekanan banyaknya sampah yang masuk ke TPST Bantar Gebang. Pada tahun 2020, rata-rata jumlah sampah yang masuk mencapai 7.424 ton/hari. Berdasarkan sampling yang dilakukan terhadap 100 TPS di DKI Jakarta, didapatkan informasi komposisi sampah DKI Jakarta. Jenis sampah terbanyak adalah berupa sampah organik sisa makanan sebesar 53% dari total sampah.

Sampah B3 Medis dari Rumah Tangga. Selama pandemi Covid-19, masyarakat diminta untuk melakukan 5 M, mencuci tangan pakai air dan sabun, memakai masker,

menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Masker yang digunakan dapat dikategorikan sebagai sampah/limbah medis. Sampah medis yang tergolong limbah B3 infeksius menjadi masalah yang muncul pada situasi pandemi Covid-19 karena potensi bahaya penularan penyakit yang ditimbulkannya.

Pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri LHK No.SE.02/PSLB3/PLB.3/3/2020 tentang pengelolaan limbah infeksius (Limbah B3) dan sampah rumah tangga dari penanganan Covid-19. Pemerintah Provinsi DKI memandang serius penanganan sampah medis dari Rumah Tangga ini dengan mengelola sampah medis ini dengan melibatkan pihak ketiga. Sampah ini diangkut oleh pihak ketiga PT. Tenang Jaya Sejahtera.

Situasi pandemi menjadi tantangan tersendiri bagi pengelolaan sampah karena terdapat lonjakan limbah B3 yang terjadi, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mencatat bahwa sepanjang tahun 2021 terdapat 69.896,48 kilogram limbah B3 yang diolah yang berasal dari rumah tangga juga tempat isolasi terkendali, jumlah ini meningkat dibandingkan tahun lalu. Dikarenakan sifatnya yang infeksius maka butuh penanganan khusus, Pemerintah DKI Jakarta bekerjasama dengan PT. Tenang Jaya Sejahtera untuk pengangkutan sampah infeksius tersebut.

Masih dalam konteks upaya untuk pengurangan sampah, hal ini sangat berkaitan dengan pola konsumsi dan produksi yang dilakukan masyarakatnya. Pola ekonomi sirkular merupakan model yang hendak diupayakan pada UU 18/2008⁵ dijelaskan pula mengenai paradigma baru bahwa sampah merupakan sumber daya yang memiliki nilai ekonomi. Sebetulnya alam memiliki mekanismenya sendiri untuk mengurai jenis limbah sesuai dengan daya dukungnya namun ketika banyaknya bahan kimia yang tidak dikenali alam (melampaui daya dukungnya) maka akan ada dampak buruk yang terjadi terhadap ekosistem itu sendiri.

⁵. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Pandemi Covid-19 mengubah pola konsumsi masyarakat Jakarta begitu pula produksinya mengikuti tren kebutuhan dari masyarakat di masa pandemi, salah satu produk yang paling signifikan dan distingtif yakni produk-produk medis yang berdampak secara langsung bagi peningkatan limbah B3. Kendati tren kasus positif Covid-19 terus menurun di semester 2 2021, namun menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta limbah B3 Covid-19 (pada lima titik tempat pembuangan sampah) mencapai 2.106,65 kilogram selama 2021. Hal ini lebih banyak dibandingkan tahun 2020 yang tercatat sebanyak 1.538,77 kilogram. Dalam penanganan limbah ini dilakukan secara terisolasi dengan mengumpulkannya di titik tertentu sebagai tempat pengumpulan limbah medis, namun hal ini menjadi tantangan tersendiri karena rigiditas pemilahan sampah yang dilakukan masyarakat yang menjadi kunci penanganan limbah medis agar tidak tercampur dengan limbah lainnya.

Dari sisi produksi, dapat tercermin dari indikator Jumlah peserta PROPER (Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang mencapai minimal ranking biru yakni perusahaan telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku terdapat 60 perusahaan⁶. Hal ini meningkat dibandingkan tahun 2020 dengan total 53 perusahaan. Hal ini menjadi penting dalam konteks Tujuan TPB ke-12 karena penilaiannya setidaknya meliputi isu terkait tata kelola air penilaian, kerusakan lahan, pencemaran laut, pengelolaan limbah B3, pengendalian pencemaran udara, pengendalian pencemaran air, dan implementasi AMDAL.

Pada dasarnya, sampah kota (*municipal waste*) memiliki keterkaitan langsung dengan tingkat maupun pola konsumsi dan produksi. Timbulan sampah yang dihasilkan ini juga dapat menghasilkan zat berbahaya dan beracun yang menyebar ke tanah dan dapat menghasilkan sejumlah besar emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang secara langsung berkontribusi terhadap pemanasan global.

Tantangan dan Pembelajaran

Tantangan terbesar dari isu konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab yakni berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilih mode konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Hal ini dapat berdampak besar jika dilakukan secara masif oleh banyak orang. Pemerintah sendiri memiliki berbagai upaya untuk menangani problem persampahan yang merupakan konsekuensi dari belum adanya kesadaran terkait pengurangan dan pengolahan sampah di tingkat individu atau rumah tangga.

Sepanjang tahun 2021 kasus COVID masih berfluktuasi untuk itu salah satu tantangan terberatnya yakni pengelolaan limbah medis di masa pandemi. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi lebih lanjut terkait penanganan ini ke masyarakat untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 melalui limbah yang tidak terisolasi dengan baik. Selain itu, dalam konteks sampah yang lebih umum sudah ada Pergub Nomor 77 Tahun 2020 terkait pengelolaan sampah lingkup rukun warga dan di Tahun 2021 juga sudah disahkan Peraturan Gubernur Nomor 102 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan. Aturan ini mendorong adanya pengelolaan sampah di level industri menjadi lebih terklasifikasi berdasarkan sumber sampahnya. Keberadaan 2 peraturan ini patut kita apresiasi dalam upaya penanganan sampah yang lebih baik. Namun tantangannya yakni terkait implementasi kebijakan yang ada, untuk itu diperlukan kesadaran dan keterlibatan dari segala pihak untuk mencapai progres yang signifikan.

Kebijakan dan Strategi

DLH DKI Jakarta bekerja sama dengan PT Wastec Internasional untuk melakukan pemusnahan limbah medis. Pengelolaan limbah infeksius dari fasilitas pelayanan kesehatan berpedoman pada Peraturan Menteri

⁶. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.1307/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2021 tanggal 24 Desember 2021

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Sedangkan, Pengelolaan limbah yang bersumber dari rumah tangga diatur dan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) dan Instruksi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penanganan Limbah Medis yang Bersumber dari Rumah Tangga sebagai Kewaspadaan Situasi Penularan Infeksi Covid-19.

Keselamatan petugas pengangkut sampah juga menjadi perhatian. Petugas wajib menggunakan perlengkapan sesuai protokol kesehatan seperti sarung tangan,

masker. Selain itu, pemberlakuan sistem shift kerja bagi petugas pengangkut sampah di lapangan pun dilakukan. Misalnya di wilayah Jakarta Timur, petugas shift pertama bekerja mulai pukul 04.30 – 08.00 WIB, dilanjutkan oleh tim pengawas yang menyisir ulang ada atau tidaknya penumpukan sampah di masing-masing wilayah.

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Bentuk kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dan PT. Wastec International untuk mengolah sampah B3 yang bersumber dari rumah tangga melalui proses seperti tabel 3.3.

Untuk mengakselerasi Pemerintah Daerah Jakarta memiliki Gerakan Jakarta Sadar Sampah Terkoneksi dari Hulu hingga Hilir yang terkompilasi seperti gambar 3.14.

Tabel 3.4

Proses Pengolahan Sampah B3 yang Bersumber dari Rumah Tangga

Rumah Tangga	Dipo Kecamatan	Dipo LB3 Kota	Dipo LB3 Kota
Limbah infeksius masker bekas/sarung tangan/ hazmat dari warga	Pengangkutan oleh Petugas Kebersihan menuju Dipo/TPS di Kecamatan	Pengangkutan oleh Petugas Satpel menuju Dipo/TPS limbah B3 Kota	Pengangkutan oleh pihak ke-3 secara berkala menuju ke Tempat Pengolahan Limbah B3 Limbah infeksius diolah dimusnahkan di PLTSa

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, DKI Jakarta (2020)

Gambar 3.21

Regulasi Terkait Gerakan Jakarta Sadar Sampah dari Hulu hingga Hilir



Sumber: diolah dari berbagai sumber

Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

Keadaan dan Kecenderungan

Indikator jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang (indikator 13.1.2*) merupakan indikator penting terkait kebencanaan dalam TPB/SDGs. Indikator ini juga dimasukkan ke dalam Tujuan 1, tanpa kemiskinan pada indikator 1.5.1* dan Tujuan 11, Kota dan Pemukiman Berkelanjutan, pada indikator 11.5.1*.

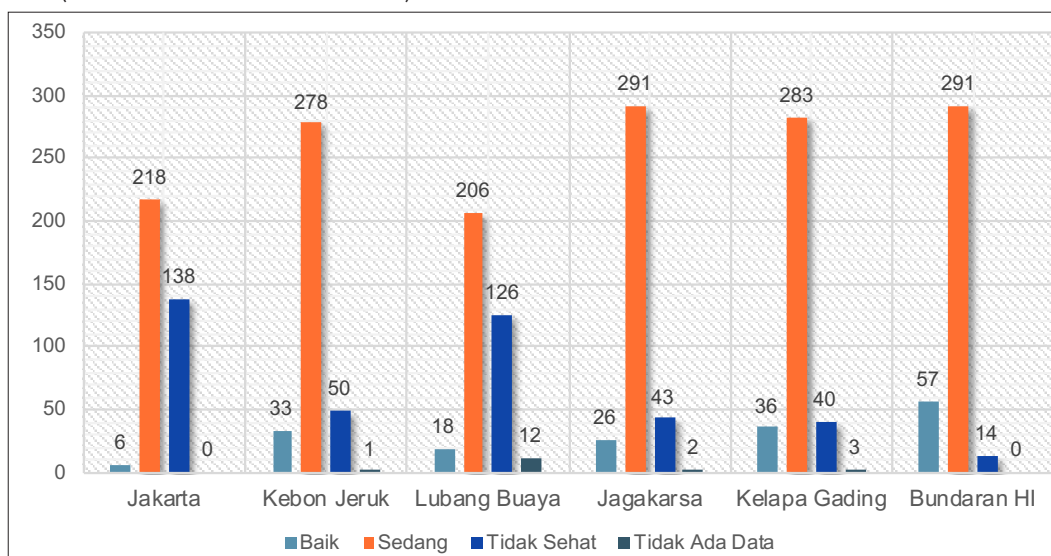
Pada indikator 13.1.2*, hingga bulan Juni 2021, jumlah korban meninggal dan hilang per 100.000 orang tercatat sebesar 0,93 (98 jiwa). Jumlah korban hilang per 100.000 orang tercatat sebesar 0,88 (93 jiwa). Jumlah pengungsi per 100.000 orang tercatat sebesar 220,57 (23.297 jiwa). Kejadian Banjir menjadi kategori bencana yang menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Sementara itu, Kejadian Kebakaran merupakan salah satu bencana yang sering terjadi di DKI Jakarta, hal ini umumnya terjadi di pemukiman warga yang padat. Pada tahun 2020 tercatat 148 korban kebakaran dan hingga Bulan Juni 2021 korban terkait kebakaran mencapai 86 jiwa. Provinsi DKI Jakarta memiliki 13 sungai yang mengalir di wilayahnya menyebabkan kecenderungan semakin rentannya wilayah Jakarta untuk tergenang

air dan banjir pada musim hujan. Tingginya tingkat perkembangan wilayah di sekitar Jakarta, menyebabkan semakin rendahnya daerah resapan air kedalam tanah dan menyebabkan run off air semakin tinggi, yang dapat memperbesar ancaman banjir di DKI Jakarta. Dalam siklus 5-6 tahunan Jakarta memiliki potensi banjir cukup tinggi, pada tahun 2002, 2007 dan tahun 2013, 2015 terjadi banjir besar dengan kerugian yang besar pula. Ancaman bencana banjir juga terkait sekali dengan Perubahan Iklim. Oleh karena itu, isu terkait perubahan iklim perlu menjadi perhatian khusus terkait kebencanaan di Provinsi DKI Jakarta.

Pada bulan Februari 2021 telah terjadi bencana banjir yang melanda DKI Jakarta dengan curah hujan tertinggi mencapai 226 mm/hari (kategori ekstrim di atas 150 mm/hari). Banjir kali ini menggenangi 113 RW dengan luas area tergenang mencapai 4 km persegi. Jumlah pengungsi mencapai 3.311 jiwa dengan korban meninggal 5 orang. Penanganan banjir tahun 2021 dirasakan lebih baik dibandingkan dengan banjir tahun 2013 (17 Januari 2013) di mana saat itu tercatat curah tertinggi harian mencapai 100 mm/hari. ditunjukkan dengan lebih sedikitnya jumlah korban meninggal, jumlah pengungsi, jumlah RW Tergenang, Luas Area Tergenang, waktu surut genangan yang lebih cepat.

Gambar 3.22

ISPU (Indeks Standar Pencemaran Udara) Januari-Desember 2021



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Kemudian dari sisi yang berkaitan erat dengan perubahan iklim yakni emisi karbon. Tren standar pencemar udara Jakarta didominasi sedang dan tidak sehat berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, seperti tercermin dari *fixed station* pemantau kualitas udara Jakarta yang tersebar di 5 titik (gambar 3.16).

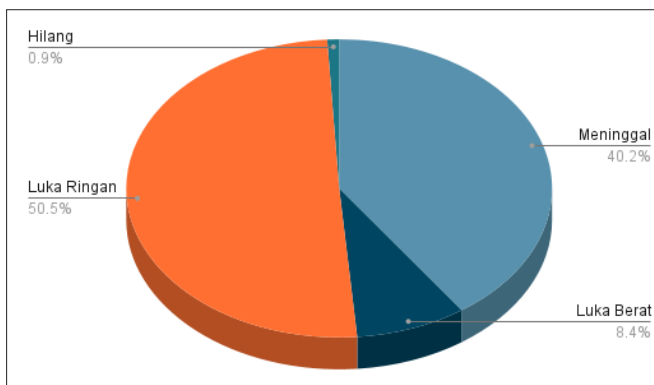
Berdasarkan data sumber pencemarnya, disebutkan pula bahwa dari sektor penyumbang terbesar yakni sektor transportasi, sedangkan khusus untuk sulfur dioksida penyumbang terbesarnya dari sektor industri. Untuk sektor transportasi pemerintah telah melakukan upaya pembenahan dari sektor perbaikan transportasi umum dengan membuat Rencana Induk Transportasi Jabodetabek dan tengah melakukan proses penyusunan

rencana induk jalur pejalan kaki di Jakarta.

Hal ini berpengaruh bagi perubahan iklim yang berkaitan erat dengan masalah kebencanaan yang diakibatkan. Untuk itu dalam upaya pencapaian target mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional 13.2 saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyusun Laporan Akhir Pelaporan Evaluasi dan Pemantauan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021. Berikut data rekap kejadian bencana dari BPBD DKI Jakarta. Dari bulan Juli hingga November 2021 kasus yang paling banyak terjadi yakni kebakaran (256 kasus), pohon tumbang (76 kasus), jalan tergenang (20 kasus), kejadian lainnya (20 kasus) dan banjir (19 kasus).

Gambar 3.23

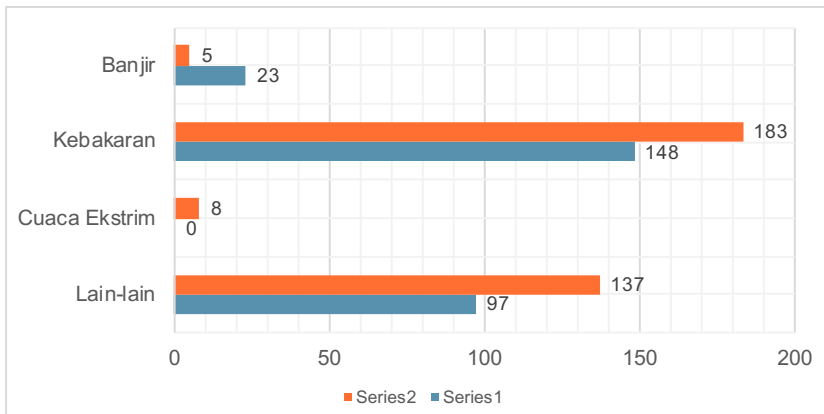
Data rekap kejadian bencana dari bulan Juli hingga November 2021



Sumber: Pusdatin BPBD (2021)

Gambar 3.24

Data korban 2020-2021 berdasarkan bencana



Sumber: Pusdatin BPBD (2021)

Tantangan dan Pembelajaran

Jakarta merupakan kota yang paling rentan bencana iklim. Jakarta tergolong paling rawan karena terjadi penurunan permukaan tanah dan infrastruktur yang tergolong minim, bahkan sekitar 40 persen wilayah ibu kota berada di permukaan laut. Jakarta masuk dalam urutan teratas dari 100 kota yang paling rentan oleh dampak krisis iklim di dunia. Untuk itu dalam menangannya maka dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak.

Tantangan lainnya yang ada dalam upaya penanganan perubahan iklim diantaranya terkait keterbatasan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) seperti pengoptimalan fungsi hijau di area selain tanah. Jelas dibutuhkan kepedulian yang tinggi dari semua lapisan masyarakat dalam menjaga Ruang Terbuka Hijau yang sudah disediakan pemerintah ini.

Kebijakan dan Strategi

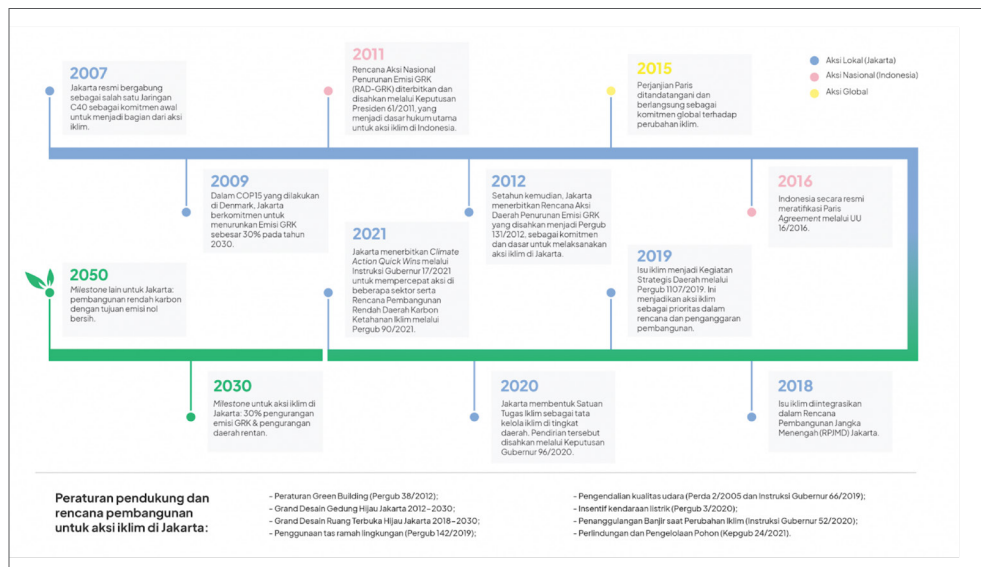
Pada dasarnya dalam upaya penanganan perubahan iklim paradigma peraturan yang digunakan sudah menggabungkan antara aksi mitigasi dan adaptasi

perubahan iklim⁷. Berikut merupakan linimasa perjalanan regulasi berupa peraturan pendukung dan rencana pembangunan untuk aksi iklim di Jakarta;

Upaya mengurangi emisi Gas Rumah Kaca dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta salah satunya lewat Instruksi Gubernur No.66 tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Provinsi DKI Jakarta telah mengembangkan 7 Solusi Jakarta Mengatasi Polusi Udara untuk mencapai #JakartaCleanerAir2030. 7 Solusi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta diantaranya Peremajaan dan Uji Emisi Kendaraan Umum; Penerapan Ganjil Genap, Tarif Parkir, *Congestion Pricing*; Uji Emisi dan Pembatasan Usia Kendaraan Pribadi; Peralihan Moda, Peningkatan Kenyamanan dan Fasilitas Pejalan Kaki; Memperketat Pengendalian Sumber Tidak Bergerak; Penghijauan pada Sarana dan Prasarana Publik; penggunaan Energi Terbarukan. Upaya ini dilakukan untuk mencapai target reduksi emisi pada tahun 2030 sebesar 30% dari baseline atau setara dengan 35 juta ton CO₂e. Beberapa inisiatif yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai target di dalam RAD GRK tersebut yakni pelaksanaan program kampung iklim (proklm), inventarisasi profil emisi dan

Gambar 3.25

linimasa perjalanan regulasi peraturan pendukung dan rencana pembangunan untuk aksi iklim di Jakarta



Sumber: <https://rendahemisi.jakarta.go.id/>

⁷ <https://www.dw.com/id/jakarta-puncaki-daftar-kota-paling-rentan-krisis-iklim/a-57519795>

pelaporan penurunan emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta, rekayasa lalu-lintas berbasis nomor plat ganjil-genap dan program sekolah adiwiyata.

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Untuk mempercepat capaian dalam upaya penanganan perubahan iklim terhadap beberapa program yang dilakukan pemerintah diantaranya inventarisasi Profil Emisi Gas Rumah Kaca dan Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta serta proyeksi tingkat dan mitigasi emisi GRK di Jakarta dari tahun 2023 hingga 2027. Juga dilakukan monitoring pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Gubernur 90 Tahun 2021 tentang RPRKD (Penyusunan Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah) dan Instruksi Gubernur 17 Tahun 2021 tentang Pengendalian Dampak Bencana Iklim. Pada tataran perencanaan juga sedang ditetapkan dan melaksanakan aksi kolaboratif dalam rangka mitigasi dan adaptasi bencana iklim dengan mitra strategis. Sedangkan untuk dokumen perencanaan lainnya juga saat ini pemerintah sedang melakukan penyempurnaan draft Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dan pencantuman Raperda RUED dalam Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah), pemerintah juga sedang melakukan penyusunan dan publikasi rencana kontinjensi bencana perubahan iklim untuk 5 wilayah administrasi dan Kepulauan Seribu. Hal ini termasuk juga dalam lingkup pengembangan strategi komunikasi publik yang efektif dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, termasuk peningkatan kesadaran warga.

Adapun pada tingkat monitoring, pemerintah berupaya memantau penerapan green building khususnya pada gedung baru. Upaya lain yang lebih konkret juga dilakukan pemerintah dengan melakukan penanaman mangrove dan transplantasi karang di Jakarta termasuk juga meningkatkan penggunaan energi baru dan terbarukan dengan menggunakan PLTS Rooftop (di 34 titik Gedung Pemerintah Daerah).

Tujuan 14 Ekosistem Lautan Keadaan dan Kecenderungan

Provinsi DKI Jakarta memiliki luas lautan sebesar 6.997,50 km persegi, hampir 11 kali dari luas daratan, 661,52 km persegi. Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki 3 kerangka kebijakan, terdiri dari Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah; Kepgub Nomor 601 Tahun 2019 tentang Lokasi Daerah Perlindungan Laut sebagai Kawasan Konservasi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 13 Tahun 2014 Pengawasan Dan Pengendalian Kegiatan Reklamasi Dan Pemanfaatan Ruang Di Perairan Laut Pantai Utara Jakarta. Hal ini terkait indikator tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut (indikator 14.2.1.(a)), Status pencapaian indikator ini adalah tercapai. Sesuai Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 601 Tahun 2019 tentang Lokasi Daerah Perlindungan Laut sebagai Kawasan Konservasi Di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu memiliki 6 lokasi yang dilindungi, yaitu Pulau Pari, Pulau Payung, Pulau Pramuka, Pulau Kelapa, Pulau Tidung Lestari dan Pulau Harapan.

Perubahan Iklim memberi berbagai dampak terhadap kehidupan. Salah satunya adalah terkait kenaikan permukaan air laut. Muka permukaan tanah di pesisir DKI Jakarta mengalami penurunan dari tahun 1925-2015 sebesar 0-4 meter. Penurunan tanah dan naiknya permukaan air laut akibat perubahan iklim akan dapat menenggelamkan pulau-pulau dan daratan di pesisir Jakarta. Penanaman pohon bakau sangat penting untuk menghindarkan bibir pantai dari gelombang laut yang dapat mengikis pesisir, tegakan tanaman Bakau dapat menjadi penghalang abrasi dengan mengurangi laju gelombang air laut sebagai salah satu dampak kenaikan permukaan air laut. Hutan Bakau juga bermanfaat dalam menjaga ekosistem pesisir. Hutan Bakau menjadi ekosistem tersendiri bagi berbagai macam fauna yang ada di daratan maupun laut. Beragam spesies ikan, udang, kepiting dapat memanfaatkan akar-akar bakau

untuk tempat tinggal, dan sebagai tempat mencari makanan.

Tujuan 14 TPB/SDGs, juga selaras dengan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) No. 46 yaitu menjadikan Kepulauan Seribu sebagai pusat konservasi ekologi. Target KSD No.46 berupa pembibitan dan Penanaman mangrove sebanyak 70.000 pohon pada tahun 2021. Hingga bulan Juni 2021, realisasi target penanaman mangrove sudah mencapai 54,28% atau sekitar 38.000 pohon.

Pada indikator terkelolanya 11, wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan (14.2.1.(b)), Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Provinsi DKI Jakarta berada di dalam WPPNRI 712 meliputi perairan Laut Jawa. Terkait indikator kawasan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitasi (Indikator 14.5.1*#), Provinsi DKI Jakarta, khususnya di Kabupaten Kepulauan Seribu yang termasuk di dalamnya Kawasan Suaka Marga Satwa Laut Marine Wildlife Reserve Pulau Rambut dan Perairan seluas 90 hektar dan Taman Nasional Laut Marine National Park (MOF) Kepulauan Seribu seluas 107.489 hektar. Tantangan pada kawasan ini terutama terkait dengan ancaman dampak Perubahan Iklim seperti coral bleaching dan naiknya suhu air laut yang dapat menjadi ancaman terhadap Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati biota laut. Ancaman ini berpotensi menghilangkan keanekaragaman hayati di Kawasan Kepulauan Seribu.

Hasil survei Koalisi Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) di beberapa provinsi pada pertengahan tahun 2021 menunjukkan kondisi perekonomian nelayan

telah membaik dibandingkan sebelumnya. Salah satu indikasinya, sebanyak 78,43% hasil tangkapan nelayan dapat terserap pasar⁸. Melalui penjualan tersebut nelayan mendapatkan pemasukan di tengah berbagai kebijakan pembatasan karena pandemi Covid-19. Meski responden dari berbagai provinsi, temuan tersebut menjadi gambaran kondisi sosial-ekonomi nelayan di Provinsi DKI Jakarta.

Di Provinsi DKI Jakarta, perlindungan untuk nelayan, termasuk memastikan adanya skema asuransi bagi nelayan di masa-masa sulit seperti pandemi Covid-19 masih menjadi salah satu tantangan. Per semester I tahun 2021, sejumlah 3.258 nelayan ber-KTP Provinsi DKI Jakarta telah memiliki asuransi, sebagai bagian dari kebijakan Kartu Nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selain itu, memastikan kelestarian ekosistem lautan juga menjadi faktor pendukung penting bagi kesejahteraan nelayan, terutama menjaga wilayah tangkap nelayan tradisional tetap seimbang dan produktif. Upaya-upaya rehabilitasi maupun konservasi di sekitar wilayah tangkap menjadi tantangannya. Selain itu, penegakan hukum bagi nelayan yang berlebihan dalam menangkap ikan menjadi tantangan lain yang sebaiknya diperhatikan.

Tantangan dan Pembelajaran

Pada 2021 sempat ada studi yang berjudul *High concentrations of paracetamol in effluent dominated waters of Jakarta Bay*, dari Marine Pollution Bulletin, studi tersebut menemukan bahwa terdapat kandungan paracetamol yang tinggi di teluk Jakarta. Terdapat konsentrasi tinggi parasetamol di Angke, yaitu 610 nanogram per liter, dan Ancol 420 ng/L, yang berada di Teluk Jakarta. Hal ini menjadi ancaman bagi ekosistem laut di wilayah tersebut. Hal ini dapat memberikan berbagai macam dampak buruk bagi lingkungan diantaranya kerang dan ikan laut yang bermerkuri,

⁸. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210708/99/1415312/survei-knti-ekonomi-nelayan-membaik-di-tengah-pandemi-ini-sebabnya>

rusaknya terumbu karang, kualitas air tanah yang memburuk, juga dapat membawa penyakit bagi wilayah sekitar. Untuk itu tantangan bagi pemerintah untuk dapat melakukan tindak lanjut beserta upaya preventif untuk menjaga ekosistem laut tersebut.

Kebijakan dan Strategi

Program penyediaan pangan bersubsidi dari DKPKP Provinsi DKI Jakarta menysasar masyarakat miskin rentan, salah satunya nelayan. Pada Oktober 2021, pendistribusian pangan bersubsidi dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Seribu, serentak di 9 pulau, termasuk Pulau Sebira. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Pasar Jaya, *Food Station* dan Bank DKI menyelenggarakan penjualan pangan di gerai-gerai terpilih yang mudah dijangkau. Masyarakat yang telah terdaftar dapat mengakses untuk membeli pangan bersubsidi yang disediakan.

Selain itu, konservasi ekosistem laut masih terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik melalui pemulihan terumbu karang dan penanaman mangrove. Salah satu contohnya inisiatif dari Dinas Pertamanan dan Kehutanan Kota yang berkolaborasi dengan Apical Group—perusahaan pengolah minyak kelapa sawit berkelanjutan—melakukan rehabilitasi mangrove.

Kolaborasi tersebut menargetkan beberapa kawasan di Jakarta Utara, salah satunya Pantai Muara Karang yang memiliki kawasan konservasi seluas delapan puluh hektare. Selain kawasan tersebut, Apical Group berencana mendukung dua kawasan konservasi mangrove lainnya yaitu Hutan Kota Cilincing dan Hutan Kota Rorotan. Selain program restorasi, Apical Group juga akan melibatkan masyarakat sekitar untuk menanam bibit mangrove, memberikan edukasi tentang pentingnya konservasi mangrove, dan program pengembangan masyarakat yang dapat dihasilkan dari kawasan

konservasi, seperti budidaya lebah trigona, program daur ulang, dan lain sebagainya. Dalam kegiatan penanaman mangrove ini, Apical juga menggandeng Pramuka Sakawanabakti yang bergerak di bidang kehutanan sebagai generasi penerus bangsa dan agen pelestarian lingkungan dan alam⁹.

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Dalam upaya percepatan pencapaian TPB/SDGs untuk ekosistem lautan telah dilakukan beberapa upaya konservasi diantaranya melalui pembibitan karang di Provinsi DKI Jakarta, capaian pada 2021 mencapai 12.000 bibit hal ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 dengan luasan yang terehabilitasi mencapai 45.070 m²/ 4,5 ha. Terdapat pula upaya Rehabilitasi Mangrove di DKI Jakarta dengan capaian mencapai 70.000 bibit pada 2021 dengan luasan yang terehabilitasi mencapai 224.698 m²/22,5 ha. Penanaman mangrove ini dilakukan melalui berkolaborasi dengan elemen masyarakat diantaranya berasal dari instansi pemerintahan, perguruan tinggi, sekolah, komunitas peduli lingkungan, LSM, wisatawan, dan masyarakat umum. Pemerintah juga memiliki program konservasi karang dan fish shelter Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah juga berencana menjadikan Kepulauan Seribu sebagai Pusat Ekologi Konservasi.

Tujuan 15 Ekosistem Daratan

Keadaan dan Kecenderungan

Indikator Penambahan jumlah fauna yang dikonservasi (15.5.1*# dan 15.7.1.(b)#) adalah indikator penting terkait satwa/fauna yang dikonservasi. Fatwa yang dikonservasi juga dapat dipelihara dalam lembaga konservasi ex situ seperti di Taman Margasatwa Ragunan. Pada tahun 2020, jumlah fauna yang di konservasi di Taman Margasatwa Ragunan mencapai 2.296 ekor. Pada tahun 2021, jumlah ini menurun menjadi 2.292 ekor hingga bulan Juni 2021.

⁹. <https://sumatra.bisnis.com/read/20211227/534/1482130/apical-group-bersama-pemda-selamatkan-mangrove-di-dki-jakarta>

Taman Margasatwa Ragunan menjadi pusat penelitian satwa-satwa langka yang ada di Indonesia. Para peneliti, mahasiswa dari pendidikan dalam/luar negeri dapat melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan satwa, tumbuhan, lingkungan sebagai bahan untuk kajian ilmiah. Selain itu, Taman Margasatwa Ragunan merupakan tempat yang tepat bagi pelajar dari TK sampai Perguruan Tinggi untuk mengenal/mengetahui dan mengamati satwa dari dekat, dibandingkan harus di hutan/habitat aslinya.

Lembaga yang memelihara satwa pada taman margasatwa harus disertai tanggung jawab terhadap pemenuhan kesejahteraan satwa. Sebagaimana mandat Pasal 83 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, disebutkan bahwa Kesejahteraan Hewan dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan Hewan yang meliputi bebas dari rasa lapar dan haus; dari rasa sakit, cedera, dan penyakit; dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dari rasa takut dan tertekan; dan untuk mengekspresikan perilaku alaminya.

Indikator Penambahan jumlah flora yang dikonservasi (15.5.1*# dan 15.7.1.(b)#) adalah indikator penting terkait tanaman di DKI Jakarta, termasuk terkait Pohon. Pada tahun 2020, jumlah flora yang di konservasi mencapai 64.994 tanaman. Hingga bulan Juni 2021, jumlah ini menurun menjadi 64.982 tanaman. Namun, pencapaian ini masih di atas target RAD DKI Jakarta sebesar 52.813 pada tahun 2021.

Indikator Penambahan Rasio RTH (15.1.1.(a)#) memiliki target sebesar 0,0115% pada tahun 2020 dan 0,0115% pada tahun 2021. Namun, Pencapaian tahun 2020 adalah 0 dikarenakan adanya penyesuaian anggaran pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus dalam Indikator 15.1.1.(a)#. Per tahun 2021, di Jakarta terdapat 2.556 titik Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan luas lebih dari 1.800 hektar yang dikelola langsung oleh Dinas Pertamanan dan

Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta. Keberadaan RTH ini sangat diperlukan di tengah keterbatasan lahan yang ada sedangkan penambahan luas RTH sangat dibutuhkan terlebih di musim hujan. Kenaikan curah hujan terjadi akibat dari La Nina, perkiraan BMKG La Nina berlangsung dari November 2021 hingga Februari 2022.

Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa proporsi RTH pada setiap kota minimal 30 persen dari luas wilayah kota, sedangkan saat ini di Jakarta proporsinya bahkan tidak sampai 10 persen. Konsep Ruang Terbuka Hijau dalam bentuk taman kolaboratif antara masyarakat sekitar dan pemerintah juga termanifestasikan dari Program Taman Maju Bersama yang dibangun Pemda DKI. Saat ini Pemprov DKI Jakarta juga membangun 69 taman maju bersama (TMB), Terdapat 69 TMB di Jakarta yang tersebar di Jakarta Barat (10 TMB), 21 TMB di Jakarta Selatan, 12 TMB di Jakarta Utara, dan 26 TMB di Jakarta Timur. TMB terbaru yang hendak diresmikan yakni Tebet Ecopark¹⁰. Taman ini merupakan hasil proses revitalisasi Taman Tebet di Jakarta Selatan yang mengedepankan fungsi ekologi dan sosial juga sekaligus sebagai ruang edukasi. Restorasi dilakukan secara ekologis, Tebet Eco Park merupakan TMB Grande ketiga yang direvitalisasi setelah TMB Mataram dan TMB Puring.

Tantangan dan Pembelajaran

Salah satu tantangan besar dalam pencapaian target-target pada tujuan 15 yakni menambah luasan ruang terbuka hijau di Jakarta, hal ini menjadi tantangan karena sebagian besar lahan tentu dimiliki oleh sektor privat, jadi yang bisa dimulai untuk dari pemerintah sendiri bisa dimulai dari membangun RTH di ranah aset yang sudah dimiliki. Keberadaan RTH ini juga berdampak bagi ekosistem secara umum di suatu wilayah. Tantangan besar lainnya ada dari potensi kehilangan keanekaragaman hayati akibat pencemaran lingkungan yang terjadi, hal ini diakibatkan oleh perubahan habitat,

¹⁰. <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/01/10/15162921/perkenalkan-tebet-eco-park-anies-merestorasi-fungsi-taman-secara-ekologi>

masuknya spesies asing invasif, pencemaran, eksploitasi berlebihan dan perubahan iklim.

Kebijakan dan Strategi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim (RPRKD) yang sudah mempertimbangkan sisi mitigasi dan adaptasi sekaligus. Untuk beberapa langkah mitigasi yang sudah dilakukan diantaranya pemilahan sampah di sumber, program Kantong Belanja Ramah Lingkungan, pengujian emisi, *Low Emission Zone* (LEZ), pembuatan lubang biopori dan sumur resapan. Selain itu terus dibangun dan dipelihara RTH yang memiliki kolam retensi sebanyak 94 lokasi yang terdiri atas taman, hutan kota, kebun bibit, dan bumi perkemahan Ragunan.

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Sepanjang tahun 2021 pemerintah DKI Jakarta telah berupaya memperbanyak Ruang Terbuka Hijau di berbagai area di Jakarta salah satunya melalui program Taman Maju Bersama. Berbagai upaya percepatan capaian dalam Tujuan 15 sudah dilakukan diantaranya melakukan pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) dan penetapan Kawasan Ekosistem Esensial untuk pengawetan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati, juga upaya Restorasi ekosistem dan penanaman tanaman nusantara khas Jakarta, peningkatan budidaya dan pengembangan fungsi pekarangan. Pemerintah juga mengupayakan pembangunan konektivitas RTH perkotaan untuk konservasi keanekaragaman hayati. Kemudian secara spesifik untuk mempertahankan daya dukung lingkungan dan mencegah berkurangnya keanekaragaman spesies, Pemerintah DKI Jakarta juga mengupayakan peningkatan resiliensi ekosistem terumbu karang, rehabilitasi ekosistem mangrove, pembinaan habitat dan perlindungan spesies dilindungi atau terancam punah, pengendalian spesies asing, invasif atau predator dan juga pengendalian faktor pengganggu di dalam kawasan hutan.

Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Tangguh

Kadaan dan Kecenderungan

Pada sebagian indikator dalam tujuan 16, terutama berkaitan dengan aspek tata kelola pemerintah maupun layanan kependudukan mengalami tren peningkatan yang signifikan. Di sisi lain, aspek kesetaraan gender (termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak) serta jaminan rasa aman bagi warga masih membutuhkan perhatian khusus.

Pada indikator-indikator terkait tata kelola pemerintah, Provinsi DKI Jakarta berhasil meningkatkan capaiannya. Pada indikator 16.6.1 (a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), Provinsi DKI Jakarta berhasil mempertahankan predikat WTP selama 5 tahun berturut-turut (tahun 2017-2021). Pencapaian ini didukung dengan peningkatan capaian indikator 16.6.1 (b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), di mana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil meraih predikat A pada tahun 2021. Meningkat dari pencapaian tahun 2018 hingga 2020 yang masih berpredikat BB. Kemudian, untuk indikator 16.6.1 (d) Indeks Reformasi Birokrasi, skor yang didapat terus meningkat sejak tahun 2018. Pada tahun 2021, nilai yang didapat sebesar 78,88. Meningkat dari tahun 2020 sebesar 76,54 dan tahun 2019 sebesar 74,57. Tren dua indikator tersebut menunjukkan peningkatan tata kelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Hal serupa juga terjadi pada indikator 16.6.2 (a) persentase kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik, pada tahun 2021 berhasil mempertahankan predikat zona hijau dengan nilai sebesar 88,73. Pada tahun 2017, Provinsi DKI Jakarta meraih predikat sama pada tahun 2017 dengan skor 100. Meski terdapat penurunan pada nilai, namun masih berada dalam zona hijau.

Selain itu, indikator 16.6.2 (a) indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik juga meningkat pada tahun 2020 dengan perolehan poin 86,34.

Pencapaian tersebut meningkat dari tahun-tahun sebelumnya sebesar 83,76 pada tahun 2018 dan 84,41 pada tahun 2019. Sejak tahun 2018 hingga 2020, pencapaian tersebut telah melampaui target RAD. Sebagai contoh, target RAD pada tahun 2020 sebesar 86,00 sementara pencapaian sebesar 86,34.

Pada tata kelola data kependudukan, indikator 16.9.1 persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil pada tahun 2021 mencapai 98,87%, meningkat cukup signifikan dari tahun 2020 sebesar 83,21% dan tahun 2019 sebesar 78,87%. Pencapaian tersebut juga telah melampaui target RAD tahun 2021 sebesar 82,9%.

Selanjutnya aspek kriminalitas juga mengalami tren yang membaik. Indikator 16.61.1 (a) jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir, tahun 2020 Polda Metro Jaya mencatat terdapat 32 kasus, menurun dari tahun 2019 sebanyak 36 kasus dan 2018 sebanyak 75 kasus. Pencapaian tersebut telah melampaui target RAD, sebut saja pada tahun 2020 ditargetkan terdapat 51 kasus dan realisasinya di tahun yang sama sebesar 32 kasus.

Hal senada juga terjadi pada indikator 16.1.3 (a) proporsi penduduk yang menjadi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir. Pada tahun 2020 tercatat 0,07%, menurun dari tahun 2019 sebesar 0,11% dan 2018 di angka 0,12%. Selain itu, dibandingkan dengan target RAD, sejak tahun 2018, Provinsi DKI Jakarta telah melampaui target. Seperti target tahun 2020 sebesar 0,98% dan realisasi tahun 2020 sebesar 0,07%.

Tren lompatan pencapaian terjadi pada indikator 16.3.1 (a) Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi. Tercatat pada tahun 2019 berada di angka 14,76% dan pada tahun 2020 melejit naik ke 73,26%. Angka tersebut jauh melampaui target RAD tahun 2020 sebesar 55,65%. Tren demikian berpotensi

dijadikan rujukan praktik bagi pencapaian indikator-indikator lain.

Sisi lain, terdapat beberapa indikator dalam aspek keamanan yang perlu perhatian khusus. Indikator 16.1.2 (a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk mendapatkan nilai 0,08 pada tahun 2021. Meningkat dibandingkan nilai pada tahun 2020 sebesar 0,07. Sementara itu, indikator 16.1.4 proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya menunjukkan adanya penurunan. Tahun 2017 sebesar 52% penduduk merasa aman, sementara pada tahun 2020 menjadi sebesar 41,17%. Kemudian, indikator 16.1.2 (a) kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk naik ke angka 0,08 pada tahun 2021 dari 0,07 di tahun 2020. Namun, jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019 angkanya lebih tinggi yakni 0,11.

Pada aspek kesetaraan gender, beberapa indikator membutuhkan perhatian khusus. Indikator 16.7.1 (b) persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) menunjukkan adanya penurunan angka dari tahun 2020 sebesar 26% ke angka 18,82% di semester I tahun 2021. Kemudian, indikator 16.2.1 (b) prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan perempuan menunjukkan peningkatan laporan kasus dari 650 pada tahun 2019 ke angka 787 pada tahun 2020. Sementara, indikator 16.2.1 (b)# prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak juga meningkat dari 1.179 laporan kasus pada tahun 2019 ke 1.297 laporan kasus di tahun 2020.

Tantangan dan Pembelajaran

Pembatasan aktivitas karena pandemi masih menjadi tantangan utama bagi pencapaian tujuan 16. Meski tidak berdampak secara langsung, penyesuaian berbagai hal dalam tata kelola pemerintah tetap dibutuhkan, termasuk bagaimana memastikan tata kelola yang responsif terhadap kondisi pandemi. Tantangan selanjutnya, layanan publik yang dilaksanakan secara daring membutuhkan strategi tata kelola agar dapat menjangkau seluruh

kelompok masyarakat, termasuk kelompok miskin-rentan. Ketiga, tantangan meningkatnya kekerasan terhadap kelompok rentan, terutama perempuan dan anak.

Pada tantangan yang pertama, Pemprov DKI Jakarta mengoptimalkan fungsi dari teknologi informasi dalam mendukung pengelolaan layanan publik. Salah satu terobosannya dengan mengoptimalkan aplikasi JAKI untuk memastikan masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan, program maupun pelaksanaannya. Pada Juni 2021, Diskominfo DKI Jakarta merilis hasil survei terhadap ribuan responden yang menggunakan kanal-kanal resmi aduan masyarakat. Salah satu temuannya, JAKI menjadi platform paling favorit bagi warga untuk menyampaikan aduan. Lebih dari separuh responden menggunakan JAKI. Selama pandemi, masyarakat terbantu dengan adanya kanal-kanal aduan secara daring.

Kebijakan dan Strategi

Penguatan tata kelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berlangsung sepanjang tahun 2021. Dalam pengawasan internal, Gubernur menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 564 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengawasan Intern, Semesta Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 2021. Melalui regulasi tersebut, Inspektorat dan perangkat daerah lain akan mengimplementasikan strategi pengawasan berbasis risiko (*risk based audit plan*).

Dalam panduan yang disusun oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)¹¹ strategi pengawasan berbasis risiko hendak menyusun pemetaan terhadap sektor-sektor dan program-program prioritas dari pemerintah berdasarkan skala dan risiko program kerja. Selanjutnya pemerintah akan membuat peringkat prioritas pengawasan terhadap program kerja. Diharapkan dengan strategi ini, Pemprov DKI

Jakarta dapat melakukan pencegahan risiko praktik maladministrasi.

Sisi lain, reformasi birokrasi yang terus dioptimalkan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui insentif dan *merit system* menjadi faktor penting yang mendukung efektifnya pengawasan. Melalui pemberian insentif berdasarkan kinerja para ASN berpotensi mengoptimalkan pelayanan publik. Kemudian, pelaksanaan *merit system* dalam promosi jabatan juga menjadi daya dukung yang tak kalah penting, terutama dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik.

Selama pandemi terdapat beberapa kebijakan yang membutuhkan strategi pengawasan yang tepat mengingat, salah satunya kebijakan perlindungan sosial. Dengan semakin beragamnya bentuk perlindungan, baik secara tunai, bantuan pangan dan lainnya tantangan pengawasan juga semakin meningkat. Tak hanya itu, alokasi anggaran dan jumlah penerima manfaat yang besar berpeluang untuk salah sasaran maupun diselewengkan. Strategi pengawasannya tentu saja tak bisa hanya mengandalkan pada pengawasan internal, masyarakat juga turut dilibatkan mengawasi secara partisipatif melalui sistem aduan dalam aplikasi JAKI, maupun kanal-kanal resmi lain. Strategi demikian perlu dioptimalkan ke depan.

Selanjutnya strategi untuk meningkatkan keamanan, terutama tawuran, Bakesbangpol menggunakan pendekatan pendidikan dan peningkatan kapasitas warga. Melalui sinergi dengan OPD lain yang relevan, Bakesbangpol menginisiasi agar anak-anak yang putus sekolah diberikan kesempatan untuk mengejar paket. Kemudian untuk pemuda pada usia angkatan kerja akan diberikan pelatihan keahlian tertentu di Balai Latihan Kerja (BLK) atau Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) milik Pemprov DKI Jakarta. Strategi tersebut membutuhkan dukungan dari Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga maupun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

¹¹. <https://apip.bpkp.go.id/pedoman/Pedoman/P08-Pedoman-Perencanaan-Pengawasan-Berbasis-Risiko.pdf> diakses pada 17 Maret 2022, pukul 14.00

Sementara itu, untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan, Pemprov DKI Jakarta beserta organisasi nonpemerintah melaksanakan beberapa strategi, seperti penguatan regulasi hingga kampanye. Terbitnya Surat Edaran Nomor 7/SE/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindakan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan bentuk penguatan melalui regulasi. Di dalamnya dipertegas bentuk dan jenis pelecehan seksual di lingkungan kerja, sekaligus mendorong pimpinan perangkat daerah untuk lebih berkomitmen menjaga lingkungan kerja bebas kekerasan seksual.

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menandatangani nota kesepakatan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan pada korban dan saksi kekerasan berbasis gender¹². Hal ini berpeluang mengoptimalkan jaminan perlindungan bagi korban kekerasan saat melapor dan meminimalkan kekhawatiran atau ketakutan dari korban untuk melapor.

DPPAPP bekerja sama dengan nonpemerintah telah melakukan beberapa inisiatif yang mendukung penghapusan kekerasan seksual di Provinsi DKI Jakarta. Salah satunya Peluncuran Pos Sapa di Universitas Atma Jaya, Jakarta. Melalui inisiatif ini, perguruan tinggi juga terlibat secara aktif menghapus praktik kekerasan seksual.

Selain itu, inisiatif lain datang dari LRT Jakarta, DPPAPP dan Loreal untuk melaksanakan edukasi tentang kekerasan seksual di ruang publik. Tujuannya untuk mengarusutamakan isu kekerasan seksual di ruang publik, sekaligus memberikan pemahaman pada seluruh pekerja di LRT Jakarta. Rangkaian acara edukasi berjalan selama beberapa minggu yang juga melibatkan figur-figur publik yang selama ini aktif dalam kampanye tentang kekerasan seksual.

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Dalam rangka percepatan pencapaian indikator-indikator tujuan 16, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan beberapa terobosan. Pada aspek tata kelola, penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan hingga aset terus dilakukan. Terdapat beberapa langkah yang akan diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, antara lain.

1. Pembenahan sistem perencanaan dan penganggaran daerah melalui implementasi Sistem Informasi Smart Planning and Budgeting;
2. Pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai tindak lanjut implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Pembenahan penatausahaan aset daerah, dengan melakukan penyempurnaan pengembangan Sistem Informasi Aset Daerah dan percepatan penyelesaian permasalahan aset melalui Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah;
4. Peningkatan dan Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pelaksanaan APBD melalui pengawasan melekat Kepala SKPD dan pengawasan oleh Inspektorat;

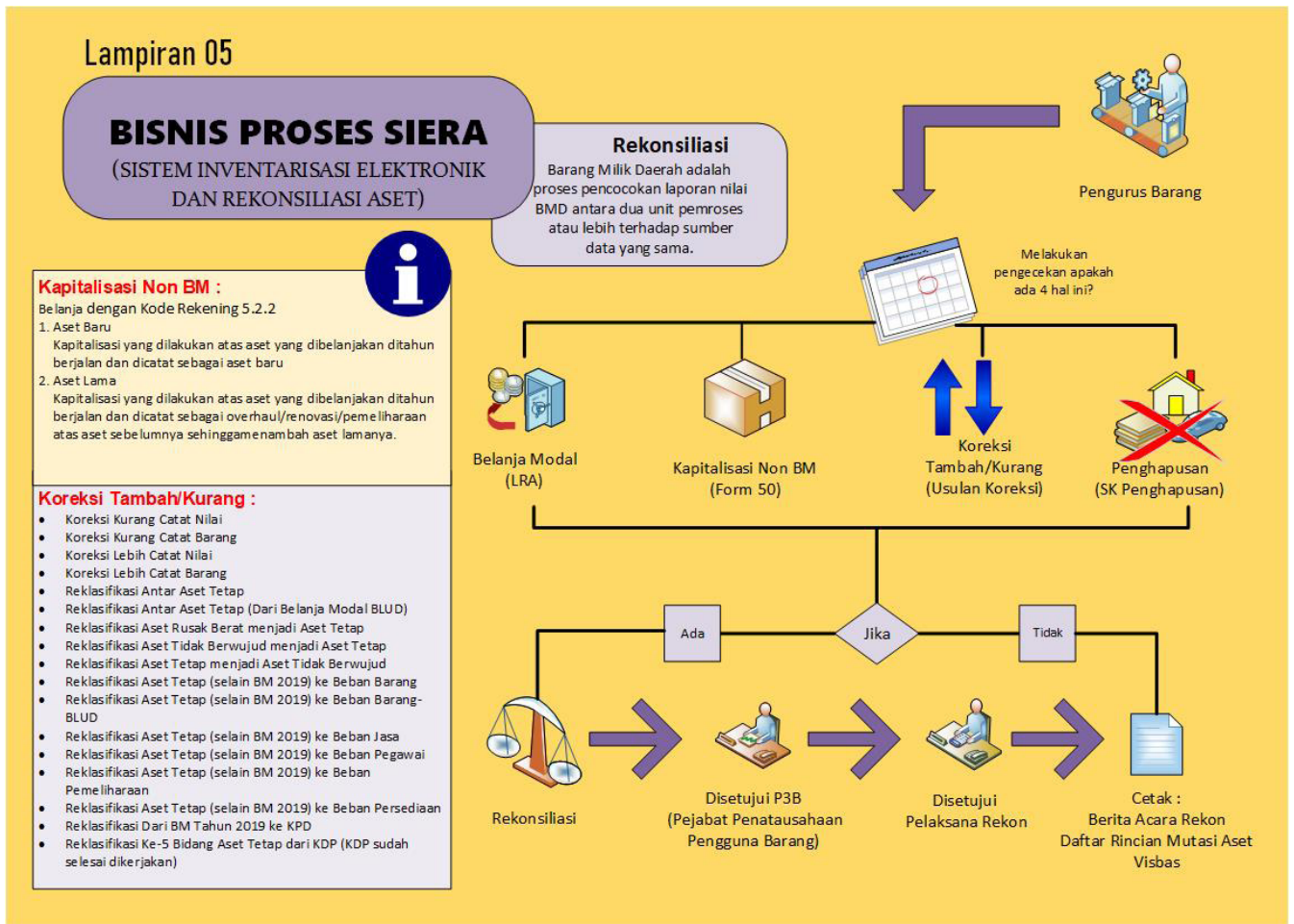
Dalam hal mengoptimalkan pengelolaan aset, Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) memiliki portal terpadu sistem informasi aset (aset.jakarta.go.id). Selain berfungsi untuk mencatat aset-aset pemerintah, portal tersebut juga memiliki Sistem Inventarisasi Elektronik dan Rekonsiliasi Aset (SIERA) untuk menyinergikan data-data aset di berbagai perangkat daerah. Ke depan, publik juga dapat mengakses informasi tentang aset melalui portal tersebut, namun per Juni 2022 masih dalam tahap pengembangan.

Selanjutnya, dalam pengawasan, Inspektorat memiliki sistem Jakarta Pengawasan (JakWas) yang dapat diakses melalui portal <https://jakwas.jakarta.go.id/aplikasi/pengawasan>. Dalam portal tersebut terdapat

¹². <https://www.beritasatu.com/megapolitan/865655/dki-terus-perangi-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak>

Gambar 3.26

Bagan Alur SIERA BPAD Provinsi DKI Jakarta



Sumber: aset.jakarta.go.id/siera

berbagai aplikasi yang mendukung pengawasan, mulai dari aplikasi yang merekam proses audit hingga aplikasi untuk mendukung Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Sementara sebagian aplikasi lain masih dalam tahap pengembangan.

Beberapa langkah tersebut menjadi terobosan yang dapat mengoptimalkan keterbukaan dan transparansi tata kelola di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ke depan dibutuhkan mengoptimalkan proses integrasi data-data dari perangkat daerah, mulai dari aset, hingga data pengadaan barang dan jasa (*procurement*). Dengan ini diharapkan proses pengawasan akan semakin efektif dan optimal ke depan.

Terakhir, dalam rangka mendukung tata kelola yang

baik, layanan dokumen kependudukan juga terus dilakukan penguatan. Pada awal tahun 2022, Disdukcapil meluncurkan layanan cepat pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP. Dalam program tersebut, Disdukcapil mengoptimalkan waktu pelayanan selama 15 menit untuk mengurus sebagian dokumen kependudukan.

Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Keadaan dan Kecenderungan

Pemulihan ekonomi sepanjang semester II - 2021 berdampak positif terhadap kinerja fiskal Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta tercatat bahwa realisasi penerimaan pajak daerah (indikator 17.1.1*#(1)) per 31 Desember 2021 mencapai Rp 34,51

triliun, tumbuh 175,69% dibandingkan realisasi per 30 Juni 2021 yang sebesar Rp12,52 triliun. Selain itu, realisasi penerimaan retribusi daerah (indikator 17.1.1*(2)) per 31 Desember 2021 menyentuh angka Rp 383,43 miliar, bertambah 92,2% dibandingkan realisasi per 30 Juni 2021 yang mencapai Rp 199,49 miliar.

Sementara itu dari sisi belanja, realisasi belanja daerah (indikator 17.1.1*(2.2)) hingga 31 Desember 2021 telah mencapai Rp 61,35 triliun atau tumbuh 169,6% dibandingkan realisasi per 30 Juni 2021 sebesar Rp 25,08 triliun. Dengan capaian penerimaan pajak dan belanja daerah tersebut maka total pendapatan daerah sebagai proporsi terhadap belanja daerah (indikator 17.1.1*(3)) per 31 Desember 2021 mencapai 106,93% . Adapun rasio penerimaan pajak daerah terhadap PDRB DKI Jakarta (indikator 17.1.1.(a)#) per 31 Desember 2021 mencapai 1,19%. Sedangkan proporsi APBD yang didanai oleh pajak daerah (indikator 17.1.2*#) per 31 Desember 2021 mencapai 56,25%.

Tantangan dan Pembelajaran

Untuk mendukung momentum pemulihan ekonomi maka Pemprov DKI Jakarta fokus dalam menjalankan agenda pembangunan yang tercermin dari realisasi belanja

daerah hingga akhir tahun 2021 sebesar Rp61,35 triliun.

Dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 -2022, belanja daerah tahun 2021 diarahkan untuk pemenuhan belanja prioritas dalam kerangka kesinambungan implementasi *money follow priority program*. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menitikberatkan anggaran belanja daerah tahun 2021 untuk perlindungan sosial dalam rangka pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19 melalui anggaran belanja bantuan sosial yang bertambah Rp 1,8 triliun dari tahun sebelumnya.

Selain itu, di tengah keterbatasan anggaran tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga melanjutkan kebijakan *refocusing* anggaran sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih prioritas untuk kebutuhan warga. Dengan kebijakan anggaran yang pro terhadap upaya penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi sosial maka diharapkan berdampak positif terhadap pendapatan daerah.

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan sejumlah insentif fiskal untuk tahun 2021 yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 60 Tahun 2021 tentang Insentif Fiskal Tahun 2021. Kebijakan insentif fiskal diberikan dalam bentuk

Tabel 3.5

Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2021

Keterangan	Realisasi 30 Juni 2021	Realisasi 31 Desember 2021	Pertumbuhan (%)
Jumlah Penerimaan Pajak Daerah (Rp triliun)	12,52	34,51	175,69
Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah (Rp miliar)	199,49	383,43	92,20
Jumlah Pendapatan Daerah (Rp triliun)	25,08	65,60	161,58
Jumlah Belanja Daerah (Rp triliun)	22,76	61,35	169,60
Total Pendapatan Daerah sebagai Proporsi terhadap Belanja Daerah (%)	110,21	106,93	
Rasio penerimaan pajak daerah terhadap PDRB (%)	0,43	1,19	
Proporsi APBD yang didanai oleh Pajak Daerah (%)	40,31	44,52	

Sumber: BPKD DKI Jakarta, 2021

penghapusan sanksi administrasi untuk piutang PKB, optimalisasi penerimaan BBN-KB, dan pengurangan pokok dan piutang serta penghapusan sanksi administrasi PBB.

Kebijakan dan Strategi

Pandemi Covid-19 di wilayah DKI Jakarta kian terkendali. Hal ini menjadikan momentum yang tepat bagi Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pemulihan ekonomi dan fiskal daerah. Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemulihan ekonomi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat meminimalkan penggunaan APBD dengan melakukan kerja sama investasi dengan Perusahaan Pemerintah maupun Swasta.

Terdapat 2 (dua) proyek yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai rencana investasi Provinsi DKI Jakarta sesuai surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta (telah memiliki *Feasibility Study/FS*) adalah pembangunan *Intermediate Treatment Facility* (ITF) Sunter dan pembangunan *Light Rail Transit* (LRT) Fase 2a (Kelapa Gading-JIS).

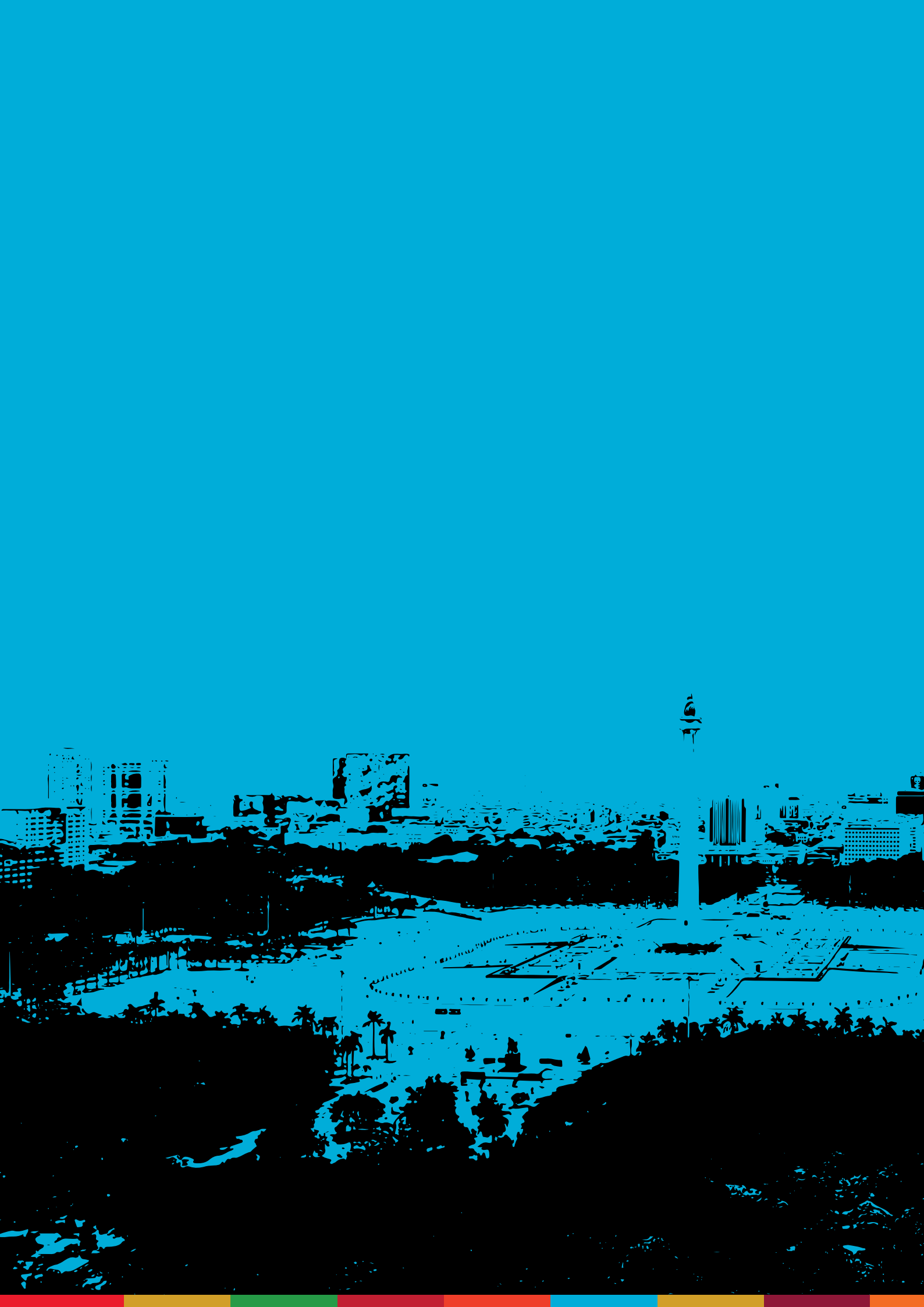
Kedua proyek tersebut sejalan dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD tahun 2005 – 2025. Proyek *Intermediate Treatment Facility* (ITF) Sunter dan Pembangunan *Light Rail Transit* (LRT) Fase 2a (Kelapa Gading - JIS) dan Fase 2b (Velodrome - Klender). Proyek ITF Sunter sesuai dengan arah pembangunan Pengelolaan dan Pengendalian Sampah dan Limbah, sedangkan pembangunan LRT sesuai dengan arah pembangunan Sistem Transportasi yang Terpadu dan Terintegrasi.

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Kemitraan atau kolaborasi antar unsur masyarakat merupakan semangat yang terus dirawat dalam upaya mempercepat pencapaian SDGs di seluruh tujuan dan indikator. Semangat kemitraan ini terefleksi dalam

berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemprov DKI Jakarta. Salah satu upaya yang tengah didorong adalah pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU). Selain membantu penyiapan studi kelayakan suatu proyek, Pemprov DKI Jakarta juga berkomitmen mengalokasikan anggaran untuk tahap persiapan KPDBU tersebut.

Kemudian upaya untuk memulihkan penerimaan pajak di tengah tekanan ekonomi saat ini dilakukan dengan fokus pada pengendalian pandemi COVID-19 dan pemberian stimulus kepada masyarakat dan dunia usaha. Harapannya, dengan adanya prioritas terhadap aspek keselamatan warga dan bantuan untuk meringankan pengeluaran rumah tangga terdampak maka pada gilirannya ekspektasi terhadap pemulihan ekonomi juga bisa terwujud. Ketika aktivitas bisnis dan ekonomi mulai berangsur pulih diharapkan penerimaan pajak daerah juga semakin membaik sehingga nantinya dapat didistribusikan kembali untuk mendanai pembangunan dan kesejahteraan warga di ibu kota.



Bab IV



Maju Kotanya, Bahagia Warganya



IV

Praktik-

Praktik Baik

4.1 Praktik Baik Pilar Pembangunan Sosial

Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Penyandang Disabilitas

Sebagai salah satu upaya memberikan perlindungan sosial bagi seluruh kelompok terutama kelompok miskin dan rentan, maka terhadap kelompok penyandang disabilitas diberikan bantuan atas pemenuhan kebutuhan dasar. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta memiliki tugas dan fungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di dalam maupun luar panti, salah satunya bagi penyandang disabilitas. Kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas telantar di luar panti sosial dipenuhi melalui bantuan sosial dalam bentuk dana langsung untuk menunjang biaya pemenuhan kebutuhan dasar yang diatur pada Peraturan Gubernur No. 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas.

Penerima manfaat PKD Penyandang Disabilitas menerima bantuan sosial sebesar Rp300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) per orang per bulan yang diatur dalam Keputusan Gubernur No. 410 Tahun 2020 tentang Besaran Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas. Melalui besaran tersebut, harapannya kebutuhan dasar seperti kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/atau pelayanan sosial dari kelompok penyandang disabilitas dapat terpenuhi. Pada penyelenggaraannya, dana PKD Penyandang Disabilitas disalurkan tiap triwulan dari rekening Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta ke masing-masing rekening penerima manfaat yang dapat dicairkan dengan KPDJ melalui ATM Bank DKI.

Pendistribusian Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta atau pemberian bantuan sosial bagi penyandang disabilitas ini menjadi salah satu bukti bahwa pemenuhan

hak dasar warga telah diselenggarakan dan diusahakan oleh pihak pemerintah. Untuk tahun 2021, data penerima KPDJ adalah sejumlah 11.422 dengan jumlah penerima baru sebanyak 1.897.

Dalam pendistribusian KPDJ dan penyaluran dana, ditemukan berbagai tantangan. Salah satunya adalah bahwa penerima manfaat sering kali kurang *familiar* dengan sosial media sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih luas dan mudah untuk dipahami agar warga yang memerlukan bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas dan menyeluruh.

Kegiatan ini dimungkinkan untuk direplikasi oleh instansi lain, dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar. Salah satunya adalah pemutakhiran data yang terus menerus dilakukan untuk menjangkau cakupan penerima manfaat yang lebih tepat sasaran. Pemutakhiran ini dilakukan oleh pendamping sosial yang ditugaskan di tiap kelurahan. Pemutakhiran data bukan merupakan proses yang mudah dan diperlukan waktu yang tidak sebentar.

4.2 Praktik Baik Pilar Pembangunan Ekonomi

Salah satu contoh inovasi yang mendukung infrastruktur transportasi publik di Jakarta adalah TIJE Apps yang dikembangkan oleh PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Pada 19 Agustus 2021, Transjakarta berhasil memenangkan penghargaan utama untuk kategori Product dan Model Bisnis untuk TIJE Apps sebagai platform bisnis dan layanan pelanggan terintegrasi. TIJE Apps merupakan platform digital yang menghadirkan fitur awal yakni Transfer tiket, Digital QR Ticketing, Smart Assistance, Estimasi kedatangan bus secara *real time*. Pada saat diluncurkan, kecepatan proses transfer tiket mencapai maksimal 5 (lima) menit dengan kapasitas internet yang memadai dan kecepatan *tap in* pada *gate* koridor yang tercatat hanya 2 (dua) hingga 3 (tiga) menit saja. Kemudian, pengembangan aplikasi terus dilakukan dengan kembali meluncurkan

sebanyak 6 (enam) fitur tambahan yang tidak kalah canggihnya serta ramah kesehatan yakni *homepage* dengan tampilan yang lebih simple dan menarik, Tjari bus, Tjari Rute, Informasi rute, Informasi Halte dan Loyalti-je. Menariknya, proses pembayaran semakin dimudahkan dengan pembayaran digital menggunakan E-wallet dari LinkAja dan AstraPay.

Gambar 4.1

TIJE Apps Meraih Penghargaan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia (ICAI) 2021



Sumber: Pemprov DKI Jakarta, 2021

4.3 Praktik Baik Pilar Pembangunan Lingkungan

Website Jakarta Rendah Emisi: Wadah Aksi Iklim di Jakarta

Pada 2021 lalu Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta meluncurkan website, sebagai bentuk upaya untuk menghadapi krisis iklim dan polusi udara. Laman rendahemisi.jakarta.go.id merupakan hasil kolaborasi dari banyak pihak diantaranya Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, +Jakarta, Vital Strategies juga Bloomberg Philanthropies. Laman Jakarta Rendah Emisi merupakan wadah informasi, berita, juga aksi yang merekam dan menyebarluaskan juga memperantarai komunitas agar secara bersama-sama kita bisa menjadikan Jakarta sebagai kota ramah lingkungan.

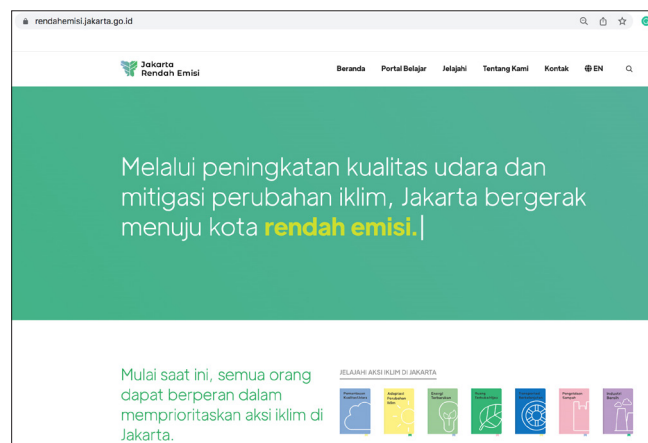
Dalam laman tersebut terdapat *section* yang

merangkum aksi iklim yang sudah dilakukan di Jakarta, dengan beberapa kategori yakni Pemantauan Kualitas Udara, Adaptasi Perubahan Iklim, Energi Terbarukan, Ruang Terbuka Hijau, Transportasi Berkelanjutan, Pengelolaan Sampah, dan Industri Bersih. Ia juga memuat berbagai kebijakan hijau/ramah lingkungan dalam bentuk linimasa regulasi yang sudah diterapkan di Jakarta dari tahun ke tahun untuk mencapai predikat kota rendah emisi.

Platform ini pada dasarnya fokus pada isu peningkatan kualitas udara dan mitigasi perubahan iklim, untuk itu di platform ini juga Warga Jakarta dapat memantau kualitas udara dari data kualitas udara yang dikumpulkan dari Stasiun Pemantauan Kualitas Udara (SPKU) DKI Jakarta, KLHK, dan Stasiun Pemantauan U.S. Embassy melalui Airnow.gov. Jika ingin melihat lebih jauh narasi dari data tersebut kompilasi dari laporan-laporan terkait seperti Jakarta Climate Action Plan 2021-2050 ataupun Laporan Inventarisasi Emisi Pencemar Udara DKI Jakarta terdapat dalam *section* portal belajar. Selain transparansi data untuk kita pantau bersama dalam portal ini juga menyediakan sarana untuk mempelajari dasar-dasar informasi terkait isu yang mereka angkat, di dalamnya juga terdapat beberapa infografis yang informatif untuk mengimplementasikan pengetahuannya ke dalam bentuk aksi nyata. Misalnya informasi lokasi uji emisi ataupun ilustrasi sistem pengolahan limbah B3 maupun pengenalan gerakan-gerakan terkait isu lingkungan yang sudah ada di masyarakat.

Gambar 4.2

Website Jakarta Rendah Emisi



Sumber: rendahemisi.jakarta.go.id

Gambar 4.3

Lokasi Uji Emisi

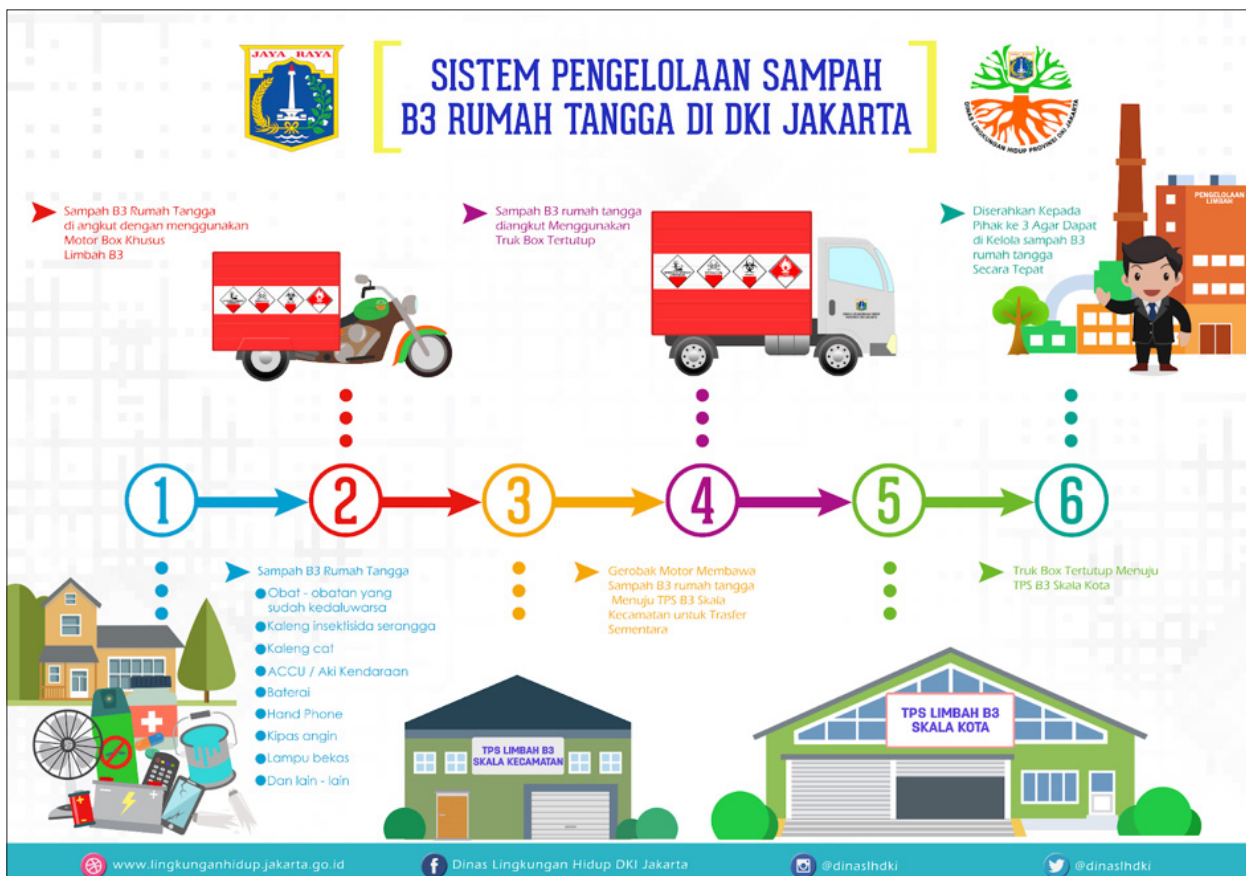


Sumber: rendahemisi.jakarta.go.id

Namun, secanggih-canggihnya website yang lebih penting lagi adalah keterlibatan dari seluruh elemen untuk bisa membuatnya lebih berdampak, untuk itu sosialisasi sangat penting dilakukan untuk disampaikan ke khalayak luas. Sebagai Kota Kolaborasi, portal ini juga tak lupa memuat profil mitra kolaborasi yang memiliki tujuan yang sama menuju Jakarta Rendah Emisi, berikut beberapa mitra yang telah berkolaborasi yang dicantumkan dalam laman tersebut.

Gambar 4.4

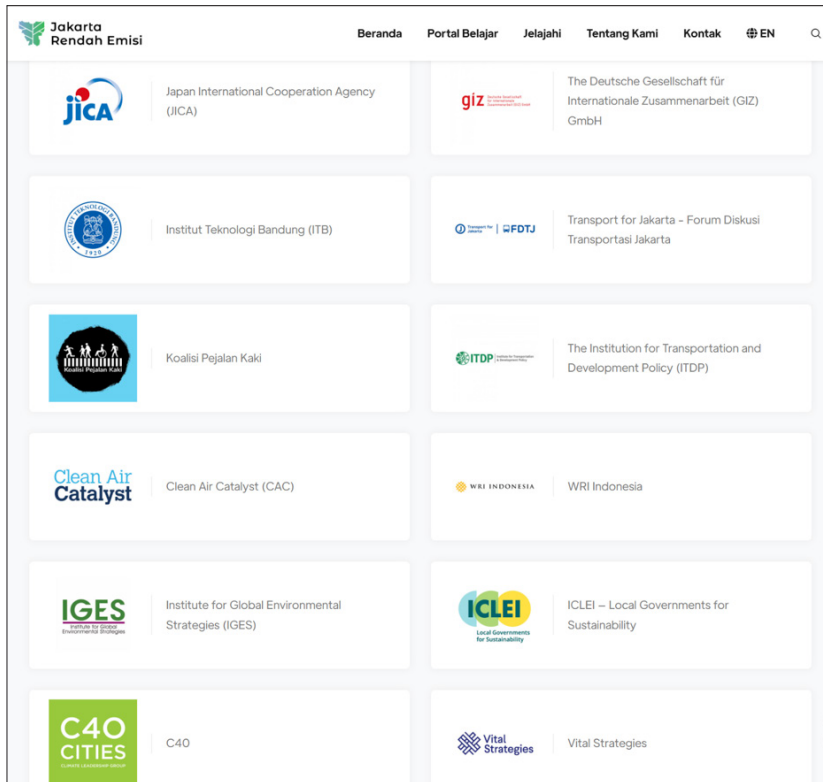
Sistem Pengolahan Sampah B3 Rumah Tangga



Sumber: rendahemisi.jakarta.go.id

Gambar 4.5

Mitra Kolaborasi dalam menuju Jakarta Rendah Emisi



Sumber: rendahemisi.jakarta.go.id

4.4 Praktik Baik Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Layanan Kependudukan Jakarta 15 Menit Selesai

Setelah meluncurkan aplikasi Alpukat Betawi, kini Disdukcapil melahirkan Inovasi lain bertajuk layanan kependudukan 15 menit selesai. Inovasi yang telah berjalan sejak tahun 2021 ini bertujuan mengoptimalkan pelayanan kependudukan dan catatan sipil agar semakin cepat dan mudah. Secara resmi, layanan ini diluncurkan pada April 2022 di balai kota.

Terdapat 4 tipe waktu penyelesaian berdasarkan jenis layanan, yaitu selesai dalam 15 menit, 30 menit, 60 menit dan 480 menit. Untuk penyelesaian selama 15 menit, terdapat 12 layanan administrasi kependudukan, yakni.

1. Pencatatan biodata penduduk kurang 12 tahun;
2. Penerbitan Kartu Keluarga (KK);
3. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP

Elektronik);

4. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);
5. Legalisasi dokumen kependudukan belum TTE;
6. Penerbitan Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non-Permanen (STBP2NP);
7. Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
8. Penerbitan Kutipan Akta Kematian;
9. Penerbitan Surat Keterangan Lahir-Mati;
10. Penerbitan kembali kutipan hilang/rusak yang telah ada bukti surat keabsahan;
11. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT);
12. Pencatatan peristiwa penting WNI dan orang asing di luar negeri.

Sementara untuk 13 Layanan Administrasi Kependudukan selesai dalam waktu 30 menit di antaranya: perekaman dan penerbitan KTP elektronik; Pembetulan Akta Pencatatan Sipil; Perubahan Akta Pencatatan Sipil, hingga Perubahan status kewarganegaraan. Kemudian,

Gambar 4.6

Peluncuran Layanan Kependudukan di Jakarta 15 Menit Selesai



sumber: <https://metro.tempo.co/read/1583804/urus-ktp-15-menit-jadi-di-dki-anies-baswedan-jadi-faktor-kepuasan-masyarakat>

8 Layanan Administrasi Kependudukan diselesaikan dalam waktu 60 menit, di antaranya, Pencatatan biodata penduduk lebih 12 tahun; Layanan konfirmasi dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, hingga Penerbitan kembali kutipan akta pencatatan sipil karena penguasaan salah satu pihak bersengketa. Terakhir, satu layanan administrasi kependudukan dalam waktu 480 menit adalah pemanfaatan akses data kependudukan yang telah disetujui oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Seluruh layanan tersebut juga dapat diakses secara daring melalui aplikasi Alpukat Betawi. Selain itu Disdukcapil berkolaborasi dengan Gojek dalam hal pengiriman dokumen pada masyarakat. Dengan ini masyarakat mendapatkan kepastian penyelesaian layanan serta semakin dimudahkan tanpa perlu antri ataupun mengunjungi kantor secara langsung.

Selain itu, inovasi ini juga dapat mengoptimalkan tata kelola kependudukan dan catatan sipil ke depan, terutama menekan hingga ke titik minimal dari praktik-

praktik maladministrasi. Jika sebelum ada kebijakan kepastian waktu penyelesaian layanan, oknum petugas cenderung berpeluang meminta uang ekstra dari publik untuk dipercepat penyelesaiannya. Kini peluang itu sudah semakin tertutup. Waktu layanan semakin transparan dan menawarkan kepastian pada publik.



V

Penutup

Kesimpulan

Tujuan 1, tanpa kemiskinan. Upaya menekan kemiskinan terlihat melalui tingkat kemiskinan yang mengalami penurunan, yakni 4,69% (September 2020) menjadi 4,67% (September 2021). Berbagai kebijakan dari Pemprov DKI Jakarta masih berlangsung sebagai pendorong utama dalam proses pemulihan tersebut diantaranya penyaluran bantuan-bantuan sosial dan penyempurnaan data penerima bantuan sosial. Upaya pencapaian tanpa kemiskinan juga banyak dilakukan oleh beragam unsur masyarakat sebagai bentuk solidaritas.

Tujuan 2, tanpa kelaparan. Penurunan prevalensi stunting merupakan prioritas Pemprov DKI Jakarta dan tercermin dalam penurunan prevalensi *stunting* di Provinsi DKI Jakarta pada anak balita dari 19,9% (2019) menjadi 16,8% (2021) menurut data SSGI (Studi Status Gizi Indonesia). Upaya dalam menanggulangi beragam isu kecukupan dan ketahanan pangan dilakukan oleh beragam pihak baik lintas sektor antar perangkat daerah juga dengan nonpemerintah. Beberapa wujud kolaborasi tersebut adalah 8 Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting di level DKI Jakarta, pemberian bantuan sosial berbentuk makanan, maupun *food bank* yang dilakukan oleh berbagai pihak kepada masyarakat yang membutuhkan.

Tujuan 3, kehidupan yang sehat dan sejahtera.

Upaya menjamin kehidupan masyarakat yang sehat diiringi dengan pengendalian pandemi COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta pada 2021. Terus dilakukan upaya melalui *testing, tracking, treatment* dan vaksinasi yang semakin menyeluruh dan turut bersinergi dengan platform JAKI (Jakarta Kini). Namun demikian, ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas mengalami sedikit tantangan dengan adanya penurunan ketersediaan dari 99,89% di tahun 2020 menjadi 98,36% di tahun 2021. Kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor nonpemerintah seperti perusahaan dan organisasi keagamaan untuk mendorong cakupan vaksinasi juga sangat membantu pengendalian

COVID-19.

Tujuan 4, pendidikan berkualitas. Dimulainya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas di sekolah-sekolah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta pada 2021 memulihkan semangat siswa dalam belajar setelah 20 bulan pembelajaran diselenggarakan secara jarak jauh. PTM Terbatas dengan mematuhi protokol kesehatan mulai diselenggarakan pada 30 Agustus 2021 kepada 610 sekolah dengan beragam jenjang pendidikan untuk mengurangi dampak *learning loss* pada siswa. Pandemi yang mendorong percepatan penguasaan keterampilan teknologi dalam pendidikan juga tercermin dalam proporsi remaja dan dewasa usia 15-59 tahun dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang meningkat dari 88,08% di 2020 menjadi 91,79% di 2021. Selain itu, terdapat program Sekolah Kolaborasi yang diselenggarakan Dinas Pendidikan (edu.jakarta.go.id), sebuah kerja sama untuk penyetaraan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia.

Tujuan 5, kesetaraan gender. Usaha dalam mencapai kesetaraan gender di DKI Jakarta menunjukkan tren positif yang terefleksikan pada berkurangnya proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir, dari 1,4 dari 10.000 perempuan dan anak pada tahun 2020 atau menjadi 0,75 dari 10.000 perempuan dan anak pada tahun 2021. Indikator persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2021 tetap konsisten mencapai 100% seperti tahun 2020.

Beberapa terobosan Pemprov DKI Jakarta, seperti penerbitan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindakan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, kemudian penguatan sistem perlindungan

saksi dan korban kekerasan hingga perluasan akses laporan kekerasan menjadi upaya untuk menekan angka kekerasan. Selain itu kolaborasi dalam kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak juga telah dilakukan oleh berbagai pihak.

Tujuan 6, Air bersih dan sanitasi yang layak.

Pemenuhan akses air bersih dan sanitasi layak tetap menjadi salah satu prioritas pemenuhan akses layanan dasar. Saat ini persentase cakupan layanan air bersih layak berdasarkan BPS sudah mencapai 99,86% tahun 2021 demikian juga untuk cakupan layanan air bersih perpipaan meningkat dari 64,24 persen pada 2020 menjadi 65,3 persen pada 2021. Terdapat pula kenaikan Persentase Waduk Yang Memenuhi Baku Mutu Untuk Air Baku dari 5.55% di tahun 2020 menjadi 7.41 % di tahun 2021. Berdasarkan BPS tahun 2021, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan sudah mencapai 95,17%. Demikian juga untuk cakupan pelayanan air limbah meningkat dari 17,75 persen pada 2020 menjadi 18,19 persen pada 2021.

Tujuan 7, energi bersih dan terjangkau. Sejalan dengan penurunan kasus Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta serta pulihnya perekonomian pada paruh kedua tahun 2021, terjadi peningkatan konsumsi listrik di Provinsi DKI Jakarta sebesar 4,93% per triwulan IV - 2021. Strategi yang dilakukan Pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat terhadap konsumsi listrik yaitu melalui program stimulus diskon tarif listrik. Sementara itu, dalam mendukung percepatan dan perluasan energi terbarukan dilakukan melalui pembangunan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) sebanyak 25 unit SPKLU di 18 lokasi.

Tujuan 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Pemulihan ekonomi Provinsi DKI Jakarta terus berlanjut pada semester II - 2021 yang ditandai dengan pertumbuhan positif sebesar 2,43% pada triwulan III - 2021 dan tumbuh 3,64% per triwulan IV - 2021. Perbaikan ekonomi Provinsi DKI Jakarta tersebut disertai

dengan penyerapan lapangan kerja sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta dapat ditekan dari level 10,95% pada Agustus 2020 menjadi 8,50% per Agustus 2021. Dalam mendukung daya beli dan pemulihan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menggelontorkan berbagai program stimulus untuk berbagai lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat miskin, rentan miskin, masyarakat mampu hingga kelompok tertentu seperti guru, veteran, lansia, pelajar, dan lainnya. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga meluncurkan program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) bidang UMKM yang menjembatani antara donatur dengan pelaku UMKM terdampak Covid-19.

Tujuan 9, industri, inovasi, dan infrastruktur. Kinerja industri manufaktur di Provinsi DKI Jakarta tercatat tumbuh positif pada triwulan III - 2021 sebesar 11,84% dan 11,21% per triwulan IV - 2021. Pemulihan industri manufaktur penting bagi ekonomi Jakarta karena kontribusinya yang cukup besar terhadap PDRB Provinsi DKI Jakarta yang mencapai 12,3%. Strategi yang dilakukan dalam menjaga momentum pemulihan industri manufaktur di Provinsi DKI Jakarta yaitu melalui peningkatan investasi langsung, terutama penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang mampu tumbuh positif hingga 74,62% pada semester II - 2021 dibandingkan semester I - 2021.

Tujuan 10, berkurangnya kesenjangan. Kebijakan Kebijakan untuk mengurangi kesenjangan di Provinsi DKI Jakarta dilakukan melalui bantuan sosial dan kenaikan UMP. Tujuannya untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama kelompok miskin-rentan. Pada tahun 2021, UMP Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar Rp 4.416.186, naik sebanyak 3,27% dari tahun 2020. Kemudian di bulan Desember 2021, Gubernur Provinsi DKI Jakarta menetapkan kenaikan UMP tahun 2022 secara signifikan, sebesar 5,1% atau senilai Rp 225.000 menjadi Rp 4.641.854. Sebelumnya, UMP ditetapkan naik di angka 0,85%.

Tujuan 11, Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap

hunian yang layak dan terjangkau di DKI Jakarta mengalami kenaikan dari 33,18 persen pada tahun 2020 menjadi 40 persen pada 2021. Namun capaian ini masih tergolong rendah, karena adanya satu kriteria terkait ketahanan bangunan, yaitu komponen atap asbes, yang dianggap tidak memenuhi standar kesehatan.

Tujuan 12, Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan.

Pada tujuan 12 menekankan pada aspek ekonomi sirkular melalui berbagai upaya khususnya pengelolaan sampah. DKI Jakarta telah berhasil melakukan penurunan sampah kota sebanyak 24,44%. Juga terjadi peningkatan jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) menjadi sebesar 2,6 juta ton dan juga jumlah timbunan sampah yang didaur ulang pada tahun 2021 sebesar 483.055,23 ton.

Tujuan 13, Penanganan Perubahan Iklim. Jakarta Strategi Jakarta dalam antisipasi perubahan iklim baik dari sisi kebijakan, strategi dan integrasi dengan perencanaan nasional dan internasional termanifestasikan dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim melalui aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Saat ini Jakarta telah mereduksi emisi GRK hingga 26 persen. Lalu sisi kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam, juga terindikasi mengalami perbaikan terlihat dari kenaikan Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah dari 5,9 menjadi 6,72 pada 2021.

Tujuan 14, Ekosistem Lautan. Upaya konservasi ekosistem laut masih perlu terus diupayakan baik melalui pemulihan terumbu karang dan penanaman mangrove untuk menjaga wilayah tangkap nelayan tradisional tetap seimbang dan produktif kendati dari segi luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitasi mengalami peningkatan dari 180,86 Ha menjadi 196,02 Ha.

Tujuan 15, Ekosistem Daratan. Saat ini terdapat 2.556 titik Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu di tahun 2021 juga terdapat kenaikan proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan dari 3,93% menjadi 4,19%. Dari segi biodiversitas juga terdapat kenaikan jumlah fauna yang di konservasi menjadi 2.298 dan flora menjadi 64.893, keduanya telah melampaui target Rencana Aksi Daerah untuk tahun 2021.

Tujuan 16, Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan

yang Tangguh. Penguatan tata kelola ditunjukkan oleh pencapaian beberapa indikator, mulai dari opini laporan keuangan, SAKIP hingga dokumen kependudukan. Pada opini laporan keuangan (Indikator 16.6.1 (a), Provinsi DKI Jakarta berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian selama 5 tahun berturut-turut (tahun 2017-2021). Selanjutnya, Provinsi DKI Jakarta berhasil meraih predikat A untuk SAKIP pada tahun 2021 (indikator 16.6.1 (b). Kemudian, Indeks Reformasi Birokrasi berhasil meraih nilai sebesar 78,88 (indikator 16.6.1 (d). Pada tata kelola dokumen kependudukan, persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil pada tahun 2021 mencapai 98,87% (indikator 16.9.1).

Tujuan 17, kemitraan untuk mencapai tujuan dengan indikator membaiknya kondisi ekonomi Provinsi DKI Jakarta yang terlihat pada meningkatnya kondisi ekonomi Provinsi DKI Jakarta pada semester II - 2021 membawa dampak positif terhadap kinerja pendapatan daerah yang tumbuh 161,58% dari Rp 25,08 triliun pada semester I - 2021 menjadi Rp 65,6 triliun pada akhir semester II - 2021. Sementara itu dari sisi belanja, realisasi belanja daerah hingga 31 Desember 2021 telah mencapai Rp 61,35 triliun atau tumbuh 169,6% dibandingkan realisasi per 30 Juni 2021 sebesar Rp 25,08 triliun. Untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memprioritaskan anggaran belanja daerah tahun 2021 untuk perlindungan sosial melalui anggaran belanja bantuan sosial yang bertambah Rp 1,8 triliun dari tahun sebelumnya.

1. Dalam rangka **penanggulangan kemiskinan**, maka peningkatan kualitas data dalam menyasar penerima manfaat, sosialisasi mengenai program, dan penggalakkan solidaritas antar masyarakat adalah salah satu upaya yang dapat membantu pemulihan atas dampak pandemi. Peningkatan partisipasi dunia usaha, filantropi, dan organisasi masyarakat sipil untuk saling berkoordinasi dan berbagi peran dalam penanggulangan kemiskinan juga menjadi salah satu upaya signifikan yang diperlukan secara jangka panjang.
2. Dalam rangka **mencapai tujuan tanpa kelaparan**, perlunya dilakukan peningkatan dukungan dari pemerintah, dunia usaha, dan unsur masyarakat lainnya akan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan gizi pada anak-anak. Edukasi dan kampanye secara daring oleh tokoh setempat kepada orang tua, melibatkan pemilik usaha makanan dalam inisiatif *foodbank*, dan pemanfaatan lahan untuk tanaman pangan dan obat dapat menjadi salah satu contoh kegiatan yang dilakukan.
3. Dalam rangka mewujudkan **kehidupan yang sehat dan sejahtera**, perlunya memelihara upaya promotif dan preventif dalam kesehatan fisik maupun mental di Provinsi DKI Jakarta yang telah ada, selain perlunya memperkuat partisipasi kolaboratif dari berbagai pihak. Pemberdayaan komunitas-komunitas yang mendukung pada gaya hidup sehat perkotaan juga perlu lebih ditingkatkan kembali.
4. Dalam rangka mewujudkan **pendidikan berkualitas**, maka perlunya peningkatan kualitas sekolah-sekolah yang ada di Provinsi DKI Jakarta, termasuk dalam pemenuhan hak akses belajar anak berkebutuhan khusus, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Penyempurnaan program kolaborasi antar sekolah dengan melibatkan akademisi dalam penyusunan materi ajar serta dunia usaha dalam memfasilitasi sarana dan prasarana kolaborasi, juga perlu ditingkatkan. Kolaborasi berbagai pihak untuk perapihan administrasi PAUD swasta juga perlu diperkuat agar angka APK PAUD dapat sesuai dengan kondisi sebenarnya.
5. Dalam rangka menanggulangi **kekerasan terhadap perempuan dan anak**, perlunya peningkatan kesadaran sedari dini mengenai potensi-potensi terjadinya kekerasan melalui edukasi luring dan daring di sekolah, perkantoran serta lingkungan permukiman masyarakat. Penguatan implementasi berbagai regulasi yang ada sebaiknya terus dilakukan untuk memastikan komitmen perlindungan yang optimal bagi korban dan saksi kekerasan. Keseriusan dalam memberikan perlindungan korban berpotensi menumbuhkan rasa percaya bagi korban-korban kekerasan untuk berani melapor.
6. Dalam upaya meningkatkan jumlah warga masyarakat yang dapat memanfaatkan air bersih dan sanitasi yang layak perlu dilakukan peningkatan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sistem Pengelolaan Air Limbah dan penegakan regulasi yang lebih ketat terkait penggunaan air di sektor industri khususnya.
7. Dalam rangka mendukung pemakaian kendaraan berbasis listrik, Pemprov DKI Jakarta dapat memfasilitasi penyediaan lokasi untuk tempat Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) baik di gedung-gedung pemerintahan Provinsi DKI Jakarta maupun di berbagai tempat publik strategis lainnya.
8. Dalam rangka menjaga momentum pemulihan ekonomi Provinsi DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta perlu meningkatkan promosi investasi serta penguatan UMKM melalui program Jakpreneur sehingga dapat menciptakan lapangan kerja bagi warga.
9. Dalam rangka meningkatkan peranan industri

manufaktur di Provinsi DKI Jakarta maka perlu dibuat *roadmap* industri manufaktur sejalan dengan perkembangan ekonomi Provinsi DKI Jakarta yang telah bergeser menjadi kota jasa dan perdagangan serta mendorong peningkatan industri manufaktur hijau.

10. Dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan di Provinsi DKI Jakarta maka *platform* Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) perlu diperluas sebagai sumber pendanaan perlindungan sosial non APBD dan penguatan sektor UMKM yang berbasis padat karya.
11. Peningkatan akses hunian yang layak dan terjangkau serta kualitas permukiman untuk pengentasan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas permukiman perlu terus diupayakan melalui implementasi dan kolaborasi program CAP dan CIP, dalam konteks peningkatan kelayakan hunian sebaiknya dilakukan sosialisasi terkait dampak buruk dari penggunaan asbes sebagai komponen atap bangunan rumah.
12. Kedepannya diharapkan peningkatan pengelolaan persampahan baik melalui upaya penanganan maupun pengurangan sampah dari sumber sebagaimana amanat Pergub Jakstrada, termasuk upaya alternatif pembiayaannya. Oleh karena itu peran Bidang Pengelolaan Sampah di tingkat Rukun Warga (RW) dalam kaitannya mengurangi timbulan sampah ke TPA Bantar Gebang agar segera dapat ditingkatkan.
13. Penurunan tingkat emisi GRK sebaiknya terus dilakukan dengan menysasar sektor energi dan transportasi sebagai penyumbang emisi terbesar di Jakarta.
14. Perlu dilakukan upaya rehabilitasi maupun konservasi di sekitar wilayah penangkapan ikan melalui kolaborasi bersama masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi dan penegakan hukum bagi pelaku usaha yang tidak memperhatikan ekosistem laut dan pesisir.
15. Perlu lebih banyak lagi dibangun Taman Maju Bersama yang mutltifungsi meliputi fungsi ekologi, sosial dan edukasi.
16. Penguatan tata kelola dan perluasan akses dokumen kependudukan, sebaiknya diikuti dengan sinergi data-data kependudukan dan kesejahteraan sosial dari OPD terkait (DPPAPP, Dasawisma, dan Dinsos) dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Melalui sinergi, kebijakan perlindungan sosial berpeluang semakin tepat sasaran dan berdampak optimal pada penerima manfaat.
17. Dalam rangka memulihkan kinerja pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta pasca pandemi Covid-19 maka perlu dibuat dokumen strategi optimalisasi APBD Provinsi DKI Jakarta yang fokus pada sektor-sektor utama penyumbang pendapatan asli daerah (PAD).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). Jakarta : Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kementerian PPN/Bappenas. 2020. Metadata Indikator Pilar Pembangunan Sosial Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). Jakarta : Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kementerian PPN/Bappenas. 2020. Metadata Indikator Pilar Pembangunan Ekonomi Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). Jakarta : Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kementerian PPN/Bappenas. 2020. Metadata Indikator Pilar Pembangunan Lingkungan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). Jakarta : Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kementerian PPN/Bappenas. 2020. Metadata Indikator Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). Jakarta : Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 2018. Rencana Aksi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2017-2022. Jakarta : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 2021. Akun Instagram Resmi Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (<https://www.instagram.com/dinsosdkijakarta/> diakses 30 Juni 2022)

Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 2021. Akun Instagram Resmi Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (<https://www.instagram.com/disdikdki/> diakses 30 Juni 2021)

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 2021. Akun Instagram Resmi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (<https://www.instagram.com/dkpkp.jakarta/> diakses 30 Juni 2021)

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 2021. Akun Instagram Resmi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (<https://www.instagram.com/dppappdki/> diakses 27 Juni 2021)

Badan Pusat Statistik. 2021. Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah 2021-2022. <https://www.bps.go.id/indicator/23/192/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi.html>. Diakses 30 Juni 2022.

Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan RI. SSGI: Buku Saku Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021. <https://www.litbang.kemkes.go.id/buku-saku-hasil-studi-status-gizi-indonesia-ssgi-tahun-2021/>. Diakses 30 Juni 2022.

Badan Pusat Statistik. 2021. Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Daerah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta 2019-2021. <https://jakarta.bps.go.id/indicator/23/645/1/garis-kemiskinan-jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-di-daerah-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta.html>. Diakses 30 Juni 2022.

Jakarta Smart City. 2021. Bantuan Sosial Tunai Pemprov DKI Jakarta 2021. <https://corona.jakarta.go.id/id/informasi-bantuan-sosial>. Diakses 30 Juni 2022

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 2021. Carik Jakarta. <https://pusdatinkeluarga.jakarta.go.id/#/dashboard-public>. Diakses 30 Juni 2022

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 2021. Kartu Anak Jakarta. <https://jakarta.go.id/kartu-anak-jakarta>. Diakses 30 Juni 2022.

Jakarta Smart City. 2021. Dashboard Monitoring Faskes Penjadwalan Vaksinasi melalui JAKI. <https://corona.jakarta.go.id/id/kuota-vaksinasi-jaki>. Diakses 30 Juni 2022

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2021. Dampak Negatif Satu Tahun PJJ, Dorongan Pembelajaran Tatap Muka Menguat. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/04/dampak-negatif-satu-tahun-pjj-dorongan-pembelajaran-tatap-muka-menguat>. Diakses 30 Juni 2022.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 2021. Kartu Jakarta Pintar. <https://kjp.jakarta.go.id/>. Diakses 30 Juni 2022.

Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2020. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)/Home Learning Bermakna dan Menyenangkan. <https://lpmpdki.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/03/Edaran-Nomor-33-Tahun-2020.pdf>.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. 2021. Simfoni-PPA. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 2021. Pencegahan dan Penanganan Tindakan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja Pemerintah. https://jdih.jakarta.go.id/himpunan/produkhukum_detail/11119.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 2019. Peraturan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/109159/pergub-prov-dki-jakarta-no-24-tahun-2019#:~:text=PERGUB%20Prov.,PENYANDANG%20DISABILITAS%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D>.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 2020. Besaran Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas. https://jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/KEPGUB_NO._410_TAHUN_2020.pdf

Paat, Y. (2021, December 11). DKI Terus Perangi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. BeritaSatu.com. Retrieved September 16, 2022, from <https://www.beritasatu.com/megapolitan/865655/dki-terus-perangi-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak>

Saputra, E. Y. (2022, April 19). Urus KTP 15 Menit Jadi di DKI, Anies Baswedan: Jadi Faktor Kepuasan Masyarakat. Metro Tempo.co. Retrieved September 16, 2022, from <https://metro.tempo.co/read/1583804/urus-ktp-15-menit-jadi-di-dki-anies-baswedan-jadi-faktor-kepuasan-masyarakat>

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. 2022. Aplikasi Pengawasan (Jakwas) <https://jakwas.jakarta.go.id/aplikasi/pengawasan>

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Plus Jakarta, Vital Strategies, & Bloomberg Philanthropies. (2021). Website Jakarta Rendah Emisi. Jakarta Rendah Emisi. Retrieved 2022, from <https://rendahemisi.jakarta.go.id/>

Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2022). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2021.

Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2022). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2021.

DW. (2021, November 15). Jakarta Puncaki Daftar Kota Paling Rentan Krisis Iklim – DW – 15.11.2021. DW: Made for Minds. Retrieved 2022, from <https://www.dw.com/id/jakarta-puncaki-daftar-kota-paling-rentan-krisis-iklim/a-57519795>

Gunawan, A. (2021, December 27). Apical Group Bersama Pemda Selamatkan Mangrove di DKI Jakarta. Sumatra Bisnis. Retrieved 2022, from <https://sumatra.bisnis.com/read/20211227/534/1482130/apical-group-bersama-pemda-selamatkan-mangrove-di-dki-jakarta>

Koagouw, W., Arifin, Z., Olivier, G. W.J., & Ciocan, C. (n.d.). High concentrations of paracetamol in effluent dominated waters of Jakarta Bay, Indonesia. Marine Pollution Bulletin, 169. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2021.112558>.

Mola, T. (2021, July 8). Survei KNTI: Ekonomi Nelayan Membaik di Tengah Pandemi. Ini Sebabnya. Ekonomi. Retrieved 2022, from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210708/99/1415312/survei-knti-ekonomi-nelayan-membaik-di-tengah-pandemi-ini-sebabnya>

Paat, Y. (2021, December 11). DKI Terus Perangi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. BeritaSatu.com. Retrieved September 16, 2022, from <https://www.beritasatu.com/megapolitan/865655/dki-terus-perangi-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak>

Saputra, E. Y. (2022, April 19). Urus KTP 15 Menit Jadi di DKI, Anies Baswedan: Jadi Faktor Kepuasan Masyarakat. Metro Tempo.co. Retrieved September 16, 2022, from <https://metro.tempo.co/read/1583804/urus-ktp-15-menit-jadi-di-dki-anies-baswedan-jadi-faktor-kepuasan-masyarakat>

Wiryono, S. (2022, January 10). Perkenalkan Tebet Eco Park, Anies: Merestorasi Fungsi Taman secara Ekologi. Megapolitan - KOMPAS.com. Retrieved 2022, from <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/01/10/15162921/perkenalkan-tebet-eco-park-anies-merestorasi-fungsi-taman-secara-ekologi>